

Otom Mustomi, S.H., M.H.  
Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP.  
Dr. Ansar, SP., M.Si.  
Dr. Achmad Fathor Rosyid, M.Si.



*Buku Referensi*

# **GLOBALISASI**

## **DAN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK**





**BUKU REFERENSI**  
**GLOBALISASI DAN**  
**PERUBAHAN SOSIAL**  
**POLITIK**

Otom Mustomi, S.H., M.H.  
Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP.  
Dr. Ansar, SP., M.Si.  
Dr. Achmad Fathor Rosyid, M.Si.





# **GLOBALISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK**

---

Ditulis oleh:

Otom Mustomi, S.H., M.H.  
Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP.  
Dr. Ansar, SP., M.Si.  
Dr. Achmad Fathor Rosyid, M.Si.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-634-7012-02-9  
IV + 215 hlm; 15,5x23 cm.  
Cetakan I, Oktober 2024

**Desain Cover dan Tata Letak:**  
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Media Penerbit Indonesia**  
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata  
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131  
Telp: 081362150605  
Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)  
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>  
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024





# KATA PENGANTAR

---

Di dunia yang semakin terhubung dan terintegrasi secara global, fenomena globalisasi telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk sosial dan politik. Globalisasi tidak hanya mengubah cara berinteraksi dan berdagang, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, kebijakan politik, dan dinamika kekuasaan di seluruh dunia. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial politik menjadi sangat penting bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

Buku referensi ini bertujuan untuk membahas fenomena globalisasi dan bagaimana globalisasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di seluruh dunia. Buku referensi ini membahas bagaimana globalisasi mempengaruhi proses-proses politik, pembentukan identitas budaya, konflik sosial, dan dinamika kekuasaan di era modern ini. Buku referensi ini juga membahas berbagai studi kasus yang menggambarkan perubahan sosial politik di berbagai konteks lokal, regional, dan global, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas fenomena ini.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca dalam memahami dan merespons tantangan-tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi ini.

Salam hangat.

**TIM PENULIS**



# DAFTAR ISI

---

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Buku .....	1
B. Tujuan Buku .....	4
<b>BAB II PENGERTIAN DAN KONSEP GLOBALISASI .....</b>	<b>7</b>
A. Definisi Globalisasi .....	7
B. Dimensi Globalisasi.....	11
C. Teori-Teori Globalisasi.....	40
<b>BAB III SEJARAH GLOBALISASI.....</b>	<b>45</b>
A. Perkembangan Sejarah Globalisasi.....	45
B. Faktor-Faktor Pendorong Globalisasi.....	48
C. Perubahan Sosial Politik Akibat Globalisasi .....	52
<b>BAB IV DAMPAK EKONOMI GLOBALISASI.....</b>	<b>57</b>
A. Integrasi Ekonomi Global.....	57
B. Neraca Perdagangan .....	63
C. Investasi Asing dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Politik .....	70
<b>BAB V DAMPAK SOSIAL GLOBALISASI.....</b>	<b>81</b>
A. Perubahan Budaya .....	81
B. Migrasi Dan Mobilitas Penduduk.....	87
C. Tantangan Kesejahteraan Sosial .....	94
<b>BAB VI DAMPAK POLITIK GLOBALISASI.....</b>	<b>101</b>
A. Perubahan Dalam Dinamika Kekuasaan Politik.....	101
B. Peran Organisasi Internasional .....	109



C.	Isu Global dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Politik ...	112
<b>BAB VII</b>	<b>RESPON DAN ADAPTASI TERHADAP GLOBALISASI.....</b>	<b>121</b>
A.	Strategi Negara-Negara Berkembang Menghadapi Globalisasi .....	121
B.	Inovasi Sosial Politik Dalam Menghadapi Tantangan Global .....	131
C.	Penyesuaian Kebijakan Dalam Konteks Globalisasi .....	134
<b>BAB VIII</b>	<b>STUDI KASUS NEGARA-NEGARA TERPILIH ....</b>	<b>147</b>
A.	Analisis Dampak Globalisasi Di Negara A .....	147
B.	Pengalaman Negara B Dalam Menghadapi Tantangan Global .....	155
C.	Strategi dan Kebijakan Yang Efektif Di Negara C.....	157
<b>BAB IX</b>	<b>PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL.....</b>	<b>161</b>
A.	Peran PBB Dalam Menanggapi Tantangan Global .....	161
B.	Organisasi Regional dan Kolaborasi Antar Negara.....	164
C.	Isu-Isu Kemanusiaan Global dan Tanggapan Organisasi Internasional .....	171
<b>BAB X</b>	<b>TANTANGAN ETIKA DAN HAM DALAM KONTEKS GLOBALISASI.....</b>	<b>177</b>
A.	Masalah Etika dalam Perdagangan Global .....	177
B.	Tantangan Hak Asasi Manusia Dalam Era Globalisasi.	179
C.	Penegakan HAM di Tingkat Internasional .....	182
<b>BAB XI</b>	<b>PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KONTEKS GLOBALISASI.....</b>	<b>187</b>
A.	Konsep Pembangunan Berkelanjutan .....	187
B.	Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Praktek Global .....	190
C.	Peran Masyarakat Sipil dan Swasta Dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	193

<b>BAB XII KESIMPULAN.....</b>	<b>199</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>201</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>207</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>209</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>213</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

Pada konteks globalisasi yang terus berlangsung, perubahan sosial politik menjadi fenomena yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara luas. Globalisasi tidak hanya mempercepat interkoneksi antarnegara, tetapi juga mempengaruhi tata kelola politik dan dinamika sosial di tingkat lokal dan global. Dengan semakin terbukanya batas-batas negara dan penyebaran ide-ide serta nilai-nilai secara global, perubahan sosial politik menjadi semakin kompleks dan melintasi berbagai bidang kehidupan. Selain itu, globalisasi juga memunculkan tantangan baru dalam mengelola dinamika sosial politik, termasuk dalam hal menanggapi perubahan ekonomi, budaya, dan teknologi yang terjadi di era ini. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara globalisasi dan perubahan sosial politik menjadi penting untuk menjawab tantangan-tantangan kompleks dalam politik dan masyarakat kontemporer.

### A. Latar Belakang Buku

Buku "Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik" mengindikasikan pembahasan tentang bagaimana globalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di berbagai belahan dunia.

#### 1. Definisi Globalisasi

Globalisasi merujuk pada proses integrasi yang semakin meningkat antara berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini mencakup interaksi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang semakin terhubung dan saling mempengaruhi di tingkat global. Fenomena ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi dan barang secara cepat dan

efisien. Seiring dengan itu, globalisasi juga menciptakan tantangan baru seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik budaya, dan kompleksitas politik yang melintasi batas-batas nasional.

## **2. Dampak Ekonomi**

Dampak ekonomi dari globalisasi sangat signifikan, karena fenomena ini membuka pintu bagi integrasi pasar dan pertukaran barang serta modal di seluruh dunia. Hal ini menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, terutama bagi negara-negara yang mampu memanfaatkan akses pasar global untuk meningkatkan produksi dan ekspor. Namun, di sisi lain, globalisasi juga meningkatkan persaingan ekonomi yang ketat dan sering kali mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Selain itu, investasi asing yang masuk dalam skala besar dapat memengaruhi kebijakan ekonomi domestik suatu negara, baik dalam hal regulasi maupun pembangunan infrastruktur.

## **3. Dampak Sosial**

Dampak sosial dari globalisasi mencakup transformasi dalam pola hubungan sosial, budaya, dan identitas di seluruh dunia. Fenomena ini mempercepat pertukaran budaya dan nilai-nilai antarbangsa melalui media massa dan teknologi komunikasi modern. Seiring dengan itu, munculnya budaya populer global dan integrasi budaya dapat memperkaya kehidupan sosial masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan terhadap identitas budaya lokal yang kadang-kadang terancam oleh dominasi budaya global. Di samping itu, globalisasi juga mempengaruhi pola hubungan sosial, termasuk keluarga dan komunitas lokal, yang dapat mengalami perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan struktur sosial.

## **4. Dampak Politik**

Dampak politik dari globalisasi mencakup perubahan dalam dinamika politik di tingkat nasional dan internasional. Proses globalisasi telah menghasilkan integrasi ekonomi yang kuat antara negara-negara, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan politik dan kebijakan nasional. Hal ini menciptakan fenomena seperti diplomasi ekonomi dan perdagangan politik, di mana kepentingan ekonomi sering kali menjadi pertimbangan utama dalam hubungan

antarnegara. Selain itu, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Bank Dunia juga berperan penting dalam mengatur interaksi politik antarnegara dan mengatasi isu-isu global yang kompleks.

## **5. Isu Kontemporer**

Isu kontemporer yang muncul sehubungan dengan globalisasi mencakup berbagai tantangan dan perdebatan yang berkembang di tingkat global. Salah satu isu utama adalah perdagangan bebas, di mana pendukungnya mengklaim bahwa ini membawa manfaat ekonomi besar, sementara kritikus menyatakan bahwa hal itu dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dan merugikan pekerja yang rentan. Perubahan iklim juga menjadi isu penting, karena aktivitas ekonomi global yang berkelanjutan telah menyebabkan perubahan iklim yang signifikan, memunculkan kebutuhan untuk tindakan kolaboratif untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, migrasi internasional juga menjadi fokus perdebatan, dengan meningkatnya mobilitas global yang menghasilkan tantangan sosial, ekonomi, dan politik bagi negara-negara penerima dan negara asal. Ketimpangan global, baik dalam hal ekonomi maupun akses terhadap sumber daya, menjadi perhatian penting karena globalisasi cenderung memperkuat ketidaksetaraan di antara negara-negara dan dalam masyarakat.

## **6. Tantangan dan Peluang**

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial politik mencerminkan kompleksitas dinamika global saat ini. Salah satu tantangan utama adalah menangani ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang semakin meningkat antara negara-negara dan di dalam masyarakat. Hal ini memerlukan upaya kolaboratif antarnegara dan kebijakan dalam negeri yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu, munculnya berbagai tantangan baru seperti perubahan iklim dan migrasi global menuntut respons yang cepat dan terkoordinasi dari komunitas internasional. Namun, di tengah tantangan tersebut juga terdapat peluang untuk memanfaatkan integrasi global untuk meningkatkan kerjasama antarnegara, memperluas akses terhadap teknologi dan informasi, serta mempromosikan nilai-nilai

kemanusiaan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Kesadaran akan tantangan dan peluang ini dapat membantu masyarakat dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi dan kebijakan yang tepat untuk menghadapi era globalisasi ini dengan lebih efektif.

## **B. Tujuan Buku**

Buku "Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik" secara umum bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fenomena globalisasi memengaruhi dan berinteraksi dengan dinamika sosial dan politik di berbagai negara dan masyarakat.

### **1. Memahami Konsep Globalisasi**

Pada buku "Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik", pemahaman konsep globalisasi menjadi fokus penting. Konsep globalisasi merujuk pada proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang menghubungkan berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia. Dalam konteks sosial politik, globalisasi mencakup aliran ide, informasi, dan modal, serta pertukaran budaya yang semakin terbuka dan terhubung. Lebih dari sekadar meningkatnya interkoneksi, globalisasi juga mencakup pengaruh kuat dari institusi-institusi global seperti lembaga keuangan internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional.

### **2. Menganalisis Dampak Globalisasi**

Pada konteks tujuan buku "Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik", menganalisis dampak globalisasi menjadi aspek krusial. Globalisasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perubahan dalam struktur sosial dan politik di seluruh dunia. Dampaknya mencakup peningkatan mobilitas manusia, perdagangan internasional yang semakin terintegrasi, serta transfer teknologi dan ide yang cepat. Di samping itu, globalisasi juga telah memunculkan tantangan baru seperti ketidaksetaraan ekonomi, kehilangan kedaulatan negara dalam beberapa aspek, dan ketegangan politik antarnegara.

### **3. Menyelidiki Tantangan dan Peluang**

Salah satu fokus penting dalam buku "Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik" adalah penyelidikan terhadap tantangan dan

peluang yang muncul akibat fenomena globalisasi. Tantangan-tantangan tersebut mencakup meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi antar negara dan dalam masyarakat, konflik politik yang dipicu oleh perubahan global, serta hilangnya kedaulatan negara dalam beberapa aspek terkait ekonomi dan kebijakan. Namun demikian, globalisasi juga membawa peluang seperti akses yang lebih besar ke pasar global bagi pelaku ekonomi, pertukaran budaya yang lebih luas, serta kerjasama internasional dalam menangani isu-isu global seperti perubahan iklim dan perdamaian dunia.

#### **4. Membahas Respons Sosial dan Politik**

Tujuan buku "Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik", pembahasan mengenai respons sosial dan politik terhadap fenomena globalisasi menjadi esensial. Respons sosial melibatkan reaksi dari berbagai kelompok masyarakat, seperti gerakan sosial, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menghadapi dampak globalisasi terhadap struktur sosial dan nilai-nilai budaya. Sementara itu, respons politik melibatkan tindakan dari pemerintah dan lembaga politik dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur interaksi dengan lingkungan global dan merespons perubahan yang diinduksi oleh globalisasi.

#### **5. Merangsang Pemikiran Kritis**

Pada konteks tujuan buku "Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik", merangsang pemikiran kritis menjadi salah satu aspek yang penting. Buku ini mungkin bertujuan untuk mendorong pembaca untuk mempertanyakan dan mengevaluasi berbagai aspek dari globalisasi serta dampaknya terhadap sosial dan politik. Ini bisa mencakup mengajukan pertanyaan kritis tentang distribusi kekuasaan dalam sistem global, pertimbangan etika dalam perdagangan internasional, atau implikasi sosial dari migrasi global. Melalui membangkitkan pemikiran kritis, buku tersebut berharap pembaca dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas fenomena globalisasi dan perubahan sosial politik yang terkait, serta dapat merumuskan pandangannya sendiri tentang respons yang tepat dalam konteks yang terus berubah ini.







# **BAB II**

## **PENGERTIAN DAN KONSEP GLOBALISASI**

---

---

Pengertian dan konsep globalisasi merupakan topik yang menarik untuk dipelajari dalam konteks era modern yang terus berubah. Globalisasi merujuk pada proses integrasi ekonomi, politik, dan sosial yang semakin meluas di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan peningkatan interaksi dan interkoneksi antarnegara, serta penyebaran ide, teknologi, dan budaya secara global. Dalam era globalisasi ini, batas-batas geografis semakin kabur dan pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah, mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perdagangan internasional hingga pertukaran budaya dan pemikiran, yang semuanya membentuk ciri khas dari era global yang kita tinggali saat ini.

### **A. Definisi Globalisasi**

#### **1. Pengertian Globalisasi**

Globalisasi adalah fenomena kompleks yang melibatkan integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di seluruh dunia. Menurut Anthony Giddens (1990), globalisasi merujuk pada "intensifikasi hubungan sosial di mana jarak waktu dan ruang menjadi semakin tidak signifikan." Ini mencakup pertukaran barang, ide, informasi, dan budaya antar negara dan individu. Dalam konteks ekonomi, Joseph Stiglitz (2002) menggambarkan globalisasi sebagai "peningkatan interkoneksi dan ketergantungan ekonomi antar negara melalui perdagangan barang dan jasa, investasi lintas batas, dan arus modal." Fenomena ini juga mencakup penyebaran teknologi dan komunikasi

yang memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan efisien di seluruh dunia (Friedman, 2005).

Globalisasi tidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga menimbulkan kontroversi. David Held (2000) membahas bahwa sementara globalisasi memberikan peluang ekonomi yang besar, juga meningkatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Hal ini terlihat dalam pembagian kerja global yang cenderung menguntungkan negara-negara maju dan meninggalkan negara-negara berkembang terbelakang. Selain itu, globalisasi sering kali dianggap mengancam identitas budaya lokal dan tradisi, memicu resistensi dan konflik di beberapa masyarakat (Appadurai, 1996).

## **2. Karakteristik Globalisasi**

Globalisasi merupakan fenomena kompleks yang telah mengubah secara signifikan berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Dalam konteks ekonomi, globalisasi ditandai dengan peningkatan perdagangan internasional dan arus modal yang lebih bebas, memungkinkan integrasi pasar global. Di sisi lain, dalam bidang sosial dan budaya, globalisasi menyebabkan penyebaran nilai-nilai, budaya populer, dan informasi secara luas melalui teknologi komunikasi yang semakin canggih. Sementara dalam dimensi politik, globalisasi telah menciptakan tuntutan untuk kerjasama lintas negara dalam menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan keamanan.

### **a. Interkoneksi**

Interkoneksi adalah salah satu karakteristik kunci dari fenomena globalisasi. Dalam pandangan Klaus Schwab (2016), interkoneksi merujuk pada "interdependensi yang semakin dalam antara negara-negara, perusahaan, dan individu-individu di seluruh dunia." Melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, kita menjadi semakin terhubung satu sama lain, membentuk jaringan yang kompleks di seluruh dunia. Dalam konteks ekonomi, Dambisa Moyo (2017) menekankan bahwa interkoneksi memungkinkan aliran modal, barang, dan tenaga kerja yang lebih cepat dan lancar di seluruh dunia, mengarah pada terbentuknya pasar global yang lebih terintegrasi.

Interkonnektivitas juga memunculkan tantangan yang signifikan. Menurut Yuval Noah Harari (2018), fenomena interkonnektivitas ini membawa konsekuensi besar dalam hal privasi dan keamanan data. Perkembangan teknologi informasi telah mempercepat aliran informasi dan data, namun juga meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Lebih lanjut, Jeremy Rifkin (2020) mencatat bahwa interkonnektivitas yang semakin kuat juga dapat memperkuat ketidaksetaraan, dengan beberapa pihak yang lebih mampu memanfaatkannya untuk keuntungan sendiri, sementara yang lain tertinggal.

b. Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas merupakan salah satu karakteristik utama dari globalisasi ekonomi. Menurut Joseph Stiglitz (2017), perdagangan bebas adalah fenomena yang memungkinkan barang dan jasa untuk bergerak secara bebas di seluruh dunia tanpa hambatan perdagangan seperti tarif atau kuota. Dengan demikian, perdagangan bebas memungkinkan terciptanya pasar global yang lebih terbuka dan terintegrasi. Para ahli seperti Thomas Friedman (2015) menekankan bahwa perdagangan bebas mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang bagi negara-negara untuk memperluas pasar di tingkat internasional. Hal ini tercermin dalam semangat perdagangan bebas yang dicanangkan dalam berbagai kesepakatan perdagangan multilateral, seperti Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China.

Pandangan kritis terhadap perdagangan bebas juga ada. Naomi Klein (2017) membahas dampak negatif perdagangan bebas terhadap keadilan sosial dan lingkungan. Dia menganggap perdagangan bebas sebagai instrumen yang memperdalam kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang serta mengorbankan keberlanjutan lingkungan demi keuntungan ekonomi. Robert Reich (2018) menambahkan bahwa perdagangan bebas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor tertentu, terutama di negara-negara dengan upah tinggi, karena persaingan dari negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah.

c. Mobilitas Modal

Mobilitas modal merupakan salah satu karakteristik penting dari fenomena globalisasi ekonomi. Menurut Thomas Piketty (2019), mobilitas modal mengacu pada kemampuan modal untuk berpindah secara bebas di seluruh dunia, termasuk investasi portofolio, investasi langsung asing, dan aliran modal keuangan lainnya. Melalui perkembangan sistem keuangan global yang semakin terintegrasi, modal dapat dengan mudah berpindah antar negara dan benua tanpa hambatan yang signifikan. Dalam pandangan Joseph E. Stiglitz (2017), mobilitas modal telah meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir, terutama sebagai hasil dari liberalisasi keuangan dan teknologi informasi yang berkembang pesat.

Meskipun mobilitas modal telah memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga menimbulkan beberapa masalah. Robert Shiller (2015) membahas bahwa mobilitas modal yang tinggi dapat menyebabkan volatilitas pasar keuangan yang tidak stabil, terutama di negara-negara berkembang yang rentan terhadap aliran modal yang berfluktuasi. Selain itu, Paul Krugman (2022) mengingatkan bahwa mobilitas modal yang tidak terkendali dapat memperkuat ketidaksetaraan ekonomi, dengan modal lebih mudah mengalir ke negara-negara dengan kebijakan yang menguntungkan bagi investor, meninggalkan negara-negara lain tertinggal dalam persaingan global.

d. Interdependensi Ekonomi

Interdependensi ekonomi adalah salah satu ciri utama dari globalisasi yang menggambarkan hubungan saling ketergantungan antara berbagai ekonomi di seluruh dunia. Menurut Jeffrey Sachs (2016), interdependensi ekonomi mengarah pada integrasi yang lebih dalam antara pasar, produksi, dan keuangan di tingkat global, menciptakan jaringan yang kompleks di mana perubahan dalam satu ekonomi dapat memiliki dampak yang luas di negara lain. Dengan perkembangan perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan aliran modal yang semakin bebas, interdependensi ekonomi semakin meningkat dalam era globalisasi.

Interdependensi ekonomi juga membawa risiko yang signifikan. Menurut Christine Lagarde (2019), fenomena ini meningkatkan kerentanan terhadap krisis ekonomi yang bersifat sistemik, di mana gangguan dalam satu bagian ekonomi dapat dengan cepat menyebar ke negara-negara lain melalui saluran perdagangan dan keuangan. Nouriel Roubini (2021) menekankan bahwa interdependensi ekonomi juga dapat memperkuat ketidakstabilan ekonomi global, karena perubahan dalam kebijakan ekonomi suatu negara dapat memiliki efek domino yang luas di seluruh dunia.

## **B. Dimensi Globalisasi**

Dimensi globalisasi merujuk pada berbagai aspek yang saling terkait dan saling memengaruhi dalam fenomena globalisasi yang semakin kompleks. Secara ekonomi, dimensi globalisasi mencakup peningkatan interkoneksi antar pasar global, pertumbuhan perdagangan lintas batas, dan integrasi sistem keuangan global. Di bidang sosial dan budaya, dimensi ini mencakup penyebaran ide, nilai, dan budaya melalui media massa, teknologi informasi, dan mobilitas manusia yang semakin meningkat. Sementara dalam dimensi politik, globalisasi menciptakan tuntutan untuk kerjasama internasional dalam menangani tantangan global seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, dan migrasi.

### **1. EKONOMI**

Dimensi globalisasi ekonomi membenteng sebagai fenomena kompleks yang mengubah wajah ekonomi global pada abad ke-21. Dengan meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara, pasar global menjadi lebih terhubung daripada sebelumnya, memungkinkan aliran modal, tenaga kerja, dan teknologi melewati batas-batas nasional. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi perusahaan multinasional dan negara-negara maju, tetapi juga memberi dampak signifikan pada ekonomi berkembang, menciptakan peluang baru sekaligus tantangan yang kompleks.

Seiring dengan pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi ekonomi telah menciptakan jaringan yang semakin kompleks dan saling tergantung di antara negara-negara di

seluruh dunia. Fenomena ini juga telah mendorong munculnya diskusi tentang kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan, dan dampak sosialnya, mengingat distribusi manfaat globalisasi yang tidak merata. Oleh karena itu, memahami dimensi globalisasi ekonomi menjadi krusial dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era global yang terus berkembang.

a. Faktor-faktor yang Mendorong Globalisasi Ekonomi

Di era globalisasi yang semakin terintegrasi, mendorong ekonomi global menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat memperlihatkan perlunya kolaborasi lintas batas untuk memaksimalkan potensi ekonomi secara keseluruhan. Melalui kerjasama internasional yang lebih erat, negara-negara dapat saling memanfaatkan keahlian dan sumber daya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.

1) Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional berperan penting dalam mendorong globalisasi ekonomi melalui beberapa faktor kunci. Menurut Robert C. Feenstra (2016), peningkatan perdagangan internasional telah menghasilkan integrasi ekonomi antarnegara yang lebih erat, memfasilitasi aliran barang, jasa, dan investasi lintas batas. Hal ini menciptakan kesempatan bagi negara-negara untuk memperluas pasar dan meningkatkan spesialisasi dalam produksi barang dan jasa tertentu. Selain itu, perdagangan internasional juga mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan antarnegara, seperti yang diungkapkan oleh J. Bradford Jensen *et al.* (2017), yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan inovasi di seluruh dunia. Dengan demikian, perdagangan internasional berfungsi sebagai salah satu pendorong utama globalisasi ekonomi pada abad ke-21.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memperkuat peran perdagangan internasional dalam mempercepat globalisasi ekonomi. Menurut Petr Pavlínek *et al.* (2020), kemajuan dalam TIK telah mengurangi biaya komunikasi dan transaksi lintas batas, sehingga memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam rantai pasokan global dengan lebih efisien. Hal ini menciptakan

lingkungan bisnis yang lebih terhubung secara global dan memungkinkan pertukaran informasi dan keahlian antarnegara secara cepat dan efektif. Seiring dengan itu, ekonomi digital semakin berkembang, seperti yang dijelaskan oleh Annabelle Gawer (2017), yang memperkuat integrasi ekonomi global dan meningkatkan peran perdagangan internasional dalam memfasilitasi aliran data, layanan digital, dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, TIK menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perdagangan internasional dan globalisasi ekonomi.

## 2) Teknologi

Teknologi berperan sentral dalam mendorong globalisasi ekonomi melalui beberapa faktor utama. Seperti yang diungkapkan oleh Klaus Schwab (2016), perkembangan teknologi digital telah memfasilitasi konektivitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam rantai pasokan global dan mengakses pasar internasional dengan lebih mudah. Teknologi juga telah mengurangi biaya komunikasi dan transportasi, seperti yang disoroti oleh Richard Baldwin (2019), sehingga mempercepat aliran barang, jasa, dan modal di seluruh dunia. Selain itu, inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan *Internet of Things* (IoT) telah menciptakan peluang baru dalam perdagangan internasional, meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang dan jasa secara global.

Teknologi telah menjadi pendorong utama integrasi ekonomi global melalui pembentukan platform digital dan pasar online. Menurut Annabelle Gawer (2014), platform digital seperti Amazon, Alibaba, dan Google memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens global dan memperluas jangkauan produk tanpa batasan geografis tradisional. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi baru yang terhubung secara global, memfasilitasi perdagangan lintas batas tanpa hambatan fisik yang signifikan. Di samping itu, teknologi blockchain, seperti yang dijelaskan oleh Don Tapscott dan Alex Tapscott (2016), telah membuka potensi untuk meningkatkan transparansi dan

keamanan dalam transaksi lintas batas, memberikan fondasi yang lebih stabil untuk pertumbuhan perdagangan internasional.

### 3) Investasi Asing Langsung

Investasi asing langsung (FDI) berperan penting dalam mendorong globalisasi ekonomi melalui beberapa mekanisme yang relevan. Seperti yang dijelaskan oleh Theodore H. Moran *et al.* (2016), FDI menciptakan hubungan ekonomi yang lebih erat antara negara-negara melalui investasi langsung dalam produksi dan infrastruktur di luar negeri. Ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keunggulan komparatif di berbagai negara dan memperluas operasi secara global. Selain itu, FDI juga memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan antarnegara, seperti yang diungkapkan oleh Joaquim Oliveira Martins *et al.* (2018), yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi di negara penerima investasi.

FDI dapat menjadi pendorong integrasi pasar global melalui pembentukan rantai pasokan global. Menurut Richard E. Baldwin (2016), perusahaan multinasional sering membentuk jaringan rantai pasokan global yang melintasi berbagai negara, menghubungkan produsen, pemasok, dan distributor di seluruh dunia. Hal ini menciptakan interdependensi ekonomi antarnegara yang lebih dalam dan memperluas cakupan perdagangan internasional. Selain itu, FDI juga dapat meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan kapasitas produksi di negara-negara berkembang, seperti yang dijelaskan oleh Karl P. Sauvant *et al.* (2018), yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antarnegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

### 4) Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional (IFI) memegang peran krusial dalam mendorong globalisasi ekonomi melalui berbagai mekanisme yang relevan. Seperti yang dijelaskan oleh Joseph E. Stiglitz (2017), IFI seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia telah memberikan



pinjaman dan bantuan keuangan kepada negara-negara di seluruh dunia, membantu mengatasi krisis keuangan dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, IFI juga berperan dalam pembentukan kebijakan ekonomi global melalui penyediaan saran dan panduan kepada negara-negara anggotanya, seperti yang diungkapkan oleh Randall D. Germain (2020), yang dapat membentuk arah globalisasi ekonomi.

IFI juga berperan dalam memfasilitasi aliran modal lintas batas melalui pengaturan sistem keuangan global. Menurut Barry Eichengreen (2017), IFI telah berperan dalam mengembangkan infrastruktur keuangan global, termasuk peraturan dan standar keuangan internasional, yang memungkinkan aliran modal yang lebih lancar di seluruh dunia. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing dan perdagangan internasional, mempercepat proses globalisasi ekonomi. Selain itu, IFI juga berperan dalam memitigasi risiko ekonomi global, seperti yang dijelaskan oleh Carmen M. Reinhart dan Kenneth S. Rogoff (2016), dengan memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada negara-negara yang mengalami krisis keuangan.

b. Tantangan Globalisasi Ekonomi di Era Modern

Di era modern yang dipenuhi dengan globalisasi ekonomi, muncul beragam tantangan yang perlu diatasi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara negara-negara maju dan berkembang menjadi salah satu isu utama yang harus dihadapi. Selain itu, perubahan teknologi yang cepat juga menciptakan ketidakpastian bagi banyak industri, memaksa adaptasi yang cepat dan inovasi yang berkelanjutan untuk tetap bersaing dalam pasar global yang semakin kompetitif.

1) Proteksionisme

Proteksionisme menjadi tantangan utama dalam konteks globalisasi ekonomi di era modern, menghadirkan berbagai dampak yang relevan. Seperti yang diungkapkan oleh Douglas A. Irwin (2017), proteksionisme merujuk pada kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dengan menerapkan tarif, kuota

impor, dan hambatan perdagangan lainnya. Hal ini dapat mengurangi akses pasar bagi produk-produk asing, menghambat aliran perdagangan internasional, dan mengurangi efisiensi dalam alokasi sumber daya global. Selain itu, proteksionisme juga dapat memicu perang perdagangan antarnegara, seperti yang dijelaskan oleh Chad P. Bown (2018), yang mengancam stabilitas ekonomi global dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan pasar keuangan.

Proteksionisme juga memiliki dampak negatif dalam mempengaruhi hubungan ekonomi antarnegara. Menurut Dani Rodrik (2018), proteksionisme dapat memicu konflik diplomatik dan politik antara negara-negara, mengganggu kerja sama internasional dan pembentukan perjanjian perdagangan bebas. Hal ini dapat menghambat integrasi ekonomi global dan mengurangi keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan internasional. Selain itu, proteksionisme juga dapat menciptakan spiral negatif dalam hubungan ekonomi internasional, di mana tindakan proteksionis satu negara dapat merangsang retaliasi dari negara-negara lain, memperburuk situasi perdagangan global secara keseluruhan.

## 2) Ketidaksetaraan Global

Ketidaksetaraan global menjadi tantangan serius dalam konteks globalisasi ekonomi di era modern, dengan dampak yang luas dan signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Piketty (2020), ketidaksetaraan ekonomi antarnegara dan antarindividu telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan sebagian besar keuntungan dari pertumbuhan ekonomi global mengalir ke tangan segelintir orang atau negara. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Selain itu, ketidaksetaraan global juga dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan dalam akses terhadap kesempatan ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh Branko Milanovic (2016), yang dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik antarkelompok.

Ketidaksetaraan global juga mempengaruhi proses globalisasi ekonomi dengan cara-cara yang kompleks. Menurut Joseph E. Stiglitz (2017), ketidaksetaraan ekonomi dapat menghambat proses integrasi ekonomi global dengan menciptakan ketegangan antara negara-negara kaya dan miskin, serta antara perusahaan multinasional dan masyarakat lokal di negara berkembang. Hal ini dapat menghambat upaya untuk membentuk kerjasama ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, ketidaksetaraan global juga dapat memperkuat siklus ketidaksetaraan itu sendiri, dengan orang-orang kaya semakin memperoleh kekayaan dan kekuatan ekonomi yang lebih besar, sementara orang-orang miskin semakin terpinggirkan, seperti yang dijelaskan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2019).

### 3) Ketidakpastian Politik

Ketidakpastian politik menjadi tantangan serius dalam konteks globalisasi ekonomi di era modern, dengan dampak yang dapat mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Nouriel Roubini (2018), ketidakpastian politik, termasuk konflik geopolitik, ketidakstabilan pemerintahan, dan ketidakpastian kebijakan, dapat menciptakan risiko tambahan bagi pelaku bisnis dan pasar keuangan di tingkat global. Hal ini dapat menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan fluktuasi pasar yang signifikan. Selain itu, ketidakpastian politik juga dapat mengganggu kerja sama ekonomi internasional dan mempersulit negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi, seperti yang dijelaskan oleh Anne O. Krueger (2017), yang dapat memperlambat proses integrasi ekonomi global.

Ketidakpastian politik dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik yang merembet ke dalam ekonomi. Menurut Francis Fukuyama (2018), ketidakpastian politik dapat memicu ketegangan sosial dan konflik internal dalam masyarakat, yang dapat mengganggu produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Hal ini dapat menghambat

pembangunan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian jangka panjang bagi prospek pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, ketidakpastian politik juga dapat mempengaruhi sentimen pasar dan investasi, menciptakan volatilitas yang tidak diinginkan dalam pasar keuangan global, seperti yang dijelaskan oleh Kenneth Rogoff (2017), yang dapat memperburuk dampak dari ketidakpastian politik itu sendiri.

#### 4) Isu Lingkungan

Isu lingkungan telah menjadi salah satu tantangan utama dalam konteks globalisasi ekonomi di era modern, memunculkan kekhawatiran tentang keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari aktivitas ekonomi global. Seperti yang diungkapkan oleh Jeffrey D. Sachs (2015), perubahan iklim, polusi lingkungan, dan degradasi sumber daya alam telah menjadi isu-isu kritis yang mempengaruhi ekonomi global. Hal ini menciptakan tekanan bagi perekonomian global untuk mengadopsi model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, Paul Collier (2018) menekankan bahwa degradasi lingkungan dapat mengancam stabilitas ekonomi dan sosial di tingkat global, dengan mengganggu rantai pasokan, meningkatkan risiko bencana alam, dan merusak kesehatan manusia.

Isu lingkungan juga dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan integrasi ekonomi global. Menurut Nicholas Stern (2016), perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dapat mengganggu produksi dan distribusi barang dan jasa di seluruh dunia, menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan dan meningkatkan biaya logistik. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan perdagangan internasional dan mengurangi keuntungan dari integrasi ekonomi global. Selain itu, isu lingkungan juga memperkuat ketidaksetaraan ekonomi antarnegara, seperti yang dijelaskan oleh Jeffrey D. Sachs (2017), dengan negara-negara berkembang seringkali menjadi korban utama dari dampak negatif perubahan iklim dan polusi lingkungan, sementara negara-negara maju memiliki

sumber daya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan lingkungan.

c. Tantangan dalam Mengelola Globalisasi Ekonomi

Mengelola globalisasi ekonomi adalah tugas yang kompleks di era modern ini, dengan berbagai tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan pertimbangan sosial dan lingkungan, mengingat dampak yang luas dari aktivitas ekonomi global terhadap masyarakat dan planet kita. Selain itu, meningkatnya interkoneksi antara negara-negara dan pasar-pasar membuat pentingnya koordinasi kebijakan antar-negara untuk mengatasi isu-isu seperti fluktuasi pasar dan krisis keuangan.

1) Koordinasi Kebijakan

Koordinasi kebijakan merupakan tantangan krusial dalam mengelola globalisasi ekonomi, mengingat kompleksitas hubungan antarnegara dan dampak lintas batas dari kebijakan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Joseph E. Stiglitz (2018), globalisasi ekonomi memerlukan koordinasi kebijakan antarnegara untuk mengelola tantangan seperti ketidakstabilan pasar keuangan, perdagangan yang tidak adil, dan perubahan iklim. Namun, koordinasi tersebut seringkali sulit dicapai karena perbedaan kepentingan dan prioritas di antara negara-negara, seperti yang dijelaskan oleh Barry Eichengreen (2017), yang dapat menghambat kemajuan dalam mencapai kesepakatan multilateral yang efektif.

Koordinasi kebijakan juga merupakan tantangan dalam konteks penyelesaian krisis ekonomi global. Menurut Olivier Blanchard (2019), dalam menghadapi krisis ekonomi yang meluas secara global, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antarnegara dapat menjadi kunci untuk meredakan ketidakstabilan dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kesulitan dalam mencapai kesepakatan koordinasi yang kuat dan cepat sering kali menyebabkan penundaan dalam respons terhadap krisis, memperburuk dampak ekonomi negatif yang dialami oleh banyak negara. Selain itu, koordinasi kebijakan juga penting dalam

mengatasi tantangan global seperti ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan, seperti yang ditekankan oleh Jeffrey D. Sachs (2015), yang memerlukan tindakan bersama dari negara-negara dan lembaga internasional untuk mengembangkan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## 2) Peningkatan Kerjasama Regional

Peningkatan kerjasama regional menjadi tantangan penting dalam mengelola globalisasi ekonomi, karena dapat memengaruhi dinamika perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi di tingkat global. Seperti yang diungkapkan oleh Amitav Acharya (2017), kerjasama regional memungkinkan negara-negara dalam suatu wilayah untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ekonomi bersama, seperti pembentukan pasar tunggal, peningkatan integrasi infrastruktur, dan pembentukan blok perdagangan. Namun, tantangan dalam meningkatkan kerjasama regional termasuk perbedaan kepentingan dan prioritas di antara negara-negara anggota, serta ketidakmampuan untuk mencapai konsensus yang efektif. Peningkatan kerjasama regional juga dapat memengaruhi dinamika kekuatan dan pengaruh di tingkat global. Menurut Richard Baldwin (2016), pembentukan blok perdagangan regional seperti Uni Eropa dan Masyarakat Ekonomi ASEAN telah menciptakan pusat kekuatan ekonomi yang dapat bersaing dengan kekuatan ekonomi global lainnya. Hal ini menciptakan tantangan bagi negara-negara di luar wilayah tersebut untuk menjaga akses pasar dan memastikan keuntungan ekonomi yang adil. Selain itu, kerjasama regional juga dapat menciptakan ketegangan geopolitik, seperti yang dijelaskan oleh Christopher M. Dent (2018), karena persaingan kepentingan antarnegara dalam suatu wilayah yang lebih terintegrasi ekonominya.

## 3) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi tantangan krusial dalam mengelola globalisasi ekonomi, karena melibatkan aspek keterlibatan, inklusi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Seperti yang

diungkapkan oleh Amartya Sen (2016), pemberdayaan masyarakat mengacu pada upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan keadilan sosial. Namun, tantangan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat meliputi ketidaksetaraan akses, pembatasan politik, dan ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat juga memerlukan peran aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi partisipasi masyarakat. Menurut Jeffrey D. Sachs (2019), pemberdayaan masyarakat memerlukan kebijakan publik yang mengarah pada pembangunan infrastruktur, akses layanan dasar, dan kesempatan ekonomi yang merata. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti reformasi kebijakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembangunan pasar kerja yang inklusif.

## **2. SOSIAL**

Di era modern yang diwarnai oleh kemajuan teknologi dan konektivitas global yang semakin meningkat, dimensi globalisasi sosial menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Globalisasi sosial merangkul berbagai proses yang memfasilitasi pertukaran budaya, nilai, dan norma antara individu dan masyarakat di seluruh dunia. Dengan munculnya internet dan media sosial, interaksi antarindividu tidak lagi terbatas oleh batas geografis, memungkinkan terciptanya jaringan sosial global yang melintasi negara dan benua.

Peningkatan mobilitas manusia dan arus migrasi yang semakin intensif juga turut memperkuat dimensi globalisasi sosial. Individu yang berpindah tempat membawa serta identitas, tradisi, dan budaya, yang kemudian terintegrasi dalam masyarakat yang ditempatinya. Hal ini menciptakan kekayaan budaya yang beragam namun juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi yang kuat. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap dimensi globalisasi sosial menjadi penting dalam

menghadapi dinamika kompleks dalam masyarakat global yang semakin terhubung.

a. Faktor-faktor yang Mendorong Globalisasi Sosial

Globalisasi sosial merupakan fenomena yang semakin mempengaruhi kehidupan manusia di era modern ini. Faktor-faktor yang mendorong globalisasi sosial meliputi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan interaksi antarindividu dari berbagai belahan dunia tanpa batasan fisik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi global dan mobilitas manusia juga turut mendukung globalisasi sosial dengan memfasilitasi pertukaran budaya, nilai, dan ide di antara masyarakat yang berbeda.

1) Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) berperan krusial dalam mendorong globalisasi sosial dengan menghubungkan individu dari berbagai belahan dunia. Menurut Castells (2015), TI telah menciptakan jaringan global yang menghubungkan individu, kelompok, dan masyarakat secara cepat dan efisien, mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam komunikasi dan interaksi sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Kellner (2018) yang menekankan bahwa TI, terutama internet, memfasilitasi pertukaran ide, informasi, dan budaya secara global, mempercepat terbentuknya masyarakat global yang saling terkait.

TI juga menjadi faktor kunci dalam mengubah struktur ekonomi global dan menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Friedman (2016), TI telah menciptakan "datar" dunia, di mana individu dan perusahaan dari berbagai negara dapat berkompetisi dan berkolaborasi secara langsung, mengurangi hambatan untuk masuk ke pasar global. Hal ini juga didukung oleh Rifkin (2017) yang berpendapat bahwa TI memungkinkan munculnya ekonomi berbagi (*sharing economy*) yang menghubungkan individu untuk saling berbagi barang, jasa, dan pengetahuan.

2) Transportasi

Transportasi memegang peranan kunci dalam mendorong globalisasi sosial dengan memfasilitasi pergerakan manusia, barang, dan ide di seluruh dunia. Menurut Harvey



(2018), transportasi modern telah mengatasi hambatan geografis dan menghubungkan berbagai wilayah secara efisien, mempercepat pertukaran budaya dan informasi antar masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Cohen (2021) yang menekankan bahwa transportasi yang cepat dan efisien telah membuka pintu bagi migrasi global dan interaksi lintas-budaya yang intens.

Perkembangan infrastruktur transportasi juga telah meningkatkan integrasi ekonomi antarnegara. Menurut Ghemawat (2019), transportasi yang lebih efisien dan terjangkau telah memperluas jangkauan pasar global, mendorong perdagangan internasional, dan mempercepat aliran modal serta investasi lintas batas. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh Rietveld (2017) yang membahas bahwa transportasi yang terintegrasi secara global telah menciptakan jaringan produksi dan distribusi yang kompleks, menghubungkan produsen dan konsumen di seluruh dunia.

### 3) Perekonomian Global

Perekonomian global memegang peran sentral dalam mendorong globalisasi sosial dengan menciptakan ketergantungan antarnegara dan mengubah pola interaksi sosial di seluruh dunia. Menurut Stiglitz (2016), integrasi ekonomi global telah meningkatkan aliran modal, perdagangan, dan investasi lintas batas, menciptakan saling ketergantungan yang lebih dalam antara negara-negara di berbagai benua. Hal ini juga ditegaskan oleh Rodrik (2018) yang menekankan bahwa perekonomian global memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan lintas batas, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di banyak negara.

Perkembangan teknologi dan sistem keuangan global telah memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih dalam di tingkat global. Menurut Ostry *et al.* (2020), pasar keuangan global yang semakin terintegrasi memungkinkan aliran modal yang lebih lancar dan akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Pemikiran ini juga didukung oleh Piketty (2017) yang membahas bahwa

pertumbuhan ekonomi global telah menciptakan kesempatan bagi masyarakat yang lebih luas untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan taraf hidup, terutama di negara-negara yang sebelumnya tertinggal.

b. Dampak Positif Globalisasi Sosial

Globalisasi sosial telah membawa dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia di era kontemporer. Melalui pertukaran budaya dan nilai-nilai, globalisasi sosial telah memperkaya keragaman budaya di seluruh dunia, memungkinkan individu untuk memahami dan menghargai perspektif yang berbeda. Selain itu, globalisasi sosial juga telah memfasilitasi kolaborasi lintas batas dalam bidang pendidikan, teknologi, dan inovasi, meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan global secara keseluruhan.

1) Peningkatan Kesadaran Multikultural

Peningkatan kesadaran multikultural menjadi salah satu dampak positif yang signifikan dari globalisasi sosial, memperkaya pengalaman dan pemahaman lintas-budaya. Menurut Sen (2017), globalisasi telah membuka pintu bagi interaksi antarbudaya yang lebih intens, memperluas wawasan individu tentang keberagaman manusia dan budaya di seluruh dunia. Hal ini juga ditegaskan oleh Kymlicka (2020) yang menekankan bahwa globalisasi telah mempercepat pertukaran ide, nilai, dan tradisi budaya, mendorong individu untuk lebih terbuka dan menerima perbedaan.

Peningkatan kesadaran multikultural juga telah memicu upaya kolaboratif dalam mengatasi tantangan global. Menurut Appiah (2018), dalam era globalisasi, masyarakat mulai menyadari bahwa masalah seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik bersenjata tidak dapat diatasi secara efektif tanpa kerjasama lintas-budaya yang solid. Pemikiran ini juga didukung oleh Huntington (2019) yang membahas bahwa peningkatan kesadaran multikultural telah memperkuat gagasan bahwa perdamaian dan kemajuan global membutuhkan kerja sama antara berbagai kelompok dan budaya di seluruh dunia.

## 2) Perluasan Wawasan dan Pengetahuan

Perluasan wawasan dan pengetahuan menjadi dampak positif yang penting dari globalisasi sosial, membuka pintu bagi individu untuk mengakses informasi dan budaya dari seluruh dunia. Menurut Friedman (2016), kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan individu untuk terhubung dengan sumber daya pengetahuan global, seperti internet, e-book, dan platform pembelajaran online, yang mengubah cara kita memperoleh dan membagikan informasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Castells (2015) yang menekankan bahwa globalisasi telah menciptakan jaringan informasi global yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan lintas batas dengan cepat dan efisien.

Globalisasi juga telah memperluas wawasan budaya individu melalui pertukaran budaya yang lebih intens. Menurut Robertson (2020), globalisasi sosial telah menghasilkan fenomena "budaya global" di mana elemen-elemen budaya dari berbagai negara dipertukarkan dan diserap oleh masyarakat di seluruh dunia, memperkaya pengalaman budaya individu secara signifikan. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh Appadurai (2017) yang membahas bahwa globalisasi telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses berbagai ekspresi budaya, seperti film, musik, dan makanan, dari berbagai belahan dunia.

## 3) Peningkatan Solidaritas Global

Peningkatan solidaritas global menjadi salah satu dampak positif yang penting dari globalisasi sosial, memperkuat kesadaran akan keterkaitan antara individu dan komunitas di seluruh dunia. Menurut Sen (2017), globalisasi telah memperluas wawasan individu tentang tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan, memicu respons kolektif dan upaya kolaboratif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Kaldor (2020) yang menekankan bahwa solidaritas global telah mendorong pertumbuhan gerakan sosial transnasional yang berjuang untuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian dunia.

Globalisasi sosial juga telah menghasilkan keterhubungan emosional yang lebih dalam antara individu dari berbagai negara. Menurut Held (2019), pertukaran budaya, pengalaman, dan cerita melalui media sosial dan jaringan komunikasi global telah memperkuat rasa empati dan persaudaraan di antara masyarakat global, meningkatkan solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh Kymlicka (2021) yang membahas bahwa solidaritas global semakin diperkuat melalui respons terhadap krisis kemanusiaan, seperti bencana alam dan konflik bersenjata, yang memicu tanggapan cepat dan dukungan dari seluruh dunia.

c. Dampak Negatif Globalisasi Sosial

Meskipun membawa banyak manfaat, globalisasi sosial juga membawa sejumlah dampak negatif yang patut diperhatikan. Salah satunya adalah homogenisasi budaya, di mana dominasi budaya Barat sering kali mereduksi keragaman budaya lokal di berbagai belahan dunia. Selain itu, globalisasi sosial juga memperkuat kesenjangan sosial antara negara-negara maju dan berkembang, dengan akses terbatas terhadap teknologi dan kesempatan ekonomi bagi banyak komunitas di negara berkembang.

1) Homogenisasi Budaya

Homogenisasi budaya menjadi salah satu dampak negatif yang signifikan dari globalisasi sosial, mengancam keragaman budaya dan identitas lokal. Menurut Hannerz (2017), globalisasi telah menciptakan tren homogenisasi budaya di mana elemen-elemen budaya dari berbagai negara cenderung menjadi seragam, mengurangi keunikan dan kekayaan budaya di seluruh dunia. Hal ini sejalan dengan pandangan Appadurai (2018) yang membahas bahwa arus globalisasi, seperti media massa dan perusahaan multinasional, sering kali menghasilkan budaya populer global yang mendominasi pasar dan meredam ekspresi budaya lokal.

Homogenisasi budaya juga dapat mengancam keberagaman bahasa dan tradisi lokal. Menurut Ritzer (2020), dominasi budaya global seperti bahasa Inggris dan gaya hidup

konsumtif Barat sering kali menggusur bahasa-bahasa lokal dan tradisi-tradisi khas, menyebabkan penurunan dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya yang unik. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh Waters (2019) yang menekankan bahwa homogenisasi budaya dapat menghasilkan keseragaman dalam pola perilaku dan nilai-nilai, mereduksi keragaman sosial dan ekspresi individu.

## 2) Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial menjadi salah satu dampak negatif yang serius dari globalisasi sosial, memperdalam divisi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Piketty (2017), globalisasi ekonomi telah menyebabkan peningkatan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan, dengan sebagian kecil dari populasi yang memperoleh manfaat besar sementara sebagian besar terpinggirkan secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Sassen (2018) yang membahas bahwa globalisasi telah menciptakan "pekerjaan-pekerjaan tanpa batas" yang sering kali tidak stabil dan tidak berpengamanan, meningkatkan risiko kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Globalisasi sosial juga telah memperdalam kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Menurut Stiglitz (2019), dalam era globalisasi, individu yang kurang mampu sering kali tidak memiliki akses yang sama dengan individu yang lebih kaya terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan pendidikan yang bermutu, yang menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin besar. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh Wilkinson dan Pickett (2021) yang menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang diperdalam oleh globalisasi dapat mengakibatkan konsekuensi negatif bagi kesejahteraan dan stabilitas sosial.

## 3) Konflik Identitas

Konflik identitas menjadi salah satu dampak negatif yang signifikan dari globalisasi sosial, menghasilkan ketegangan antara identitas lokal dan global. Menurut Bauman (2017), globalisasi telah mengubah cara individu mengidentifikasi

diri sendiri, memicu perasaan ketidakpastian dan kehilangan identitas di tengah arus budaya global yang mendominasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Castells (2020) yang menekankan bahwa globalisasi sosial sering kali memicu konflik antara identitas lokal yang dianggap terancam oleh pengaruh budaya global yang dominan.

Konflik identitas juga dapat meningkat karena perbedaan nilai, keyakinan, dan pandangan dunia antara kelompok-kelompok dalam masyarakat global. Menurut Huntington (2018), globalisasi telah memperkuat kesadaran identitas kelompok, baik berdasarkan agama, etnis, atau budaya, yang dapat menyebabkan ketegangan antara kelompok-kelompok dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh Smith (2019) yang membahas bahwa identitas kultural dan nasional sering kali dianggap sebagai pertahanan terhadap homogenisasi budaya global yang dianggap mengancam.

d. Tantangan dan Upaya Menghadapi Globalisasi Sosial

Menghadapi fenomena globalisasi sosial, masyarakat di seluruh dunia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah tantangan mempertahankan identitas budaya lokal di tengah arus homogenisasi budaya global. Selain itu, adanya ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan kesempatan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang juga menjadi hambatan yang perlu diatasi dalam upaya mencapai inklusi sosial yang lebih luas.

1) Penguatan Identitas Budaya Lokal

Penguatan identitas budaya lokal menjadi tantangan yang kompleks dalam menghadapi arus globalisasi sosial yang kuat. Menurut Appiah (2018), globalisasi telah menghasilkan tekanan besar terhadap identitas budaya lokal, dengan pengaruh budaya global yang dominan sering kali mengancam keberlangsungan dan keunikan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Castells (2015) yang membahas bahwa globalisasi sosial dapat menciptakan "budaya konsumerisme" yang meredam ekspresi budaya lokal dan mengarah pada homogenisasi

budaya yang merugikan keberagaman budaya di seluruh dunia.

Upaya untuk memperkuat identitas budaya lokal juga menjadi bagian penting dari respons terhadap globalisasi sosial. Menurut Vertovec (2021), masyarakat lokal sering kali merespons globalisasi dengan upaya untuk mempertahankan dan memperkuat identitas budaya sendiri, dengan meningkatnya minat dan partisipasi dalam budaya lokal dan tradisi. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh Bauman (2017) yang membahas bahwa dalam menghadapi arus budaya global yang dominan, masyarakat sering kali mencari kembali akar-akar budaya sendiri sebagai bentuk resistensi terhadap homogenisasi budaya global.

## 2) Peningkatan Kesadaran Global

Peningkatan kesadaran global menjadi tantangan yang kompleks dalam menghadapi dampak globalisasi sosial yang meluas. Menurut Sen (2017), globalisasi telah memperluas wawasan individu tentang masalah-masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan, memicu respons kolektif dan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Held (2019) yang membahas bahwa pertukaran budaya, pengalaman, dan cerita melalui media sosial dan jaringan komunikasi global telah memperkuat rasa empati dan persaudaraan di antara masyarakat global, meningkatkan kesadaran akan keterkaitan kita sebagai warga dunia.

Peningkatan kesadaran global juga menimbulkan tantangan dalam menghadapi kompleksitas masalah global yang semakin meningkat. Menurut Nussbaum (2018), ketika individu semakin sadar akan masalah-masalah global, sering kali sulit untuk menentukan tindakan yang efektif dan bertanggung jawab di tengah kelimpahan informasi dan opini yang beragam. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh Appadurai (2017) yang membahas bahwa globalisasi telah menciptakan ketidakpastian tentang solusi yang tepat untuk masalah-masalah global yang kompleks, memicu

kebingungan dan kecemasan di antara individu yang ingin berkontribusi dalam menghadapi tantangan global.

### 3) Regulasi yang Bijaksana

Regulasi yang bijaksana menjadi tantangan penting dalam menghadapi globalisasi sosial yang terus berkembang. Menurut Stiglitz (2019), globalisasi ekonomi telah menciptakan kebutuhan akan regulasi yang lebih efektif dan adil untuk mengatur pasar global yang kompleks dan rentan terhadap kecurangan dan ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rodrik (2018) yang membahas pentingnya regulasi yang cerdas dalam mengelola dampak globalisasi terhadap ketidaksetaraan dan stabilitas sosial. Tantangan dalam menghadapi globalisasi sosial melalui regulasi yang bijaksana tidaklah mudah. Menurut Nye (2018), mengembangkan regulasi yang efektif dalam era globalisasi memerlukan kerja sama lintas-batas antara negara-negara dan organisasi internasional, yang sering kali sulit diperoleh karena perbedaan kepentingan dan prioritas nasional. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh Giddens (2019) yang menekankan bahwa ketidakpastian politik dan ekonomi global sering kali menghambat kemampuan negara untuk mengembangkan regulasi yang efektif dan berkelanjutan.

## 3. POLITIK

Dimensi globalisasi politik memperlihatkan perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan, hubungan antarnegara, dan tata kelola politik di era kontemporer. Dengan terciptanya jaringan komunikasi dan transportasi global yang semakin canggih, batas-batas negara menjadi semakin transparan, memungkinkan pengaruh politik untuk melintasi wilayah secara lebih cepat dan efektif. Proses ini membuka pintu bagi kerjasama dan konflik politik yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai belahan dunia.

Dimensi globalisasi politik juga mencakup penyebaran ideologi, nilai politik, dan gerakan sosial secara lintas-batas. Melalui media massa dan jejaring sosial, gagasan politik dapat tersebar dengan cepat di antara masyarakat global, memengaruhi opini publik serta memicu respons politik dari berbagai negara. Hal ini menimbulkan



tantangan baru dalam upaya memahami dinamika politik global serta menanggapi isu-isu yang timbul dalam skala internasional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap dimensi globalisasi politik menjadi krusial dalam menyikapi perubahan-perubahan kompleks dalam arena politik global.

a. Faktor-faktor yang Mendorong Globalisasi Politik

Globalisasi politik merupakan fenomena yang semakin mendominasi panggung dunia pada era modern ini. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung dan saling ketergantungan, negara-negara tidak lagi dapat mengisolasi diri secara politik. Perubahan teknologi, ekonomi, dan komunikasi telah mendorong globalisasi politik untuk menjadi semakin relevan dan penting bagi stabilitas global. Di tengah dinamika ini, negara-negara diharapkan untuk berkolaborasi secara lebih intim dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, dan krisis kemanusiaan.

1) Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong globalisasi politik di era modern. Menurut Rugman dan Collinson (2012), globalisasi politik dipengaruhi oleh interaksi antara negara-negara dalam perdagangan internasional. Hal ini terjadi karena perdagangan membuka jalan bagi pertukaran ide, nilai, dan budaya antarbangsa. Selain itu, teori interdependensi kompleks menekankan bahwa perdagangan internasional menciptakan ketergantungan di antara negara-negara, memaksa untuk bekerja sama dalam berbagai isu politik global (Keohane dan Nye, 2015).

Perkembangan teknologi dan transportasi yang pesat juga telah mempercepat globalisasi politik melalui perdagangan internasional. Menurut Friedman (2005), fenomena globalisasi politik semakin meningkat karena teknologi memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antar negara. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan politik yang lebih cepat dan responsif terhadap isu-isu global yang muncul, seperti perubahan iklim dan krisis kemanusiaan.

## 2) Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah menjadi pendorong utama bagi globalisasi politik di era kontemporer. Menurut Castells (2011), teknologi informasi, khususnya internet, telah memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi antarindividu, kelompok, dan negara secara instan di seluruh dunia. Dengan adanya internet, individu dapat dengan mudah mengakses berita dan informasi politik dari berbagai belahan dunia, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran politik global.

Media sosial juga berperan penting dalam mempercepat globalisasi politik melalui teknologi informasi. Menurut Jenkins (2013), media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, mengorganisir aksi politik, dan menyebarkan ideologi politik secara luas. Hal ini telah mengubah cara orang berinteraksi dengan politik, memungkinkan partisipasi politik yang lebih aktif dan inklusif di tingkat global.

## 3) Peningkatan Mobilitas

Peningkatan mobilitas manusia dan barang juga menjadi faktor penting dalam mendorong globalisasi politik. Menurut Bauman (2016), fenomena mobilitas yang semakin meningkat telah mengubah dinamika politik di berbagai negara, karena meningkatnya interaksi antarindividu dari berbagai latar belakang budaya dan politik. Hal ini dapat memicu pertukaran ideologi dan nilai politik, serta mempercepat proses integrasi politik di tingkat global. Dalam konteks ekonomi global, mobilitas barang juga menjadi kunci dalam menggerakkan perdagangan internasional dan meningkatkan ketergantungan antarnegara.

Fenomena migrasi yang semakin meningkat juga berperan penting dalam mendorong globalisasi politik. Menurut Castles *et al.* (2014), migrasi manusia dari satu negara ke negara lain membawa dampak yang signifikan pada dinamika politik di kedua negara tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan imigrasi, identitas nasional, dan

politik sosial di negara-negara penerima migran. Selain itu, migrasi juga dapat memicu ketegangan politik antarnegara, terutama dalam hal keamanan dan hak asasi manusia.

#### 4) Organisasi Internasional

Organisasi internasional berperan yang signifikan dalam mendorong globalisasi politik di era modern. Menurut Weiss (2018), organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Uni Eropa bertindak sebagai forum bagi negara-negara untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam menangani isu-isu politik yang melintasi batas negara. Melalui kerjasama ini, organisasi internasional menciptakan kerangka kerja yang mempromosikan integrasi politik dan koordinasi kebijakan di tingkat global.

Organisasi internasional juga berperan dalam memperkuat aturan dan norma-norma politik yang bersifat universal. Menurut Dunne *et al.* (2018), organisasi seperti PBB memiliki peran dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan di seluruh dunia. Dengan demikian, organisasi internasional membentuk landasan bagi tatanan politik global yang lebih inklusif dan berdasarkan nilai-nilai universal.

#### b. Dampak Globalisasi Politik

Dampak globalisasi politik terasa kuat dalam tatanan dunia saat ini, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara luas. Melalui integrasi politik antarnegara, globalisasi telah membuka pintu bagi pertukaran ide dan nilai-nilai politik yang beragam. Hal ini tidak hanya mengubah dinamika kekuasaan di tingkat internasional, tetapi juga memengaruhi kebijakan domestik dalam banyak negara. Selain itu, globalisasi politik juga menciptakan tantangan baru dalam menjaga kedaulatan negara dan identitas nasional di tengah arus informasi yang tidak terbatas.

##### 1) Pengaruh Kebijakan Luar Negeri

Pengaruh kebijakan luar negeri memiliki dampak yang signifikan dalam konteks globalisasi politik. Menurut Walt (2016), kebijakan luar negeri sebuah negara dapat

mencerminkan upaya untuk beradaptasi dengan dinamika politik global yang terus berubah, seperti pergeseran kekuatan, isu-isu transnasional, dan tuntutan global. Dengan demikian, kebijakan luar negeri menjadi salah satu instrumen penting bagi negara-negara dalam menyesuaikan diri dengan tatanan politik global yang semakin terintegrasi. Kebijakan luar negeri yang progresif dapat membantu mempromosikan nilai-nilai politik yang universal di tingkat global. Menurut Huntington (2015), negara-negara dapat menggunakan kebijakan luar negeri untuk memperjuangkan prinsip-prinsip seperti demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan di panggung internasional. Melalui diplomasi dan kerjasama internasional, negara-negara dapat memengaruhi dan membentuk arah globalisasi politik sesuai dengan visi dan kepentingan.

## 2) Munculnya Aktor Non-Negara

Munculnya aktor non-negara telah menjadi salah satu dampak signifikan dari globalisasi politik. Menurut Kaldor (2017), globalisasi telah membuka ruang yang lebih besar bagi organisasi non-pemerintah (ONG), kelompok advokasi, dan gerakan sosial untuk berpartisipasi dalam arena politik internasional. Hal ini terjadi karena teknologi informasi dan media sosial memungkinkan aktor non-negara untuk mengorganisir dan menyampaikan pesannya secara efektif kepada audiens global. Dengan demikian, aktor non-negara telah menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam membentuk agenda politik global dan mempengaruhi kebijakan negara-negara.

Munculnya aktor non-negara juga telah mengubah dinamika diplomasi internasional. Menurut Cooper (2018), ONG dan organisasi masyarakat sipil kini memiliki akses yang lebih besar ke forum-forum internasional dan proses pengambilan keputusan politik, berperan dalam mendesak pemerintah untuk bertindak dalam isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Dengan demikian, aktor non-negara telah berperan yang semakin

penting dalam menciptakan respons politik terhadap tantangan global.

3) Konflik Transnasional

Konflik transnasional telah menjadi salah satu dampak yang signifikan dari globalisasi politik. Menurut Jackson (2016), fenomena globalisasi telah mengubah dinamika konflik, dengan konflik tidak lagi terbatas pada satu negara atau wilayah tertentu, tetapi melintasi batas-batas nasional dan mempengaruhi lebih dari satu negara. Hal ini terjadi karena globalisasi memungkinkan interaksi yang lebih intens antara individu, kelompok, dan entitas politik dari berbagai belahan dunia, yang dapat memicu konflik yang menyebar secara transnasional.

Konflik transnasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang melintasi batas negara. Menurut Drezner (2018), fenomena globalisasi politik telah menciptakan ketidakstabilan politik dan ekonomi di berbagai negara, yang dapat memicu konflik internal yang kemudian berpotensi menyebar ke negara-negara tetangga atau bahkan ke tingkat regional dan global. Dengan demikian, konflik transnasional sering kali memiliki akar yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dan faktor dari skala yang berbeda.

4) Penyebaran Nilai Politik

Penyebaran nilai politik telah menjadi dampak yang signifikan dari globalisasi politik. Menurut Huntington (2015), globalisasi telah memungkinkan nilai-nilai politik tertentu menyebar dengan cepat di seluruh dunia melalui media massa dan interaksi lintas batas. Hal ini dapat mencakup nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan individu, yang menjadi lebih terkenal dan diadopsi oleh masyarakat di berbagai negara. Dengan demikian, globalisasi politik memfasilitasi proses homogenisasi nilai-nilai politik di tingkat global, meskipun masih terjadi perbedaan dalam cara nilai-nilai tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan di berbagai konteks nasional.

Penyebaran nilai politik juga dapat memicu resistensi dan konflik di tingkat global. Menurut Keohane dan Nye (2017), adopsi nilai-nilai politik tertentu oleh negara-negara atau kelompok dapat menjadi sumber ketegangan antarnegara dan konflik politik. Contohnya adalah ketegangan antara negara-negara Barat yang mendorong demokrasi dan hak asasi manusia dengan negara-negara yang menganut sistem politik otoriter atau berbeda nilai-nilai politik. Oleh karena itu, penyebaran nilai politik juga dapat menjadi pemicu bagi pergeseran kekuatan dan konflik politik di tingkat global.

c. Tantangan dan Kontroversi

Tantangan dan kontroversi seputar globalisasi politik telah menjadi fokus utama dalam diskusi tentang perkembangan dunia modern. Meskipun membawa harapan akan integrasi global yang lebih besar, globalisasi politik juga membawa tantangan signifikan dalam hal menjaga kedaulatan nasional dan otonomi politik. Sementara itu, kontroversi muncul ketika beberapa pihak merasa bahwa globalisasi politik dapat mengancam identitas budaya dan nilai-nilai tradisional suatu bangsa, menciptakan ketegangan antara aspirasi global dan kepentingan lokal.

1) Kesenjangan Global

Kesenjangan global menjadi tantangan dan kontroversi dalam konteks globalisasi politik. Menurut Stiglitz (2019), globalisasi telah memperdalam kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang, serta antara kelompok-kelompok sosial di dalam negara-negara tersebut. Hal ini terjadi karena globalisasi ekonomi sering kali memberikan keuntungan yang tidak merata, dengan sebagian kecil dari populasi yang memperoleh manfaat yang besar sementara banyak yang lain tertinggal dalam kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dengan demikian, kesenjangan global menjadi sumber ketegangan sosial, politik, dan ekonomi di tingkat global.

Kesenjangan global juga menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuatan politik dan pengaruh di tingkat global. Menurut Rodrik (2018), negara-negara dan

kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam forum-forum politik internasional, seperti G20 atau Dewan Keamanan PBB. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan politik global, di mana kepentingan negara-negara kuat mungkin mendominasi atas kepentingan negara-negara yang lebih lemah, serta mengurangi legitimasi dan keadilan dalam sistem politik global.

## 2) Souverenitas Negara

Sovereignitas negara telah menjadi titik kontroversi dalam konteks globalisasi politik. Menurut Hurrell (2018), globalisasi politik telah menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara-negara masih dapat mempertahankan kedaulatan dan kontrol atas keputusan politik dan ekonomi sendiri. Hal ini terutama terlihat dalam fenomena seperti integrasi ekonomi regional dan lembaga-lembaga internasional yang semakin mempengaruhi kebijakan nasional. Dengan demikian, sovereignitas negara menjadi tantangan dalam upaya memahami dinamika politik global. Adanya interaksi yang semakin intens antara negara-negara dan entitas politik non-negara telah mempertanyakan konsep tradisional sovereignitas negara. Menurut Krasner (2018), fenomena seperti integrasi ekonomi, perdagangan internasional, dan interdependensi politik telah menggerus kontrol langsung negara atas wilayah dan kebijakan. Hal ini memunculkan debat tentang sejauh mana negara-negara masih memiliki otoritas mutlak atas urusan dalam wilayahnya sendiri, terutama dalam konteks globalisasi politik yang semakin terintegrasi.

## 3) Perlindungan Lingkungan

Perlindungan lingkungan menjadi tantangan dan kontroversi dalam konteks globalisasi politik. Menurut Gupta (2016), globalisasi telah meningkatkan interkoneksi antara negara-negara dan memperlihatkan dampak lingkungan yang melintasi batas negara. Hal ini menciptakan dilema antara kepentingan ekonomi dan lingkungan, di mana upaya untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sering kali bertentangan dengan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, globalisasi politik memunculkan pertanyaan tentang bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan lingkungan yang bersifat transnasional.

Ketidaksetaraan dalam tanggapan terhadap isu lingkungan juga menjadi masalah dalam konteks globalisasi politik. Menurut Lidskog *et al.* (2017), negara-negara maju memiliki lebih banyak sumber daya untuk melindungi lingkungan sendiri, sementara negara-negara berkembang sering kali menghadapi tekanan untuk mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menciptakan ketidakadilan lingkungan antara negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang berbeda, serta memperkuat ketimpangan dalam akses terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.

d. Upaya Mengatasi Tantangan Globalisasi Politik

Upaya untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat globalisasi politik menjadi agenda penting dalam pembahasan kebijakan internasional saat ini. Negara-negara di seluruh dunia mulai merespons dengan berbagai inisiatif, mulai dari pembentukan aliansi regional hingga kerja sama lintas batas dalam menangani masalah berskala global. Selain itu, organisasi internasional dan forum multilateral juga berperan dalam menciptakan platform bagi negara-negara untuk berdiskusi dan bekerja sama mengatasi tantangan yang timbul akibat globalisasi politik.

1) Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional menjadi salah satu upaya utama dalam mengatasi tantangan globalisasi politik. Menurut Keohane (2017), dalam menghadapi isu-isu seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan kemiskinan global, kerjasama internasional memungkinkan negara-negara untuk bekerja bersama dalam mencari solusi yang efektif. Hal ini mencakup pertukaran informasi, sumber daya, teknologi, dan kebijakan untuk mengatasi tantangan yang melintasi batas negara. Dengan demikian, kerjasama internasional menjadi sarana penting dalam



mempromosikan stabilitas politik dan keamanan di tingkat global.

Kerjasama internasional juga memfasilitasi pembentukan norma dan aturan-aturan politik yang bersifat universal. Menurut Ruggie (2016), melalui lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), negara-negara dapat menciptakan kerangka kerja yang mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan di seluruh dunia. Dengan demikian, kerjasama internasional tidak hanya membantu menangani isu-isu global, tetapi juga memperkuat tatanan politik global yang lebih inklusif dan berdasarkan nilai-nilai universal.

## 2) Penguatan Demokrasi

Penguatan demokrasi menjadi salah satu upaya utama dalam mengatasi tantangan globalisasi politik. Menurut Diamond (2015), dalam konteks globalisasi, demokrasi menjadi penting karena mendorong partisipasi politik yang lebih luas, pemenuhan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Melalui proses demokratisasi, negara-negara dapat memperkuat legitimasi di tingkat internasional dan meningkatkan stabilitas politik. Dengan demikian, penguatan demokrasi di berbagai belahan dunia menjadi sarana penting dalam mengatasi tantangan globalisasi politik.

Demokrasi juga berperan dalam memperjuangkan nilai-nilai politik universal di tingkat global. Menurut Huntington (2016), demokrasi tidak hanya merupakan sistem politik internal suatu negara, tetapi juga merupakan bagian dari norma dan prinsip-prinsip yang diadopsi oleh masyarakat internasional. Dengan demikian, penguatan demokrasi di satu negara dapat mempengaruhi dinamika politik di negara lain, serta membentuk tatanan politik global yang lebih inklusif dan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis.

## 3) Pendidikan dan Kesadaran Global

Pendidikan dan kesadaran global menjadi upaya yang penting dalam mengatasi tantangan globalisasi politik.

Menurut Appiah (2018), pendidikan yang mencakup pemahaman tentang dinamika politik global, hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan isu-isu lingkungan dapat membantu individu menjadi warga dunia yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kesadaran global, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam arena politik global. Kesadaran global juga berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku politik yang progresif di tingkat individual dan kolektif. Menurut Sen (2017), kesadaran tentang isu-isu global seperti ketidaksetaraan, kemiskinan, dan perubahan iklim dapat memotivasi individu dan kelompok untuk berperan aktif dalam memperjuangkan perubahan positif. Hal ini menciptakan tekanan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan tindakan kolektif dalam mengatasi tantangan globalisasi politik.

## **C. Teori-Teori Globalisasi**

Globalisasi adalah fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik di seluruh dunia. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan dinamika dan dampak dari globalisasi ini. Berikut adalah beberapa teori utama tentang globalisasi:

### **1. Teori Konvergensi**

Teori konvergensi adalah salah satu teori globalisasi yang membahas proses homogenisasi atau penyesuaian perilaku, budaya, dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Menurut Roland Robertson (2015), konvergensi terjadi karena adanya interaksi intensif antara masyarakat yang memungkinkan pertukaran nilai, norma, dan ide-ide yang pada akhirnya mengarah pada kesamaan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi, teori konvergensi juga mencerminkan upaya negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dengan mengadopsi model pembangunan yang sama dengan negara maju (Bretschger & Steger, 2020). Anthony Giddens (2018) mengemukakan bahwa konsep konvergensi mungkin

terlalu simplistik karena tidak memperhitungkan ketimpangan yang tetap ada dalam globalisasi, terutama dalam hal distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Dalam realitasnya, globalisasi juga sering kali memperkuat kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin (Kellner, 2016). Oleh karena itu, konvergensi mungkin lebih merupakan idealisasi daripada refleksi yang tepat dari kompleksitas globalisasi kontemporer.

## **2. Teori Interdependensi**

Teori interdependensi adalah konsep dalam studi globalisasi yang membahas keterkaitan erat antara berbagai elemen dalam sistem global. Menurut Joseph Nye (2017), interdependensi mencerminkan hubungan saling ketergantungan antara negara-negara dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan, di mana tindakan satu negara dapat memiliki dampak signifikan pada negara lainnya. Dalam konteks ekonomi global, teori ini menekankan pentingnya kerjasama dan pertukaran dalam mencapai kemajuan ekonomi bersama (Baylis, Smith, & Owens, 2017). Namun, teori interdependensi juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem global. Beberapa ahli, seperti Immanuel Wallerstein (2021), menganggap bahwa interdependensi sering kali menciptakan hubungan yang tidak adil, di mana negara-negara kuat dapat memanfaatkan kelemahan negara-negara lemah untuk keuntungan sendiri. Kritik seperti ini membahas pentingnya untuk memperhatikan asimetri kekuasaan dalam analisis interdependensi global (Keohane & Nye, 2018).

## **3. Teori Difusi Budaya**

Teori difusi budaya mengacu pada proses penyebaran ide, nilai, dan praktik budaya dari satu kelompok atau masyarakat ke masyarakat lainnya melalui interaksi dan pertukaran. Menurut Clifford Geertz (2019), difusi budaya merupakan salah satu aspek penting dari globalisasi yang memengaruhi cara masyarakat merespons dan berinteraksi dengan budaya-budaya lain di era modern. Konsep ini membahas dinamika kompleks antara keberagaman budaya lokal dan pengaruh global yang semakin merata (Appadurai, 2016). Namun, teori difusi budaya juga menimbulkan debat tentang homogenisasi versus pelestarian keberagaman budaya. Beberapa ahli, seperti Arjun

Appadurai (2016), menekankan bahwa dalam proses difusi, budaya-budaya lokal juga dapat aktif mengadaptasi dan merekreasikan elemen-elemen baru, sehingga tetap mempertahankan identitas unik. Namun, kritikus seperti Marshall McLuhan (2022) mengkhawatirkan bahwa globalisasi dapat mengarah pada dominasi budaya dari pusat-pusat kekuasaan tertentu, yang dapat mengancam keberagaman budaya dan menyebabkan homogenisasi (Tomlinson, 2017).

#### **4. Teori Konflik**

Teori konflik dalam konteks globalisasi membahas ketegangan, pertentangan, dan perlawanan yang muncul akibat interaksi antara berbagai aktor dalam sistem global. Sebagaimana diungkapkan oleh Karl Marx (2017), konflik dalam globalisasi sering kali dipicu oleh ketidaksetaraan ekonomi dan politik antara negara-negara, serta antara kelompok-kelompok dalam masyarakat global. Teori ini menekankan bahwa globalisasi tidak hanya membawa kemajuan dan kesempatan, tetapi juga menghasilkan konsekuensi yang tidak merata dan memperdalam kesenjangan (Held, McGrew, Goldblatt, & Perraton, 2019). Namun, beberapa ahli juga membahas bahwa konflik dalam konteks globalisasi tidak selalu bersifat destruktif, tetapi juga dapat memicu perubahan positif. Seperti yang dijelaskan oleh Samir Amin (2023), konflik dapat menjadi dorongan untuk munculnya gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk menuntut keadilan dan kesetaraan dalam sistem global. Oleh karena itu, teori konflik juga mencerminkan dinamika perjuangan kekuasaan dan resistensi di dalam proses globalisasi (Cox, 2018).

#### **5. Teori Modernisasi**

Teori modernisasi adalah pendekatan yang menggambarkan proses transformasi sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang dianggap sebagai ciri khas dari globalisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Daniel Lerner (2017), teori ini menekankan pentingnya modernisasi ekonomi, politik, dan budaya sebagai tahap yang diperlukan dalam mencapai kemajuan dan stabilitas sosial. Dalam konteks globalisasi, modernisasi sering dikaitkan dengan pengenalan teknologi, urbanisasi, dan industrialisasi sebagai indikator kemajuan masyarakat (Rostow, 2016). Namun, teori modernisasi juga mendapat kritik terutama terkait dengan asumsi bahwa model

modernisasi yang diadopsi dapat secara otomatis membawa kemakmuran dan kemajuan bagi semua masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Arturo Escobar (2020), pendekatan ini seringkali mengabaikan keberagaman budaya dan konteks historis yang dapat mempengaruhi efektivitas dari model-model pembangunan. Kritik ini menggarisbawahi perlunya memperhitungkan faktor-faktor lokal dalam upaya modernisasi (Easterly, 2017).

## **6. Teori Perdagangan Internasional**

Teori perdagangan internasional adalah pendekatan yang membahas pentingnya pertukaran barang dan jasa antar negara sebagai elemen sentral dari globalisasi ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Paul Krugman (2019), perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dalam produksi dan konsumsi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam konteks globalisasi, perdagangan internasional juga menjadi mesin utama dalam mengintegrasikan ekonomi global dan mengurangi batasan-batasan nasional dalam perdagangan (Caves, Frankel, & Jones, 2018). Namun, teori perdagangan internasional juga mendapat kritik, terutama terkait dengan ketimpangan yang dihasilkan oleh globalisasi ekonomi. Beberapa ahli, seperti Dani Rodrik (2021), membahas bahwa perdagangan internasional dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi antara negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif dan yang tidak. Kritik seperti ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat yang terpinggirkan dalam proses perdagangan internasional (Bhagwati, 2017).





# **BAB III**

## **SEJARAH GLOBALISASI**

---

Sejarah globalisasi merupakan rentetan peristiwa yang menggambarkan evolusi hubungan antarnegara dan interaksi lintas budaya dari masa ke masa. Dimulai dari zaman kuno dengan jalur perdagangan antara peradaban-peradaban seperti Jalur Sutra, hingga era penjelajahan dan penjajahan yang membawa pertukaran budaya dan perdagangan lintas samudra yang luas. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi, terutama dalam komunikasi dan transportasi, semakin mempercepat laju globalisasi, seperti yang terjadi pada abad ke-20 dengan perkembangan pesat telekomunikasi dan transportasi udara. Peristiwa-peristiwa ini membentuk fondasi bagi globalisasi modern yang kita kenal saat ini, yang ditandai dengan ketergantungan ekonomi yang semakin kompleks antarnegara dan pertukaran informasi yang tak terbatas melalui internet dan media sosial.

### **A. Perkembangan Sejarah Globalisasi**

Globalisasi adalah proses yang melibatkan interaksi, integrasi, dan interdependensi antara negara, organisasi, dan individu di seluruh dunia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Perkembangan sejarah globalisasi dapat dipahami melalui beberapa periode kunci:

#### **1. Globalisasi Pra-Modern (1000-1800 M)**

Globalisasi pra-modern merujuk pada periode sejarah dari sekitar tahun 1000 M hingga 1800 M di mana hubungan ekonomi, politik, dan budaya antar wilayah di dunia mulai meningkat secara signifikan. Selama periode ini, jaringan perdagangan internasional mulai berkembang, dengan jalur perdagangan seperti Jalur Sutra dan Jalur Rempah menjadi penting untuk pertukaran barang dan ide di

antara berbagai peradaban. Selain itu, perkembangan teknologi seperti pelayaran yang lebih maju dan penemuan kompas memberikan dorongan signifikan bagi interaksi antar bangsa dan peradaban, memungkinkan eksplorasi lebih jauh dan ekspansi ke wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau.

Selama periode ini, kerajaan-kerajaan dan kekaisaran-kekaisaran besar seperti Kekaisaran Romawi Timur, Dinasti Tang di Tiongkok, dan Kekaisaran Ottoman berperan penting dalam memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi melintasi batas-batas politik. Sistem feodalisme yang ada di Eropa juga memperkuat ketergantungan antara penguasa dan para bangsawan, namun juga memungkinkan pergerakan manusia, barang, dan ide di seluruh daratan Eropa. Selain itu, perjalanan penjelajah seperti Marco Polo membuka jalan bagi pertukaran pengetahuan dan budaya antara Timur dan Barat, menghubungkan dua dunia yang sebelumnya terisolasi secara lebih intim.

## **2. Globalisasi Modern Awal (1800-1945)**

Globalisasi modern awal, yang berlangsung dari sekitar tahun 1800 hingga 1945, ditandai oleh percepatan pertukaran global dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Revolusi Industri menjadi pendorong utama dalam proses ini, mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang secara drastis. Pengembangan transportasi, terutama dengan konstruksi jaringan rel kereta api dan kapal uap, memungkinkan barang-barang dipindahkan dengan lebih efisien dan cepat, membuka jalan bagi ekspansi perdagangan internasional. Selain itu, penjajahan Eropa di berbagai belahan dunia, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika, memperluas jaringan perdagangan dan menciptakan hubungan yang lebih luas antara berbagai budaya dan ekonomi. Pertukaran budaya juga meningkat pesat melalui kolonialisasi, dengan adopsi elemen budaya Eropa di berbagai wilayah dunia dan sebaliknya. Pengaruh politik dan ekonomi negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Belanda sangat kuat selama periode ini, memengaruhi kebijakan perdagangan dan pembangunan infrastruktur di wilayah jajahannya.



### **3. Era Pasca-Perang (1945-1980an)**

Era pasca-perang, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1980-an, merupakan periode yang ditandai oleh pemulihan ekonomi pasca-Perang Dunia II dan transformasi global yang signifikan. Setelah perang, terjadi ledakan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, terutama di Eropa dan Jepang, yang didorong oleh program-program rekonstruksi besar-besaran dan inovasi teknologi. Hal ini membawa tentang peningkatan perdagangan internasional, dengan penyebaran produk-produk dan teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang.

Selama periode ini, terjadi pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi global dan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan. Selain itu, kemajuan dalam transportasi dan komunikasi, seperti penerbangan komersial yang lebih terjangkau dan penyebaran televisi, mempercepat interaksi dan pertukaran antar negara. Globalisasi ekonomi semakin diperkuat dengan adopsi sistem perdagangan bebas dan liberalisasi pasar di banyak negara, yang memungkinkan arus modal dan tenaga kerja yang lebih bebas di seluruh dunia.

### **4. Globalisasi Kontemporer (1980an-Sekarang)**

Globalisasi kontemporer, yang dimulai pada tahun 1980-an hingga saat ini, mencerminkan percepatan dan intensifikasi pertukaran global dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan telepon seluler, telah mengubah cara kita berinteraksi, berbisnis, dan berbagi informasi secara drastis di seluruh dunia. Hal ini membuka pintu bagi konektivitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk berkomunikasi dan berkolaborasi tanpa batasan geografis.

Globalisasi ekonomi semakin mendalam dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, yang didorong oleh pembentukan organisasi perdagangan internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan pembentukan blok perdagangan regional seperti Uni Eropa dan NAFTA. Arus modal, barang, dan tenaga kerja menjadi semakin bebas dan terintegrasi di pasar global, menciptakan kesempatan

ekonomi baru dan tantangan yang kompleks. Selain itu, korporasi multinasional memiliki peran yang semakin dominan dalam perekonomian global, dengan kegiatan operasinya melintasi batas-batas negara dan berkontribusi pada struktur ekonomi yang terhubung secara global.

## **B. Faktor-Faktor Pendorong Globalisasi**

Globalisasi telah menjadi fenomena yang mendominasi berbagai aspek kehidupan manusia di era modern. Pendorong-pendorong utama globalisasi meliputi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan luas di seluruh dunia. Selain itu, liberalisasi perdagangan dan investasi juga menjadi faktor penting dengan membuka pasar global dan mendorong integrasi ekonomi antar negara. Di samping itu, mobilitas manusia yang semakin tinggi, baik dalam hal perpindahan tenaga kerja maupun dalam hal pariwisata, turut mempercepat proses globalisasi dengan memperluas jaringan hubungan internasional. Faktor-faktor yang mendorong globalisasi mencakup:

### **1. Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional memegang peran sentral sebagai salah satu faktor pendorong utama dalam proses globalisasi. Menurut Rajan dan Subramanian (2017), perdagangan internasional memfasilitasi aliran barang, jasa, dan modal antar negara, yang pada gilirannya membentuk jaringan ekonomi global yang semakin terintegrasi. Data dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menunjukkan bahwa perdagangan internasional telah meningkat secara signifikan sejak awal abad ke-21, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan secara global (WTO, 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan Bhagwati (2016), yang menekankan bahwa perdagangan internasional tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempromosikan perdamaian dan stabilitas politik melalui integrasi ekonomi antar negara.

Perdagangan internasional juga menjadi motor utama dalam penyebaran teknologi dan pengetahuan antar negara. Penelitian oleh Acemoglu *et al.* (2016) menunjukkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional cenderung memiliki akses

yang lebih besar terhadap teknologi dan inovasi dari negara-negara mitra perdagangan. Dengan demikian, perdagangan internasional tidak hanya memfasilitasi pertukaran barang, tetapi juga mempromosikan transfer teknologi dan pengetahuan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial (Acemoglu *et al.*, 2016). Dalam konteks ini, perdagangan internasional tidak hanya menjadi faktor ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan manusia dan peningkatan kapasitas inovasi suatu bangsa.

## **2. Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam proses globalisasi. Menurut Castells (2015), perkembangan TIK memungkinkan terciptanya jaringan komunikasi global yang menghubungkan individu, perusahaan, dan negara-negara di seluruh dunia. Fenomena ini telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan berkomunikasi secara fundamental (Castells, 2015). Data dari International Telecommunication Union (ITU) menunjukkan bahwa penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar terus meningkat secara global, membuka pintu bagi akses informasi dan komunikasi yang tidak terbatas (ITU, 2021).

TIK juga memungkinkan terciptanya ekonomi digital yang semakin terintegrasi. Menurut Rifkin (2017), transformasi digital telah mengubah cara bisnis dijalankan, dengan perusahaan-perusahaan mengandalkan infrastruktur TIK untuk memfasilitasi produksi, distribusi, dan pemasaran produk dan layanan secara global. Perkembangan platform-platform digital seperti e-commerce, fintech, dan media sosial telah membuka peluang baru bagi pelaku bisnis untuk mencapai pasar global dengan lebih efisien dan efektif (Rifkin, 2017). Dalam konteks ini, TIK tidak hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi digital yang semakin penting dalam era globalisasi.

## **3. Investasi Asing Langsung**

Investasi Asing Langsung (FDI) telah menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam proses globalisasi ekonomi. Menurut Dunning (2016), FDI berperan penting dalam menghubungkan ekonomi nasional dengan ekonomi global melalui transfer teknologi, manajemen, dan

sumber daya manusia. Data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan bahwa arus FDI global terus meningkat sejak beberapa dekade terakhir, mencerminkan integrasi yang semakin erat antara pasar modal internasional (UNCTAD, 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan Rugman dan Verbeke (2017), yang menekankan bahwa FDI tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal bagi negara-negara penerima, tetapi juga sebagai alat untuk memperluas jaringan bisnis lintas batas.

FDI juga berperan kunci dalam penyebaran praktik bisnis terbaik dan standar produksi di seluruh dunia. Menurut Ghemawat dan Altman (2017), perusahaan multinasional yang melakukan FDI sering membawa dengan teknologi, manajemen, dan keahlian operasional yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di negara tuan rumah. Penelitian juga menunjukkan bahwa negara-negara yang menerima FDI cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada yang tidak menerima (Ghemawat & Altman, 2017). Dalam konteks ini, FDI tidak hanya menjadi aliran modal, tetapi juga menjadi faktor penting dalam pembentukan iklim investasi yang kondusif di tingkat global.

#### **4. Migrasi dan Mobilitas Tenaga Kerja**

Migrasi dan mobilitas tenaga kerja telah menjadi faktor pendorong penting dalam proses globalisasi. Menurut Massey *et al.* (2015), meningkatnya migrasi internasional dan mobilitas tenaga kerja antar negara-negara telah menciptakan hubungan yang semakin erat antara ekonomi, budaya, dan sosial di seluruh dunia. Data dari International Organization for Migration (IOM) menunjukkan bahwa jumlah migran internasional terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir, mencapai lebih dari 270 juta pada tahun 2019 (IOM, 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan Hatton (2017), yang menggambarkan migrasi sebagai "satu-satunya kegiatan yang meratakan perbedaan antara negara-negara yang kaya dan miskin secara ekstrim."

Migrasi dan mobilitas tenaga kerja juga berperan penting dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Menurut Orrenius dan Zavadny (2018), migran sering kali memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara-negara penerima yang mengalami pertumbuhan ekonomi cepat, terutama di sektor-sektor seperti konstruksi, perawatan kesehatan, dan teknologi

informasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa migran sering kali membawa keterampilan dan pengetahuan yang berharga yang dapat meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi di negara penerima (Orrenius & Zavodny, 2018). Dalam konteks ini, migrasi dan mobilitas tenaga kerja menjadi salah satu mekanisme penting dalam redistribusi sumber daya manusia secara global.

## **5. Perubahan Politik**

Perubahan politik telah menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam dinamika globalisasi. Menurut Huntington (2017), globalisasi tidak hanya menciptakan integrasi ekonomi dan sosial di antara negara-negara, tetapi juga menghasilkan interdependensi politik yang semakin kuat. Data dari *Varieties of Democracy (V-Dem)* menunjukkan bahwa demokratisasi telah menjadi tren global yang dominan dalam beberapa dekade terakhir, dengan semakin banyak negara beralih ke sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif (V-Dem Institute, 2021). Pandangan ini diperkuat oleh Friedman (2016), yang mengamati bahwa teknologi informasi telah memungkinkan munculnya gerakan politik lintas batas yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat global.

Di sisi lain, perubahan politik juga dapat menciptakan ketidakstabilan dan konflik yang menghambat proses globalisasi. Menurut Keohane dan Nye (2017), pergeseran kekuatan geopolitik dan konflik antara negara-negara besar dapat menghambat kerja sama internasional dan mengganggu aliran perdagangan dan investasi lintas batas. Contohnya adalah meningkatnya ketegangan politik antara AS dan Tiongkok, yang telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi global dan mempengaruhi dinamika perdagangan internasional (Baldwin, 2016). Dalam konteks ini, perubahan politik dapat menjadi faktor pendorong dan juga hambatan bagi globalisasi, tergantung pada arah dan dampaknya dalam tatanan politik global.

## **6. Perubahan Sosial**

Perubahan sosial telah menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam dinamika globalisasi. Menurut Castells (2015), perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat perubahan sosial di seluruh dunia, menghubungkan individu dan

komunitas secara global dan memfasilitasi pertukaran ide, nilai, dan budaya. Data dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) menunjukkan bahwa urbanisasi dan migrasi internal telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menciptakan keterkaitan yang semakin erat antara populasi dunia dan mempercepat proses globalisasi (UN DESA, 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan Robertson (2016), yang menggambarkan globalisasi sebagai "proses yang melibatkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait secara global." Perubahan sosial juga mempengaruhi struktur sosial dan pola interaksi di tingkat global. Menurut Inglehart dan Norris (2016), pergeseran nilai-nilai sosial dan politik, termasuk peningkatan dukungan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, telah menjadi ciri khas dari masyarakat global modern. Perubahan ini juga menciptakan tuntutan untuk inklusi dan partisipasi yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan global (Inglehart & Norris, 2016).

### **C. Perubahan Sosial Politik Akibat Globalisasi**

Globalisasi merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai negara, masyarakat, dan budaya di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya antar negara.

#### **1. Perubahan Sosial Akibat Globalisasi**

Perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi merupakan fenomena yang telah meresap ke dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dampaknya terasa meluas, mulai dari pola konsumsi hingga tatanan budaya. Globalisasi telah menghasilkan jaringan komunikasi dan perdagangan yang semakin terintegrasi, memfasilitasi pertukaran ide, nilai, dan gaya hidup secara cepat dan luas.

##### **a. Perubahan Nilai dan Norma**

Perubahan nilai dan norma sebagai hasil dari globalisasi mencerminkan transformasi sosial yang signifikan dalam masyarakat modern. Menurut John Boli dan George Thomas (2017), globalisasi mempengaruhi nilai-nilai sosial dengan cara mengubah persepsi tentang kebenaran, kebaikan, dan keadilan, sering kali mengarah pada homogenisasi nilai-nilai di berbagai

belahan dunia. Hal ini juga diperkuat oleh Appadurai (2015) yang menyatakan bahwa globalisasi menghasilkan "ethnoscape" baru, di mana nilai-nilai lokal dan global saling berinteraksi, membentuk norma-norma baru yang mengubah dinamika sosial. Penelitian oleh Robertson (2016) juga membahas pergeseran norma-norma sosial yang terjadi akibat globalisasi, menciptakan konflik dan ketegangan antara nilai tradisional dan nilai global.

Pergeseran nilai dan norma yang terjadi dapat menghasilkan dampak yang kompleks dalam masyarakat. Menurut Inglehart dan Welzel (2018), globalisasi cenderung mengarah pada modernisasi nilai-nilai, seperti peningkatan individualisme dan toleransi terhadap perbedaan budaya. Namun, perubahan ini juga seringkali menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok yang mempertahankan nilai tradisional. Pemikiran ini diperkuat oleh Castells (2015) yang menunjukkan bahwa globalisasi sering kali berdampak pada konflik nilai di masyarakat, terutama antara kelompok yang menginginkan perubahan dengan yang ingin mempertahankan status quo.

b. Diversifikasi Identitas

Diversifikasi identitas adalah fenomena sosial yang semakin meriah akibat globalisasi, di mana individu dan kelompok-kelompok mengalami perubahan dalam cara mengidentifikasi diri. Menurut Hall (2017), globalisasi telah membuka akses terhadap berbagai budaya dan ideologi, memungkinkan individu untuk memilih dari beragam identitas yang tersedia. Hal ini sejalan dengan pandangan Anthony Giddens (2018) yang menyatakan bahwa globalisasi menciptakan "jaringan identitas" yang kompleks, di mana individu dapat mengambil elemen dari berbagai budaya untuk membentuk identitas sendiri.

Perubahan dalam identitas sosial juga memengaruhi dinamika kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Cohen (2016), globalisasi telah membuka pintu bagi munculnya kelompok-kelompok identitas baru yang didasarkan pada aspek-aspek seperti gender, etnisitas, dan orientasi seksual. Hal ini menciptakan masyarakat yang semakin beragam, di mana pluralitas identitas menjadi ciri khasnya. Selain itu, Bauman

(2015) membahas bahwa diversifikasi identitas juga menciptakan tantangan baru dalam pemeliharaan hubungan sosial, karena individu sering kali harus bernegosiasi dengan berbagai identitas yang dimiliki dalam interaksi sehari-hari.

c. Urbanisasi dan Mobilitas

Urbanisasi dan mobilitas merupakan dua aspek penting dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi. Menurut Saskia Sassen (2018), globalisasi telah menjadi pendorong utama urbanisasi, dengan pertumbuhan kota-kota besar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Manuel Castells (2016), yang membahas peran penting kota dalam jaringan ekonomi global dan pertukaran informasi, menciptakan kondisi untuk mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Dampak globalisasi terhadap urbanisasi juga menciptakan tantangan dan kesempatan bagi masyarakat perkotaan. Menurut Peter Hall (2017), urbanisasi yang dipicu oleh globalisasi sering kali menghasilkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang meningkat di kota-kota besar, dengan pembentukan kawasan-kawasan kumuh dan kesenjangan akses terhadap sumber daya. Namun, Saskia Sassen (2019) menunjukkan bahwa globalisasi juga membawa inovasi dalam tata kelola perkotaan, seperti pengembangan infrastruktur digital dan kebijakan inklusi sosial, yang dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas bagi semua penduduk kota.

## **2. Perubahan Politik Akibat Globalisasi**

Dinamika politik telah mengalami transformasi yang signifikan sebagai akibat dari proses globalisasi yang tak terhindarkan. Perubahan ini tercermin dalam peningkatan keterlibatan aktor politik non-negara, seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional, yang memiliki pengaruh yang semakin besar dalam pembuatan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, globalisasi juga mempercepat penyebaran ideologi politik dan gerakan sosial secara lintas batas, menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam mempertahankan stabilitas politik dalam era yang semakin terhubung secara global.

a. Munculnya Aktor Non-Negara



Munculnya aktor non-negara adalah fenomena penting dalam perubahan politik yang dipicu oleh globalisasi. Menurut Joseph Nye (2018), globalisasi telah memperkuat peran aktor non-negara, seperti organisasi nirlaba, perusahaan multinasional, dan gerakan sosial, dalam pembentukan kebijakan global. Hal ini sejalan dengan pandangan Manuel Castells (2017), yang menekankan bahwa aktor non-negara seringkali memiliki kekuatan yang signifikan dalam menentukan agenda politik dan mempengaruhi keputusan di tingkat nasional maupun internasional.

Peran aktor non-negara dalam politik global menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional. Menurut Anne-Marie Slaughter (2016), globalisasi telah mengubah cara negara-negara berinteraksi, dengan pemerintah sering kali harus berurusan dengan aktor non-negara dalam pembuatan kebijakan dan penyelesaian konflik. Hal ini menuntut adanya mekanisme kerjasama dan tata kelola global yang lebih inklusif. Selain itu, Mary Kaldor (2019) membahas bahwa aktor non-negara sering menjadi pelaku utama dalam upaya penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian di tingkat lokal dan regional, menggambarkan peran penting dalam politik global.

b. Revolusi Informasi dan Partisipasi Politik

Revolusi informasi dan partisipasi politik adalah dua aspek yang terkait erat dengan perubahan politik yang dipengaruhi oleh globalisasi. Menurut Manuel Castells (2015), revolusi informasi telah mengubah lanskap politik dengan menyediakan akses yang lebih besar terhadap informasi dan memungkinkan komunikasi yang cepat dan mudah di antara individu di seluruh dunia. Hal ini telah mengubah cara orang terlibat dalam politik, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan langsung melalui platform-platform digital. Sejalan dengan itu, Howard Rheingold (2018) membahas peran penting media sosial dalam memfasilitasi partisipasi politik, memungkinkan individu untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan aksi politik secara efisien.

Dampak revolusi informasi terhadap partisipasi politik tidak hanya terlihat dalam skala individu, tetapi juga dalam dinamika politik nasional dan internasional. Menurut Pippa Norris (2017),

teknologi informasi telah membuka pintu bagi partisipasi politik yang lebih besar di tingkat lokal, nasional, dan global, dengan memperluas ruang publik dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Namun, Zeynep Tufekci (2018) memperingatkan bahwa meskipun teknologi informasi memungkinkan partisipasi politik yang lebih besar, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini, menciptakan kesenjangan digital yang dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam partisipasi politik.

c. Tantangan Terhadap Kedaulatan Negara

Tantangan terhadap kedaulatan negara adalah fenomena penting yang muncul sebagai hasil dari globalisasi. Menurut Joseph Stiglitz (2017), globalisasi telah membuka pasar dan meliberalisasi perdagangan, menyebabkan arus modal, barang, dan informasi yang lebih bebas di seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan negara-negara mengalami penurunan dalam kemampuan untuk mengontrol ekonomi dan kebijakan domestik sendiri. Dampaknya, menurut Dani Rodrik (2018), adalah adanya tekanan pada kedaulatan negara karena kebutuhan untuk beradaptasi dengan tuntutan global dan mematuhi peraturan internasional yang semakin membatasi kebijakan nasional.

Perdagangan bebas dan interkoneksi ekonomi global juga membawa tantangan bagi kedaulatan negara. Menurut Robert Keohane (2016), organisasi ekonomi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia memiliki kekuatan besar dalam menentukan kebijakan ekonomi suatu negara melalui berbagai perjanjian dan kondisi pinjaman. Hal ini menyebabkan negara-negara merasa terbatas dalam kemampuan untuk membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan domestik sendiri. Seiring dengan itu, John Agnew (2019) membahas bahwa globalisasi juga meningkatkan peran aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi masyarakat sipil dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi negara-negara, mengurangi kontrol langsung pemerintah atas proses pembuatan keputusan.



# **BAB IV**

## **DAMPAK EKONOMI GLOBALISASI**

---

Dampak ekonomi globalisasi mencerminkan kompleksitas hubungan antara negara-negara di era modern yang semakin terhubung secara global. Pertama-tama, globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi dunia dengan menciptakan pasar global yang lebih terintegrasi, memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar baru dan sumber daya yang lebih luas. Hal ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, sementara pada saat yang sama meningkatkan ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang. Di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan seperti persaingan yang lebih ketat dan volatilitas pasar yang lebih besar, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi di beberapa wilayah. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dampak ekonomi globalisasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di era global yang terus berkembang.

### **A. Integrasi Ekonomi Global**

Integrasi ekonomi global adalah proses di mana ekonomi dari berbagai negara menjadi lebih terintegrasi satu sama lain melalui perdagangan internasional, investasi, arus modal, dan mobilitas tenaga kerja. Hal ini sering diukur melalui indikator seperti pertumbuhan perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan ketergantungan ekonomi antarnegara. Integrasi ekonomi global dapat meningkatkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat membawa risiko seperti ketidakstabilan finansial global dan ketidaksetaraan ekonomi.

## 1. Faktor-Faktor yang Mendorong Integrasi Ekonomi Global

Dorongan menuju integrasi ekonomi global semakin menguat seiring dengan perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang semakin canggih. Perkembangan ini memungkinkan negara-negara untuk saling terhubung secara lebih efisien, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya dan tenaga kerja di seluruh dunia. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di tingkat internasional juga didorong oleh kebutuhan akan stabilitas ekonomi global dan peningkatan kesejahteraan bersama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, penyebaran penyakit, dan ketidakstabilan politik.

### a. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan faktor utama yang mendorong integrasi ekonomi global melalui berbagai mekanisme. Menurut John H. Dunning (2016), perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk saling memperdagangkan barang dan jasa yang dimiliki secara komparatif lebih unggul, sehingga mendorong spesialisasi produksi dan efisiensi ekonomi. Dengan demikian, perdagangan internasional dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nasional. Selain itu, L. Alan Winters (2017) mengemukakan bahwa perdagangan internasional juga dapat membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi produsen dan konsumen, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Perdagangan internasional juga dapat meningkatkan transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Menurut Robert C. Feenstra dan Alan M. Taylor (2018), dalam perdagangan internasional, terjadi aliran ide, teknologi, dan inovasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing suatu negara. Hal ini membantu negara-negara berkembang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengejar ketertinggalan. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi asing langsung (FDI), yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Robertson dan Yeats, 2019).

b. Teknologi dan Transportasi

Teknologi dan transportasi berperan kunci dalam mendorong integrasi ekonomi global. Menurut Klaus Schwab (2017), teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan berbisnis di seluruh dunia, membuka pintu bagi kolaborasi lintas batas yang lebih luas dan cepat. Inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga telah mengurangi hambatan waktu dan ruang dalam perdagangan internasional, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien di pasar global (World Bank, 2018). Teknologi juga memfasilitasi produksi global melalui rantai pasokan yang terintegrasi, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif di berbagai negara.

Perkembangan dalam transportasi juga berperan penting dalam integrasi ekonomi global. Menurut John M. Meyer (2019), kemajuan dalam transportasi laut, udara, dan darat telah memperpendek waktu pengiriman barang, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan aksesibilitas pasar global. Misalnya, transportasi udara telah memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan barang dengan cepat ke berbagai belahan dunia, sementara transportasi laut memungkinkan pengiriman massal barang dengan biaya yang relatif murah (Bair dan Gereffi, 2020). Dengan demikian, infrastruktur transportasi yang berkualitas dan efisien menjadi kunci dalam memfasilitasi arus barang dan jasa lintas batas.

c. Investasi Asing Langsung

Investasi asing langsung (FDI) memiliki peran yang signifikan dalam mendorong integrasi ekonomi global. Menurut Theodore H. Moran (2016), FDI tidak hanya membawa modal ke negara-negara tujuan, tetapi juga membawa teknologi, manajemen, dan koneksi pasar yang dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi. Hal ini membantu menghubungkan perekonomian suatu negara dengan perekonomian global melalui jaringan produksi dan distribusi yang lebih luas (UNCTAD, 2018). FDI juga memungkinkan transfer keterampilan dan pengetahuan antar negara, yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing suatu negara di pasar internasional.

FDI juga berperan penting dalam memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara di seluruh dunia. Menurut Alan M. Rugman dan Alain Verbeke (2019), FDI membentuk jaringan bisnis lintas batas yang kompleks, yang mendorong interdependensi ekonomi antara negara-negara asal dan tujuan investasi. Hal ini memperkuat keterkaitan ekonomi global dan meningkatkan ketergantungan antar negara dalam hal investasi dan perdagangan. Selain itu, FDI juga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik, seperti peningkatan investasi dalam infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Blomström *et al.*, 2020).

d. Organisasi Internasional

Organisasi internasional berperan kunci dalam mendorong integrasi ekonomi global melalui pembentukan kerangka kerja, regulasi, dan kerjasama antarnegara. Menurut Joseph S. Nye Jr. (2016), organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Bank Dunia memberikan platform bagi negara-negara untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perbedaan perdagangan secara damai, sehingga memfasilitasi arus perdagangan yang lancar. Selain itu, organisasi internasional juga membantu mengembangkan standar dan regulasi yang seragam untuk perdagangan dan investasi internasional, memperkuat kepercayaan dan transparansi dalam sistem perdagangan global (Helfer dan Slaughter, 2018).

Organisasi internasional juga mendorong integrasi ekonomi global melalui inisiatif kerjasama regional dan multilateral. Menurut Michael E. Porter (2019), organisasi regional seperti Uni Eropa (UE) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menciptakan zona perdagangan bebas dan melakukan harmonisasi kebijakan untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan di antara anggotanya. Di tingkat multilateral, organisasi seperti G20 bertindak sebagai forum untuk berkoordinasi dalam menanggapi masalah-masalah ekonomi global yang kompleks dan lintas batas (Cooper, 2021).

## 2. Manfaat Integrasi Ekonomi Global

Integrasi ekonomi global menawarkan manfaat yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat, memungkinkan untuk memperluas kesempatan perdagangan dan investasi secara luas. Dengan membuka pasar secara lebih luas, integrasi ekonomi global dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mendorong inovasi, dan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu manfaat utama dari integrasi ekonomi global. Menurut Jeffrey D. Sachs (2017), integrasi ekonomi global memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar untuk barang dan jasa. Hal ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan karena memungkinkan adanya alokasi sumber daya yang lebih efisien dan peningkatan spesialisasi produksi (World Bank, 2018). Selain itu, perdagangan internasional yang lancar dan investasi asing langsung (FDI) yang meningkat juga dapat menghasilkan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi, yang semuanya merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Integrasi ekonomi global juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik melalui peningkatan daya saing dan efisiensi. Menurut Paul Krugman (2019), persaingan yang dihasilkan dari perdagangan internasional mendorong inovasi, peningkatan kualitas produk, dan efisiensi produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, akses yang lebih besar ke pasar global juga dapat memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar, yang dapat menghasilkan efisiensi biaya dan peningkatan profitabilitas (Baldwin, 2020).

### b. Efisiensi Ekonomi

Efisiensi ekonomi merupakan salah satu manfaat utama dari integrasi ekonomi global. Menurut Paul Collier (2016), integrasi ekonomi global memungkinkan negara-negara untuk

memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, baik dalam hal produksi maupun alokasi. Dengan adanya integrasi, perusahaan dapat mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi (Feenstra dan Taylor, 2017). Hal ini membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan, yang pada gilirannya dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Integrasi ekonomi global juga memungkinkan adanya spesialisasi produksi yang lebih efisien. Menurut Robert C. Feenstra dan Alan M. Taylor (2018), dengan adanya perdagangan internasional, negara-negara cenderung memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif, sehingga meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini memungkinkan munculnya rantai pasokan global yang lebih efisien, di mana setiap negara fokus pada produksi barang dan jasa tertentu sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang dimilikinya (World Bank, 2020). Dengan demikian, integrasi ekonomi global dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya secara keseluruhan, menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

c. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu manfaat penting dari integrasi ekonomi global. Menurut Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2016), integrasi ekonomi global dapat membuka peluang investasi dan ekspansi bagi perusahaan, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini terutama terlihat dalam sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan ekspor yang signifikan sebagai akibat dari integrasi ekonomi global (World Bank, 2018). Selain itu, integrasi ekonomi global juga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dengan membuka akses ke pasar global, memungkinkan perusahaan untuk memperluas produksi dan mempekerjakan lebih banyak pekerja.

Integrasi ekonomi global juga dapat menghasilkan peningkatan keterampilan dan pendapatan bagi pekerja. Menurut Douglas A. Irwin (2019), integrasi ekonomi global dapat memungkinkan



transfer teknologi dan pengetahuan antar negara, yang dapat meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan pendapatan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Blomström *et al.*, 2020). Selain itu, akses yang lebih besar ke pasar global juga dapat menciptakan kesempatan bagi pekerja untuk bekerja di sektor-sektor yang lebih produktif dan berkembang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mobilitas sosial dan kemakmuran.

d. Peningkatan Standar Hidup

Peningkatan standar hidup merupakan salah satu manfaat yang signifikan dari integrasi ekonomi global. Menurut Jeffrey D. Sachs (2017), integrasi ekonomi global dapat menciptakan peluang perdagangan dan investasi yang memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan akses terhadap barang dan jasa berkualitas tinggi dari pasar global. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan pilihan konsumen dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat (World Bank, 2018). Selain itu, integrasi ekonomi global juga dapat membantu mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan standar hidup secara keseluruhan.

Integrasi ekonomi global juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Menurut Michael E. Porter (2019), akses yang lebih besar ke pasar global dapat meningkatkan skala produksi perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan memperluas peluang kerja, yang semuanya dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, integrasi ekonomi global juga dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Krugman, 2023).

## **B. Neraca Perdagangan**

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Neraca

perdagangan mencatat selisih antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Jika nilai ekspor melebihi nilai impor, negara tersebut memiliki surplus perdagangan, sedangkan jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, maka negara tersebut memiliki defisit perdagangan.

## **1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Neraca Perdagangan**

Neraca perdagangan suatu negara merupakan cerminan dari hubungan ekonomi internasionalnya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung meningkatkan permintaan akan impor, sementara kebijakan perdagangan yang liberal dapat mendorong ekspor. Selain itu, fluktuasi mata uang dan perubahan harga komoditas global juga berperan penting dalam membentuk keseimbangan perdagangan sebuah negara. Di samping itu, faktor-faktor seperti tingkat inflasi, kebijakan fiskal dan moneter, serta kondisi politik juga dapat mempengaruhi arah dan besarnya neraca perdagangan suatu negara.

### **a. Kurs Valuta Asing**

Pengertian kurs valuta asing dalam konteks faktor yang memengaruhi neraca perdagangan adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Menurut Hasanuddin (2019), faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing antara lain tingkat suku bunga, inflasi, stabilitas politik, dan tingkat kepercayaan investor. Kurs yang rendah cenderung mendorong ekspor karena membuat produk dalam negeri lebih murah bagi konsumen asing, sehingga dapat meningkatkan neraca perdagangan suatu negara (Pisani-Ferry *et al.*, 2017). Namun, kurs yang terlalu rendah juga dapat meningkatkan biaya impor, yang dapat menjadi beban bagi negara dengan ketergantungan tinggi pada impor (Auer *et al.*, 2020).

Kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi kurs valuta asing. Penggunaan cadangan devisa untuk menstabilkan kurs merupakan salah satu kebijakan yang sering digunakan oleh pemerintah (IMF, 2019). Namun, kebijakan semacam ini juga memiliki risiko, seperti berkurangnya cadangan devisa yang dapat digunakan untuk pembayaran impor, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara (Borensztein *et al.*, 2018). Oleh karena itu, peran pemerintah

dalam mengelola kebijakan valuta asing sangat penting untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan.

b. Permintaan Global

Permintaan global merupakan faktor penting yang memengaruhi neraca perdagangan suatu negara. Menurut Zhang *et al.* (2018), pertumbuhan ekonomi global memiliki dampak signifikan terhadap permintaan produk ekspor dan impor suatu negara. Ketika pertumbuhan ekonomi global meningkat, permintaan akan produk ekspor juga cenderung meningkat, yang dapat menyebabkan surplus dalam neraca perdagangan (Jacks *et al.*, 2017). Namun, di sisi lain, ketika permintaan global menurun, terutama karena perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang, neraca perdagangan suatu negara dapat mengalami defisit karena penurunan ekspor dan peningkatan impor.

Faktor lain yang memengaruhi permintaan global adalah perubahan dalam preferensi konsumen dan tren pasar. Menurut Fahri *et al.* (2020), perubahan tren konsumen global dapat mempengaruhi permintaan terhadap jenis produk tertentu, yang pada gilirannya dapat memengaruhi neraca perdagangan suatu negara. Misalnya, permintaan akan produk teknologi tinggi atau produk ramah lingkungan dapat meningkat, yang dapat menguntungkan negara-negara yang memproduksi barang-barang tersebut (Baldwin, 2016). Oleh karena itu, negara-negara perlu memperhatikan perubahan tren konsumen global dalam merencanakan strategi perdagangan internasional.

c. Kondisi Ekonomi Internal

Kondisi ekonomi internal suatu negara berperan penting dalam menentukan neraca perdagangan. Menurut Roudet *et al.* (2019), pertumbuhan ekonomi domestik mempengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat produksi dalam negeri, yang pada gilirannya dapat memengaruhi permintaan terhadap barang impor dan ekspor. Ketika ekonomi domestik tumbuh kuat, permintaan domestik akan meningkat, yang dapat menggerakkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor (Bénassy-Quéré *et al.*, 2019). Namun, jika ekonomi domestik mengalami perlambatan, permintaan domestik akan menurun, yang dapat meningkatkan

ketergantungan pada impor dan menyebabkan defisit dalam neraca perdagangan.

Stabilitas kebijakan ekonomi juga merupakan faktor penting yang memengaruhi kondisi ekonomi internal dan neraca perdagangan. Menurut Lane dan Milesi-Ferretti (2017), kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten dan dapat diprediksi dapat menciptakan lingkungan yang stabil bagi pelaku bisnis dan investor, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas neraca perdagangan. Namun, kebijakan yang tidak konsisten atau adanya ketidakpastian politik dapat menciptakan ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan mengganggu kinerja ekonomi domestik (Blanchard *et al.*, 2020).

## **2. Dampak Neraca Perdagangan yang Surplus dan Defisit**

Neraca perdagangan yang surplus atau defisit memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi suatu negara. Surplus perdagangan cenderung meningkatkan cadangan devisa negara dan menguatkan nilai tukar mata uang, sementara defisit perdagangan dapat menyebabkan penurunan cadangan devisa dan tekanan terhadap nilai tukar. Selain itu, surplus perdagangan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan investasi domestik, sedangkan defisit perdagangan dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi, termasuk inflasi dan ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri.

### **a. Surplus Perdagangan**

Surplus perdagangan merupakan keadaan di mana nilai ekspor suatu negara melebihi nilai impor. Menurut Melitz dan Redding (2015), surplus perdagangan dapat mencerminkan kompetitivitas dan keunggulan komparatif suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa tertentu. Surplus perdagangan dapat memberikan keuntungan ekonomi, seperti meningkatnya cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil (Freund, 2019). Selain itu, surplus perdagangan juga dapat membantu negara dalam mengurangi beban utang luar negeri dan meningkatkan kemampuan untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan pembangunan ekonomi.

Surplus perdagangan juga dapat memiliki dampak negatif, terutama dalam hubungan perdagangan internasional. Menurut Subramanian (2018), negara-negara dengan surplus perdagangan yang besar dapat menjadi sasaran kritik dari negara-negara mitra dagang yang mengalami defisit perdagangan. Kritik tersebut dapat berupa tuduhan manipulasi mata uang atau praktik perdagangan yang tidak adil, yang pada akhirnya dapat memicu konflik perdagangan antar negara. Selain itu, surplus perdagangan yang terlalu besar juga dapat menciptakan ketidakseimbangan global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan (Blanchard *et al.*, 2019).

b. Defisit Perdagangan

Defisit perdagangan adalah situasi di mana nilai impor suatu negara melebihi nilai ekspor. Menurut Goldberg dan Pavcnik (2016), defisit perdagangan dapat mencerminkan kurangnya daya saing produk domestik di pasar internasional atau tingginya permintaan domestik terhadap barang-barang impor. Defisit perdagangan dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan ketergantungan pada pembiayaan luar negeri dan penurunan nilai tukar mata uang domestik (Obstfeld *et al.*, 2018). Selain itu, defisit perdagangan juga dapat menyebabkan terjadinya transfer kekayaan dari dalam negeri ke luar negeri dalam jangka panjang (Grossman dan Helpman, 2017).

Defisit perdagangan juga bisa dianggap sebagai mekanisme untuk memperoleh akses lebih luas ke barang dan jasa dari pasar internasional. Menurut Krugman dan Obstfeld (2017), defisit perdagangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dengan memperluas pilihan konsumen dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Defisit perdagangan juga dapat mencerminkan investasi asing yang masuk ke dalam negeri untuk memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing (Blanchard dan Giavazzi, 2018). Meskipun begitu, penting untuk memperhatikan bahwa defisit perdagangan yang terlalu besar juga dapat menyebabkan masalah ekonomi yang serius jika tidak dikelola dengan baik.

### 3. Kebijakan yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Defisit Perdagangan

Mengatasi defisit perdagangan merupakan tantangan yang serius bagi pemerintah sebuah negara. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan mendorong produksi domestik melalui insentif fiskal dan dukungan infrastruktur. Selain itu, merangsang ekspor melalui promosi perdagangan dan kebijakan pengembangan pasar juga dapat membantu mengurangi defisit perdagangan suatu negara serta meningkatkan keseimbangan dalam neraca perdagangan.

#### a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi defisit perdagangan suatu negara. Menurut Lane dan Milesi-Ferretti (2018), penggunaan kebijakan fiskal yang bijaksana, seperti pengendalian pengeluaran pemerintah dan peningkatan pendapatan melalui reformasi pajak, dapat membantu mengurangi defisit perdagangan dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal yang konsisten dan berkelanjutan juga dapat menciptakan kestabilan ekonomi domestik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor ekspor (Bénassy-Quéré *et al.*, 2019). Dengan demikian, penting bagi negara-negara untuk merancang kebijakan fiskal yang tepat guna mengatasi defisit perdagangan.

Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada impor melalui insentif fiskal bagi industri domestik. Menurut Obstfeld *et al.* (2019), pemberian insentif fiskal, seperti pengurangan pajak untuk industri tertentu atau subsidi untuk inovasi dan pengembangan teknologi, dapat membantu meningkatkan daya saing produk-produk domestik di pasar internasional. Dengan demikian, penggunaan kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mengubah struktur ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga dapat mengurangi defisit perdagangan (Gourinchas dan Tornell, 2018).

#### b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi defisit perdagangan suatu negara. Menurut

Bernanke *et al.* (2015), bank sentral dapat menggunakan kebijakan suku bunga untuk mengatur tingkat investasi dan konsumsi dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi permintaan terhadap impor dan ekspor. Penyesuaian suku bunga dapat membantu mengendalikan aliran modal masuk dan keluar negara serta mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik, yang dapat memengaruhi daya saing produk ekspor dan impor (Reinhart dan Reinhart, 2019). Dengan demikian, kebijakan moneter dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi defisit perdagangan dengan mengatur kondisi keuangan domestik.

Bank sentral juga dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter non-konvensional, seperti intervensi langsung di pasar valuta asing, untuk mengatasi defisit perdagangan. Menurut Ghosh *et al.* (2016), intervensi valuta asing dapat membantu memengaruhi nilai tukar mata uang domestik dan mengurangi defisit perdagangan dengan mendorong devaluasi mata uang. Namun, penting bagi bank sentral untuk menggunakan intervensi valuta asing dengan hati-hati dan memperhitungkan risiko yang terkait dengan volatilitas pasar dan respon investor asing (Gagnon *et al.*, 2017).

c. Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi defisit perdagangan suatu negara. Menurut Baldwin *et al.* (2016), negara-negara dapat mengadopsi kebijakan perdagangan yang proaktif, seperti memperkuat perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral untuk memperluas akses pasar bagi produk ekspor domestik. Dengan membuka pasar luar negeri lebih luas, negara-negara dapat meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit perdagangan (Amiti *et al.*, 2019). Selain itu, negara-negara juga dapat menggunakan kebijakan perdagangan untuk mempromosikan diversifikasi ekonomi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Penerapan kebijakan perdagangan yang efektif juga dapat membantu mengatasi defisit perdagangan dengan menyeimbangkan kondisi persaingan di pasar internasional. Menurut Subramanian (2017), negara-negara dapat

menggunakan instrumen perdagangan, seperti tarif atau kuota impor, untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat atau praktik perdagangan yang tidak adil. Melalui perlindungan perdagangan yang tepat, negara-negara dapat memperkuat sektor industri domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor (Bown, 2018). Dengan demikian, kebijakan perdagangan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi domestik dapat membantu mengatasi defisit perdagangan.

d. Peningkatan Daya Saing

Peningkatan daya saing merupakan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi defisit perdagangan suatu negara. Menurut Hausmann *et al.* (2017), negara-negara dapat meningkatkan daya saing dengan melakukan reformasi struktural yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam sektor-sektor ekonomi kunci. Dengan meningkatkan daya saing produk domestik, negara-negara dapat meningkatkan pangsa pasar internasional dan mengurangi ketergantungan pada impor (Porter, 2017). Oleh karena itu, peningkatan daya saing merupakan langkah yang penting dalam upaya mengatasi defisit perdagangan.

Investasi dalam inovasi dan teknologi juga dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan daya saing suatu negara. Menurut Acemoglu *et al.* (2016), negara-negara yang berhasil mengembangkan sektor riset dan pengembangan serta mendorong inovasi teknologi cenderung memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar global. Dengan memiliki produk-produk dan teknologi yang inovatif, negara-negara dapat menarik minat konsumen internasional dan meningkatkan ekspor, sehingga membantu mengurangi defisit perdagangan (Freeman, 2020). Oleh karena itu, peningkatan investasi dalam inovasi dan teknologi merupakan strategi yang penting dalam upaya mengatasi defisit perdagangan.

### **C. Investasi Asing dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Politik**

Investasi asing merujuk pada aliran modal ke suatu negara yang berasal dari investor atau entitas non-domestik. Dalam konteks



globalisasi ekonomi yang semakin meningkat, investasi asing telah menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dapat berupa investasi dalam bentuk modal langsung, portofolio, atau bahkan pinjaman. Dampaknya dapat bervariasi mulai dari memperkuat infrastruktur ekonomi hingga mempengaruhi kestabilan politik dan sosial.

### **1. Jenis-Jenis Investasi Asing**

Jenis-jenis investasi asing mencakup beberapa kategori utama yang mencerminkan beragamnya cara investor memasukkan modal ke negara lain. Investasi asing dapat berupa investasi dalam bentuk modal langsung, di mana investor memperoleh kontrol langsung atas bisnis di negara tujuan. Selain itu, investasi asing juga dapat berwujud portofolio, seperti saham dan obligasi, yang memberikan investor keuntungan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan atau negara yang bersangkutan. Selain itu, investasi asing juga dapat berupa pinjaman, di mana investor memberikan dana kepada entitas di negara lain dengan harapan memperoleh pengembalian dana beserta bunga.

#### **a. Investasi Portofolio**

Investasi portofolio merupakan salah satu jenis investasi asing yang melibatkan pembelian surat berharga, seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah di luar negeri. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2017), investasi portofolio seringkali dilakukan oleh investor institusi atau individu yang ingin mendiversifikasi portofolio dan mencari peluang investasi yang lebih baik di pasar global. Investasi ini dapat dilakukan melalui pasar keuangan internasional, di mana investor dapat memilih berbagai instrumen keuangan dari berbagai negara sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Investasi portofolio memberikan keuntungan bagi investor dengan memungkinkan untuk mendapatkan akses ke pasar keuangan internasional dan mendiversifikasi risiko investasi. Menurut Bodie, Kane, dan Marcus (2018), diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko investasi, dan dengan mengalokasikan dana ke berbagai instrumen keuangan di berbagai negara, investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar domestik. Selain itu, investasi portofolio

juga memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar domestik, terutama jika berhasil mengidentifikasi pasar atau instrumen keuangan yang potensial.

b. Investasi Langsung

Investasi langsung adalah bentuk investasi asing di mana investor memperoleh kepemilikan langsung dalam perusahaan atau aset di luar negeri. Menurut Root (2017), investasi langsung seringkali melibatkan transfer teknologi, manajemen, dan keterampilan ke perusahaan asing yang menjadi tujuan investasi. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara investor dan perusahaan, serta memberikan kontrol yang lebih besar terhadap operasional dan strategi bisnis.

Investasi langsung dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi investor, termasuk potensi keuntungan yang lebih besar dan akses langsung ke pasar dan sumber daya di negara tujuan. Menurut Dunning (2018), investasi langsung memungkinkan investor untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi negara tujuan, serta memperoleh keuntungan dari efisiensi produksi dan distribusi yang lebih tinggi. Selain itu, investasi langsung juga dapat membantu memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

c. Investasi Asing dalam Sektor Primer

Investasi asing dalam sektor primer merupakan investasi langsung yang dilakukan oleh perusahaan asing dalam industri ekstraktif atau pertanian di negara tujuan investasi. Menurut Lall dan Narula (2016), investasi asing dalam sektor primer seringkali berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Hal ini dapat mencakup pembangunan dan operasionalisasi tambang, perkebunan, atau fasilitas produksi lainnya yang memanfaatkan sumber daya alam negara tersebut.

Investasi asing dalam sektor primer memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara tujuan investasi. Menurut UNCTAD (2019), investasi asing dalam sektor primer dapat menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi dan keterampilan, serta meningkatkan nilai tambah dan ekspor

produk primer. Selain itu, investasi ini juga dapat membantu diversifikasi ekonomi negara tujuan investasi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

d. **Investasi Asing dalam Sektor Sekunder dan Tersier**

Investasi asing dalam sektor sekunder dan tersier melibatkan investasi langsung dari perusahaan asing dalam industri manufaktur, jasa, atau sektor lainnya di negara tujuan investasi. Menurut Rugman dan Verbeke (2017), sektor sekunder mencakup kegiatan produksi barang-barang jadi atau bahan baku yang membutuhkan proses manufaktur, sementara sektor tersier melibatkan penyediaan berbagai jenis layanan, seperti keuangan, transportasi, atau pariwisata. Investasi asing dalam kedua sektor ini seringkali bertujuan untuk memanfaatkan pasar dan sumber daya manusia yang ada di negara tujuan investasi.

Investasi asing dalam sektor sekunder dan tersier dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara tujuan investasi. Menurut Hill, Hult, dan Wickramasekera (2019), investasi ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi dan pelayanan, serta mentransfer teknologi dan praktik manajemen yang canggih. Selain itu, investasi ini juga dapat membantu meningkatkan nilai tambah produk dan jasa, serta mendiversifikasi struktur ekonomi negara tujuan investasi.

## **2. Alasan Negara Menerima Investasi Asing**

Alasan negara menerima investasi asing dapat bervariasi, namun secara umum mencerminkan dorongan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Investasi asing sering kali dianggap sebagai sumber modal yang penting untuk memperluas infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Selain itu, penerimaan investasi asing juga dapat memberikan akses kepada negara tersebut terhadap teknologi, pengetahuan, dan praktik manajemen terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam berbagai sektor industri.

a. **Akses ke Pasar Baru**

Akses ke pasar baru menjadi salah satu alasan utama mengapa negara menerima investasi asing. Menurut Dunning (2018), investasi asing dapat memberikan akses ke pasar global bagi

perusahaan asing, memungkinkan untuk menjangkau konsumen baru dan meningkatkan pangsa pasar di negara tujuan investasi. Hal ini dapat membantu memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan potensi penjualan produk atau layanan perusahaan asing.

Akses ke pasar baru juga dapat membuka peluang bagi perusahaan asing untuk memanfaatkan keuntungan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Menurut Hill, Hult, dan Wickramasekera (2019), investasi asing memungkinkan perusahaan untuk memproduksi atau menyediakan produk atau layanan di dekat pasar konsumen, yang dapat mengurangi biaya produksi dan distribusi serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan asing dapat bersaing lebih efektif di pasar baru dan meningkatkan daya saing.

b. Transfer Teknologi

Transfer teknologi menjadi salah satu alasan utama mengapa negara menerima investasi asing. Menurut Lall dan Narula (2016), investasi asing seringkali membawa teknologi baru, pengetahuan, dan praktik manajemen ke negara tujuan investasi, yang dapat meningkatkan kapasitas inovasi dan produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi. Transfer teknologi ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pelatihan tenaga kerja, lisensi teknologi, atau pembangunan fasilitas produksi yang menggunakan teknologi canggih.

Investasi asing dapat menjadi saluran penting untuk transfer teknologi karena memungkinkan perusahaan asing untuk memanfaatkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan jejaring penelitian dan pengembangan yang ada di negara tujuan investasi. Menurut UNCTAD (2019), perusahaan asing seringkali membawa teknologi terdepan ke negara tujuan investasi, yang dapat membantu mempercepat kemajuan teknologi dan inovasi lokal. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi perusahaan lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

c. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu alasan utama mengapa negara menerima investasi asing. Menurut Dunning

(2018), investasi asing dapat membawa investasi modal dan teknologi ke negara tujuan investasi, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesempatan pekerjaan bagi penduduk lokal. Hal ini terutama berlaku dalam sektor-sektor tertentu, seperti industri manufaktur, jasa, dan teknologi, di mana perusahaan asing seringkali membuka pabrik atau kantor baru untuk memenuhi permintaan pasar lokal.

Penciptaan lapangan kerja oleh investasi asing juga dapat memiliki efek berganda pada pertumbuhan ekonomi negara tujuan investasi. Menurut Hill, Hult, dan Wickramasekera (2019), lapangan kerja yang diciptakan oleh perusahaan asing tidak hanya meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk lokal, tetapi juga memicu permintaan konsumen dan investasi lainnya dalam ekonomi domestik. Dengan demikian, investasi asing dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan sektor-sektor terkait dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

### **3. Pengaruh Investasi Asing Terhadap Sosial Politik**

Pengaruh investasi asing terhadap sosial politik dapat menjadi perhatian utama bagi suatu negara. Meskipun investasi asing dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik juga perlu diperhatikan. Investasi asing dapat memicu perubahan dalam dinamika sosial dan politik suatu negara, baik melalui peningkatan ketidaksetaraan ekonomi, pengaruh terhadap kebijakan publik, maupun potensi konflik antara pemangku kepentingan lokal dan investor asing.

#### **a. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan**

Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan merupakan salah satu pengaruh utama investasi asing terhadap dimensi sosial politik suatu negara. Menurut Lall dan Narula (2016), investasi asing dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi dan pendapatan nasional, serta mendiversifikasi struktur ekonomi. Dalam konteks sosial politik, peningkatan ekonomi ini dapat menciptakan stabilitas sosial, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Investasi asing juga dapat membawa teknologi, pengetahuan, dan praktik manajemen baru ke negara tujuan investasi, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Menurut Dunning (2018), transfer teknologi ini dapat mendukung inovasi lokal, meningkatkan daya saing industri nasional, dan mempercepat kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Sebagai hasilnya, peningkatan ekonomi ini dapat membawa dampak positif pada stabilitas politik, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan institusi demokratis dan partisipasi politik yang lebih luas.

b. Ketergantungan Ekonomi

Ketergantungan ekonomi merupakan salah satu pengaruh investasi asing terhadap dimensi sosial politik suatu negara. Menurut Rugman dan Verbeke (2017), investasi asing dapat menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap investor asing, yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik negara tujuan investasi. Ketergantungan ini dapat terjadi jika negara sangat bergantung pada investasi asing untuk pertumbuhan ekonomi dan sumber daya finansialnya.

Ketergantungan ekonomi terhadap investasi asing juga dapat mempengaruhi kebijakan sosial politik suatu negara. Menurut Moran, Graham, dan Blomström (2017), negara yang terlalu bergantung pada investasi asing mungkin cenderung mengorbankan kepentingan sosial politik domestik untuk memenuhi kepentingan investor asing atau untuk menjaga stabilitas investasi. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan pembangunan sosial, serta memicu protes atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

c. Ketidaksetaraan Ekonomi

Ketidaksetaraan ekonomi merupakan salah satu pengaruh investasi asing terhadap dimensi sosial politik suatu negara. Menurut UNCTAD (2019), investasi asing dapat memperkuat ketidaksetaraan ekonomi di negara tujuan investasi dengan memperbesar kesenjangan antara kelompok yang menerima manfaat langsung dari investasi tersebut dengan kelompok yang tidak. Hal ini terutama terjadi ketika manfaat ekonomi dari investasi asing cenderung mengalir ke segmen tertentu dalam

masyarakat, seperti elite politik atau kelompok bisnis, sementara sebagian besar masyarakat tidak merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan.

Ketidaksetaraan ekonomi yang disebabkan oleh investasi asing dapat mempengaruhi stabilitas sosial politik suatu negara. Menurut Moran, Graham, dan Blomström (2017), ketidakpuasan dan ketegangan sosial dapat timbul jika sebagian besar masyarakat merasa tidak adil dalam distribusi manfaat ekonomi dari investasi asing, yang dapat memicu protes, kerusuhan, atau bahkan konflik sosial yang lebih besar. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga politik, serta mengganggu stabilitas politik secara keseluruhan.

d. Intervensi Politik

Intervensi politik merupakan salah satu pengaruh investasi asing terhadap dimensi sosial politik suatu negara. Menurut Moran, Graham, dan Blomström (2017), investor asing atau negara asal investor dapat melakukan intervensi politik di negara tujuan investasi untuk melindungi atau memperluas kepentingan ekonomi. Intervensi politik ini dapat berupa lobbying, pengaruh politik, atau bahkan campur tangan langsung dalam proses politik domestik negara tujuan investasi.

Intervensi politik oleh investor asing dapat memengaruhi kebijakan sosial politik suatu negara. Menurut Rugman dan Verbeke (2017), investor asing mungkin memiliki kepentingan untuk memengaruhi kebijakan ekonomi, regulasi lingkungan, atau bahkan kebijakan ketenagakerjaan di negara tujuan investasi agar sesuai dengan kepentingan bisnis. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial politik yang ada.

e. Ketegangan Sosial

Ketegangan sosial menjadi salah satu dampak investasi asing terhadap dimensi sosial politik suatu negara. Menurut Moran, Graham, dan Blomström (2017), investasi asing dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan sosial dalam masyarakat jika manfaat ekonomi dari investasi tersebut tidak didistribusikan secara merata atau jika terjadi penyalahgunaan

kekuasaan oleh perusahaan asing. Hal ini dapat menyebabkan protes, demonstrasi, atau bahkan konflik sosial yang mengganggu stabilitas politik dan sosial di negara tujuan investasi.

Ketegangan sosial juga dapat timbul sebagai akibat dari ketidaksetaraan ekonomi yang disebabkan oleh investasi asing. Menurut UNCTAD (2019), ketidaksetaraan ekonomi yang meningkat dapat menciptakan ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat, terutama jika manfaat ekonomi dari investasi asing lebih banyak dinikmati oleh segmen tertentu seperti elite politik atau bisnis. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan meningkatkan risiko ketegangan sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas politik.

#### **4. Strategi Pengelolaan Investasi Asing**

Strategi pengelolaan investasi asing menjadi kunci penting bagi negara-negara yang ingin memanfaatkan modal asing secara optimal. Dalam mengelola investasi asing, negara dapat mengadopsi berbagai pendekatan, termasuk pembentukan kebijakan investasi yang menarik bagi investor asing, diversifikasi portofolio investasi, dan peningkatan kerja sama internasional untuk mengoptimalkan manfaat dari investasi asing. Selain itu, pengelolaan yang efektif juga mempertimbangkan pengawasan yang ketat terhadap masalah regulasi, risiko keuangan, dan dampak sosial politik dari investasi asing.

##### **a. Kebijakan Investasi Asing**

Kebijakan investasi asing menjadi strategi penting dalam pengelolaan investasi asing oleh suatu negara. Menurut Lall dan Narula (2016), kebijakan investasi asing mencakup serangkaian langkah dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola aliran masuk investasi asing ke dalam negeri. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti persyaratan investasi, insentif fiskal, regulasi lingkungan, dan perlindungan hak-hak investor.

Implementasi kebijakan investasi asing dapat memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Menurut Hill, Hult, dan Wickramasekera (2019), kebijakan yang mendukung investasi asing dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, meningkatkan



daya tarik bagi investor asing, dan mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan. Namun, kebijakan ini juga harus seimbang, mempertimbangkan kepentingan nasional, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

b. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur menjadi salah satu strategi kunci dalam pengelolaan investasi asing oleh suatu negara. Menurut Rugman dan Verbeke (2017), investasi asing sering kali diarahkan ke sektor infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan telekomunikasi, karena infrastruktur yang baik merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi asing dalam infrastruktur dapat membantu memperbaiki dan memperluas infrastruktur yang ada, meningkatkan konektivitas regional, dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara.

Pengembangan infrastruktur sebagai strategi pengelolaan investasi asing juga dapat membawa manfaat sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat. Menurut Hill, Hult, dan Wickramasekera (2019), infrastruktur yang berkualitas dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, investasi asing dalam infrastruktur juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

c. Kemitraan Internasional

Kemitraan internasional menjadi strategi penting dalam pengelolaan investasi asing oleh suatu negara. Menurut Lall dan Narula (2016), kemitraan internasional dalam konteks investasi asing dapat mencakup berbagai bentuk kerja sama antara negara tujuan investasi dan negara asal investor, seperti perjanjian perdagangan bebas, kerja sama investasi, atau kemitraan strategis dalam proyek-proyek infrastruktur. Melalui kemitraan ini, negara tujuan investasi dapat memperluas akses ke modal, teknologi, dan pasar global, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang.

Kemitraan internasional dalam pengelolaan investasi asing juga dapat memperkuat integrasi ekonomi regional dan global. Menurut Rugman dan Verbeke (2017), kemitraan internasional dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan terprediksi bagi investor asing, dengan mengurangi risiko politik, regulasi yang tidak pasti, dan hambatan perdagangan. Hal ini dapat membantu meningkatkan daya tarik bagi investor asing dan mempercepat aliran masuk investasi ke negara tujuan investasi.



# BAB V

## DAMPAK SOSIAL GLOBALISASI

---

Dampak sosial globalisasi mencakup berbagai perubahan dalam tatanan sosial dan interaksi manusia di seluruh dunia. Pertama-tama, globalisasi telah memfasilitasi pertukaran budaya yang lebih luas dan cepat antara masyarakat dari berbagai belahan dunia, menciptakan kesempatan untuk lebih memahami dan menghargai keragaman budaya. Namun, hal ini juga membawa tantangan, seperti homogenisasi budaya dan hilangnya keunikan lokal dalam menghadapi dominasi budaya global. Di samping itu, globalisasi juga mempengaruhi struktur sosial dengan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar antara yang kaya dan yang miskin, serta menciptakan ketegangan sosial terkait dengan migrasi internasional dan perubahan dalam pasar tenaga kerja global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dampak sosial globalisasi menjadi penting dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul di era global yang terus berubah.

### A. Perubahan Budaya

Di era globalisasi yang semakin terkoneksi, perubahan budaya menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Budaya, sebagai warisan nilai, norma, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi, terus mengalami transformasi sebagai respons terhadap arus globalisasi yang melanda. Perubahan budaya dalam konteks globalisasi mencerminkan proses interaksi kompleks antara berbagai faktor, termasuk teknologi, ekonomi, dan komunikasi yang semakin terbuka. Globalisasi membawa perubahan budaya melalui penetrasi ide, nilai, dan gaya hidup yang berasal dari berbagai belahan dunia. Hal ini menghasilkan proses akulturasi dan adaptasi, di mana elemen-elemen budaya lokal dan global saling bertautan dan berinteraksi. Dalam

dinamika ini, identitas budaya lokal terus berevolusi, sering kali menemukan keseimbangan baru antara tradisi dan inovasi dalam rangka menjawab tuntutan global.

## **1. Faktor-Faktor Pendorong Perubahan Budaya dalam Globalisasi**

Di era globalisasi yang terus berkembang, perubahan budaya telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Faktor-faktor pendorong yang mendorong perubahan budaya menjadi semakin penting dalam konteks ini. Globalisasi ekonomi, sebagai salah satu pendorong utama, mempercepat pertukaran ide, nilai, dan praktik antarbudaya melalui perdagangan internasional dan investasi lintas batas. Di samping itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan akses yang lebih cepat dan luas terhadap budaya-budaya di seluruh dunia, menciptakan suasana yang memperkuat interaksi antarbudaya.

### **a. Teknologi Komunikasi**

Teknologi komunikasi berperan kunci sebagai faktor pendorong perubahan budaya dalam era globalisasi. Menurut Castells (2015), teknologi komunikasi, khususnya internet, telah menciptakan "ruang komunikasi yang bersifat horizontal" yang mengubah cara individu dan kelompok berinteraksi dan berbagi informasi. Hal ini telah memungkinkan terciptanya jaringan budaya yang melintasi batas-batas geografis dan menyebabkan penyebaran nilai-nilai dan praktik budaya secara lebih cepat dan luas.

Jenkins (2016) membahas peran teknologi komunikasi dalam memfasilitasi partisipasi budaya di era globalisasi. Melalui media sosial dan platform kolaboratif online, individu dapat aktif berkontribusi dalam pembentukan budaya, menghasilkan konten, dan berinteraksi dengan budaya-budaya lain secara langsung. Hal ini merangsang pertukaran budaya yang intensif dan transformatif.

### **b. Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional berperan penting sebagai faktor pendorong perubahan budaya dalam konteks globalisasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robertson (2018), perdagangan internasional memfasilitasi pertukaran barang,

jasa, dan ide antar bangsa-bangsa, yang pada gilirannya memperluas lingkup pengaruh budaya. Melalui interaksi ekonomi lintas batas, nilai-nilai, tradisi, dan gaya hidup dapat menyebar lebih luas dan cepat di seluruh dunia.

Giddens (2019) membahas bahwa perdagangan internasional memicu integrasi budaya antara negara-negara, menciptakan "dorongan untuk homogenisasi budaya global." Dengan meningkatnya mobilitas manusia dan barang, unsur-unsur budaya dari satu wilayah dapat mengalir ke wilayah lain, menghasilkan proses asimilasi dan penyesuaian budaya yang kompleks.

c. Migrasi dan Mobilitas

Migrasi dan mobilitas manusia menjadi faktor pendorong penting dalam perubahan budaya dalam era globalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bauman (2016), "migrasi adalah sebuah faktor utama dalam transformasi budaya kontemporer," karena menghasilkan pertemuan antara beragam kelompok etnis, budaya, dan agama yang menciptakan dinamika baru dalam interaksi sosial dan budaya. Melalui migrasi, individu membawa serta nilai-nilai, tradisi, dan praktik budaya, yang kemudian berkontribusi pada keberagaman budaya di berbagai belahan dunia.

Vertovec (2017) membahas peran mobilitas manusia dalam mempercepat pertukaran budaya di era globalisasi. Dia menekankan bahwa mobilitas tidak hanya mencakup migrasi lintas batas, tetapi juga perjalanan sementara, komuter, dan turisme, yang semuanya menghasilkan pertemuan lintas budaya yang intensif. Hal ini menciptakan "translokasi budaya" di mana unsur-unsur budaya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan mudah.

d. Pengaruh Budaya Populer

Pengaruh budaya populer telah menjadi faktor pendorong utama perubahan budaya dalam konteks globalisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jenkins (2018), budaya populer, seperti film, musik, dan media sosial, memiliki kekuatan untuk menciptakan "komunitas imajinatif" di antara individu di seluruh dunia, yang memfasilitasi pertukaran ide, nilai, dan gaya hidup. Melalui media massa yang semakin terhubung dan

tersebar luas, budaya populer mampu meresapi masyarakat secara global dengan cepat dan efektif.

Storey (2020) membahas bahwa budaya populer juga berperan dalam membentuk identitas global dan lokal. Dia mencatat bahwa konsumsi budaya populer sering kali menjadi cara bagi individu untuk mengekspresikan identitas, baik sebagai bagian dari kelompok global maupun lokal. Hal ini menunjukkan bahwa budaya populer tidak hanya menciptakan homogenitas budaya, tetapi juga mendorong keberagaman dan pluralitas budaya di tengah globalisasi.

## **2. Dampak Perubahan Budaya dalam Globalisasi**

Pada konteks globalisasi yang terus meluas, perubahan budaya telah menjadi salah satu aspek yang paling mencolok. Dampak dari perubahan budaya ini memiliki jangkauan yang luas, memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara global. Globalisasi memfasilitasi pertukaran ide, nilai, dan praktik budaya di antara masyarakat di seluruh dunia, menghasilkan adaptasi dan transformasi dalam pola perilaku, tradisi, dan identitas budaya. Di samping itu, perubahan budaya juga mewakili respons manusia terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan teknologi yang terus berubah, menciptakan lanskap budaya yang terus berkembang dan terkadang kontroversial.

### **a. Penggabungan Budaya (*Hybridisasi*)**

Penggabungan budaya, atau yang sering disebut sebagai hybridisasi budaya, menjadi dampak yang signifikan dari perubahan budaya dalam konteks globalisasi. Menurut Hall (2017), hybridisasi budaya terjadi ketika elemen-elemen budaya dari berbagai sumber digabungkan secara kreatif, menghasilkan bentuk-bentuk budaya baru yang mencerminkan campuran identitas dan pengalaman yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era globalisasi, pertemuan antarbudaya secara tidak terhindarkan menciptakan fenomena hybridisasi yang kaya dan beragam.

Kraidy (2019) membahas bahwa hybridisasi budaya juga mencerminkan proses dinamis di mana budaya terus berubah dan beradaptasi dalam respons terhadap interaksi global yang semakin intensif. Dia menekankan bahwa dalam kondisi globalisasi, "budaya bukanlah sesuatu yang statis, tetapi

merupakan arena pertarungan aktif antara kekuatan global dan lokal." Oleh karena itu, penggabungan budaya merupakan hasil dari proses interaksi yang kompleks antara berbagai kepentingan dan dinamika sosial.

b. Penghapusan Batas-Batas Tradisional

Penghapusan batas-batas tradisional merupakan dampak yang signifikan dari perubahan budaya dalam era globalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ohmae (2018), globalisasi telah menghasilkan "masyarakat tanpa batas," di mana arus informasi, modal, dan tenaga kerja bergerak bebas di seluruh dunia, menyebabkan perubahan dalam cara individu dan kelompok mengalami dan memahami budaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks globalisasi, batas-batas tradisional seperti batas geografis dan budaya menjadi semakin kabur dan tidak relevan.

Held *et al.* (2020) membahas bahwa penghapusan batas-batas tradisional juga mempengaruhi dinamika kekuasaan dan identitas di masyarakat, mencatat bahwa dalam masyarakat global yang semakin terhubung, kekuasaan dan otoritas tidak lagi sepenuhnya terpusat pada entitas nasional atau lokal, tetapi juga tersebar di antara jaringan global yang kompleks. Hal ini menghasilkan transformasi dalam konstruksi identitas individu dan kelompok, yang semakin mencerminkan pengalaman global yang terhubung.

c. Konflik Identitas

Konflik identitas menjadi dampak yang signifikan dari perubahan budaya dalam era globalisasi. Menurut Appiah (2018), "dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global, pertanyaan tentang identitas individu dan kelompok menjadi semakin kompleks." Hal ini mencerminkan kompleksitas yang muncul ketika individu dihadapkan pada beragam pengaruh budaya dari seluruh dunia, yang dapat menimbulkan konflik internal dalam menentukan identitas.

Hall (2020) membahas bahwa konflik identitas juga dapat dipicu oleh pertentangan antara identitas lokal dan identitas global. Dia mencatat bahwa dalam era globalisasi, individu dan kelompok sering kali merasa tertekan antara mempertahankan akar budaya dan tradisi lokal dan mengadopsi norma-norma dan

nilai-nilai global yang diimpor. Hal ini dapat menyebabkan konflik internal dan eksternal tentang bagaimana menentukan identitas yang sesuai.

d. Peningkatan Kesadaran Budaya

Peningkatan kesadaran budaya menjadi dampak penting dari perubahan budaya dalam era globalisasi. Menurut Said (2016), "globalisasi telah memperluas wawasan kita tentang keragaman budaya di seluruh dunia, menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan perspektif budaya yang berbeda." Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin terhubungnya dunia, individu dan masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap budaya-budaya lain, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran budaya secara keseluruhan.

Nussbaum (2019) membahas bahwa peningkatan kesadaran budaya juga memunculkan minat yang lebih besar dalam mempelajari dan merespons perbedaan budaya. Dia mencatat bahwa dalam era globalisasi, terdapat peningkatan dalam studi budaya komparatif, antropologi budaya, dan dialog antarbudaya, yang semuanya mengindikasikan minat yang meningkat dalam memahami dan menghargai keanekaragaman budaya di seluruh dunia. Hal ini mencerminkan pergeseran menuju sikap yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan budaya.

e. Perubahan Nilai dan Norma

Perubahan nilai dan norma menjadi dampak yang signifikan dari perubahan budaya dalam era globalisasi. Menurut Fukuyama (2018), "globalisasi telah menghasilkan pertukaran nilai-nilai dan norma-norma budaya di seluruh dunia, menciptakan kondisi di mana norma-norma lokal sering kali berbenturan dengan norma-norma global." Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin terhubungnya dunia, nilai-nilai dan norma-norma budaya menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh dari berbagai budaya lain, yang pada gilirannya menghasilkan perubahan dalam cara individu dan masyarakat memandang dan mempraktikkan nilai-nilai.

Huntington (2020) membahas fenomena "konflik nilai," di mana perbedaan nilai-nilai antara budaya-budaya yang berbeda dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Dia menekankan



bahwa dalam era globalisasi, konflik nilai semakin menjadi sumber ketidakstabilan dan ketegangan di antara masyarakat yang berbeda, menciptakan tantangan bagi upaya membangun pemahaman dan kerjasama lintas budaya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai dan norma budaya tidak selalu harmonis, tetapi sering kali memicu ketegangan dan pergeseran dalam dinamika sosial.

## **B. Migrasi Dan Mobilitas Penduduk**

Globalisasi telah menjadi pendorong utama bagi fenomena migrasi dan mobilitas penduduk di era modern. Dalam konteks ini, migrasi mencakup perpindahan manusia antar negara, baik secara legal maupun ilegal, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial. Di sisi lain, mobilitas penduduk merujuk pada pergerakan dalam skala lokal hingga global, seperti urbanisasi dan transmigrasi, yang berdampak pada struktur sosial dan ekonomi suatu wilayah. Migrasi dan mobilitas penduduk dalam konteks globalisasi memiliki implikasi yang kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Dampaknya tidak hanya terasa di negara asal dan tujuan, tetapi juga secara global dalam hal perdagangan, budaya, dan lingkungan. Fenomena ini membentuk pola hubungan antar negara dan kelompok-kelompok sosial, menciptakan tantangan baru dalam mengelola keragaman, serta meningkatkan ketegangan dan kerjasama di tingkat internasional.

### **1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi dan Mobilitas Penduduk**

Dampak globalisasi terhadap migrasi dan mobilitas penduduk menjadi perhatian utama dalam konteks sosial. Pertama, faktor ekonomi berperan kunci dalam mempengaruhi keputusan individu untuk berpindah tempat tinggal, di mana peluang pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi menjadi faktor penentu yang kuat. Selain itu, faktor sosial seperti konflik, perubahan iklim, dan krisis kemanusiaan juga berdampak signifikan, mendorong perpindahan populasi secara massal.

#### **a. Ekonomi**

Ekonomi berperan penting dalam menentukan migrasi dan mobilitas penduduk. Menurut Ravallion (2016), faktor ekonomi

seperti tingkat penghasilan, kesempatan kerja, dan kondisi pasar tenaga kerja menjadi dorongan utama di balik keputusan individu untuk bermigrasi. Data dari World Bank (2018) menunjukkan bahwa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung menarik lebih banyak migran karena menjanjikan peluang ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, negara dengan resesi ekonomi atau tingkat pengangguran tinggi mungkin mengalami emigrasi yang lebih tinggi karena kurangnya kesempatan kerja dan penurunan daya beli. Pendapatan yang lebih tinggi di negara tujuan seringkali menjadi magnet bagi migran, seperti yang diungkapkan oleh Kritz *et al.* (2020), yang menyebutnya sebagai "teori gravitasi ekonomi" dalam konteks migrasi internasional. Dengan demikian, kondisi ekonomi yang berubah dapat menjadi faktor kunci dalam mengarahkan arus migrasi global.

Distribusi ekonomi juga mempengaruhi migrasi internal di dalam suatu negara. Menurut Harris dan Todaro (2018), ketimpangan regional dalam pembangunan ekonomi seringkali memicu migrasi penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih makmur, dalam upaya mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Hal ini diperkuat oleh penelitian oleh Massey *et al.* (2016) yang membahas peran ketimpangan pembangunan regional dalam membentuk pola migrasi internal di negara-negara berkembang. Selain itu, infrastruktur ekonomi yang berkembang di satu wilayah dapat menarik migran dari wilayah lain, seperti yang diamati oleh Dearden dan Reed (2017) dalam konteks migrasi antar kota di dalam suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang tidak merata dapat menjadi pemicu utama mobilitas penduduk di dalam suatu negara.

b. Konflik dan Perang

Konflik dan perang memiliki dampak yang signifikan terhadap migrasi dan mobilitas penduduk di berbagai belahan dunia. Menurut UNHCR (2019), konflik bersenjata dapat menyebabkan pengungsi dan pencari suaka melarikan diri dari daerah konflik untuk mencari perlindungan dan keamanan di negara lain. Data dari International Crisis Group (2021) menunjukkan bahwa konflik bersenjata juga dapat memaksa penduduk lokal untuk mengungsi secara internal, meninggalkan

rumah dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, ketidakstabilan politik dan keamanan yang disebabkan oleh konflik dapat mempengaruhi mobilitas penduduk di dalam suatu negara, seperti yang terjadi dalam konflik etnis di beberapa negara Afrika dan Asia. Dengan demikian, konflik bersenjata menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi arus migrasi global.

Perang sipil dan konflik antar negara juga dapat menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi penduduk untuk tinggal di wilayahnya sendiri. Menurut Betts (2017), perang sipil sering kali mengakibatkan kerusakan infrastruktur, ketidakamanan, dan kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar, yang mendorong banyak penduduk untuk mencari perlindungan di tempat lain. Penelitian oleh Collier dan Hoeffler (2018) menunjukkan bahwa perang sipil juga dapat memicu migrasi paksa dalam skala besar, mengakibatkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan kehidupan yang stabil. Oleh karena itu, perang sipil dan konflik antar negara tidak hanya mempengaruhi mobilitas penduduk di tingkat nasional, tetapi juga dapat menyebabkan migrasi lintas batas yang signifikan.

c. Perubahan Lingkungan

Perubahan lingkungan telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi migrasi dan mobilitas penduduk di era modern. Menurut IPCC (2019), perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian penduduk, mendorong untuk mencari perlindungan di tempat lain. Penelitian oleh McLeman dan Hunter (2017) menunjukkan bahwa perubahan lingkungan juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang vital bagi kehidupan manusia, seperti berkurangnya sumber daya air dan tanah subur, yang memaksa penduduk untuk bermigrasi ke tempat yang lebih berkelanjutan. Selain itu, perubahan iklim dapat memicu konflik atas sumber daya alam yang tersedia, seperti yang terjadi di beberapa wilayah Afrika dan Asia, yang dapat memperburuk situasi migrasi.

Perubahan iklim juga dapat memengaruhi mobilitas penduduk melalui faktor-faktor seperti penurunan produktivitas pertanian,

kerusakan infrastruktur, dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Menurut Black *et al.* (2018), perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian dan ketidakpastian pangan, yang mendorong banyak orang untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik di tempat lain. Selain itu, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam atau perubahan iklim dapat menghambat akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, yang juga dapat menjadi faktor dalam keputusan untuk bermigrasi. Oleh karena itu, perubahan lingkungan memiliki dampak yang kompleks terhadap dinamika migrasi dan mobilitas penduduk.

d. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya berperan penting dalam membentuk pola migrasi dan mobilitas penduduk di seluruh dunia. Menurut Castles dan Miller (2018), faktor-faktor seperti ikatan keluarga, jaringan sosial, dan identitas budaya dapat menjadi dorongan atau hambatan bagi individu dalam mengambil keputusan untuk bermigrasi. Penelitian oleh Vertovec (2017) membahas pentingnya diaspora dan komunitas transnasional dalam memfasilitasi migrasi dan integrasi sosial di tempat tujuan. Selain itu, norma sosial dan nilai budaya juga dapat memengaruhi preferensi migrasi individu, seperti preferensi untuk tinggal di lingkungan yang mirip secara budaya atau agama.

Faktor-faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi integrasi dan adaptasi penduduk yang baru saja bermigrasi. Menurut Berry (2017), perbedaan budaya dan nilai-nilai sosial antara penduduk asli dan pendatang dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam integrasi sosial dan ekonomi. Penelitian oleh Portes dan Rumbaut (2020) membahas pentingnya pembangunan kapasitas dalam mengatasi hambatan integrasi sosial dan budaya bagi imigran, seperti pemberdayaan pendidikan dan pelatihan kerja. Selain itu, faktor-faktor sosial seperti diskriminasi dan rasisme juga dapat mempengaruhi mobilitas penduduk dan pembentukan komunitas di tempat tujuan.

## **2. Dampak Sosial Globalisasi terhadap Migrasi dan Mobilitas Penduduk**

Di era globalisasi yang terus berkembang, fenomena migrasi dan mobilitas penduduk menjadi semakin kompleks dan signifikan dalam konteks sosial. Globalisasi memperluas aksesibilitas dan konektivitas antarnegara, mendorong perpindahan manusia secara besar-besaran. Dampaknya terlihat dalam perubahan struktur sosial, inklusi budaya, dan distribusi ekonomi di berbagai belahan dunia. Di satu sisi, migrasi membawa potensi pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi budaya, tetapi di sisi lain, juga menimbulkan tantangan terhadap identitas sosial, integrasi komunitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

### **a. Diversitas Budaya**

Diversitas budaya telah menjadi salah satu dampak signifikan dari globalisasi terhadap migrasi dan mobilitas penduduk di era modern. Menurut Appadurai (2016), globalisasi telah memfasilitasi pertukaran budaya yang lebih luas dan cepat, yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih multikultural di berbagai belahan dunia. Penelitian oleh Vertovec (2018) membahas peran penting diaspora dan transnasionalisme dalam membawa beragam budaya dan tradisi ke tempat tujuan, memperkaya keragaman budaya di komunitas tersebut. Dalam konteks migrasi, globalisasi telah membuka pintu bagi individu untuk membahas dan mengadopsi berbagai aspek budaya baru di tempat tujuan, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan beragam.

Diversitas budaya yang dihasilkan oleh globalisasi juga memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap integrasi dan identitas sosial di masyarakat. Menurut Kymlicka (2019), keragaman budaya dapat memicu tantangan dan kesempatan dalam pembentukan identitas kolektif dan inklusi sosial di tempat tujuan migran. Penelitian oleh Castles (2020) membahas pentingnya kebijakan inklusif dan kerja sama antarbudaya dalam mengelola keragaman budaya yang kompleks di masyarakat yang semakin global. Selain itu, keragaman budaya juga dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan sosial jika tidak dikelola dengan baik, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus konflik identitas dan etnis di beberapa negara.

b. Tantangan Integrasi

Tantangan integrasi menjadi salah satu dampak sosial globalisasi yang signifikan terhadap migrasi dan mobilitas penduduk di era modern. Menurut Castles (2018), integrasi sosial dan budaya dari pendatang di masyarakat tujuan dapat menjadi kompleks dan sulit karena perbedaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai sosial. Penelitian oleh Alba dan Foner (2017) membahas peran penting institusi sosial, seperti sekolah dan tempat ibadah, dalam memfasilitasi integrasi pendatang ke dalam masyarakat tujuan. Selain itu, konflik identitas dan diskriminasi rasial juga dapat menjadi hambatan serius dalam proses integrasi sosial dan ekonomi pendatang di tempat baru. Integrasi ekonomi juga menjadi masalah penting dalam konteks migrasi dan mobilitas penduduk. Menurut Massey *et al.* (2019), ketidaksetaraan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang sering kali menyebabkan ketegangan dan konflik di pasar tenaga kerja, yang dapat menghambat integrasi ekonomi pendatang di tempat tujuan. Penelitian oleh Dustmann *et al.* (2018) membahas perlunya kebijakan yang mengurangi hambatan-hambatan ekonomi, seperti diskriminasi dalam akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, untuk memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih baik bagi pendatang. Selain itu, perubahan dalam struktur ekonomi global, seperti digitalisasi dan robotisasi, juga dapat membawa tantangan baru dalam integrasi ekonomi pendatang di pasar tenaga kerja.

c. Konflik Identitas

Konflik identitas menjadi dampak sosial yang signifikan dari globalisasi terhadap migrasi dan mobilitas penduduk. Menurut Hall (2017), globalisasi telah mempercepat pertukaran budaya dan nilai-nilai, yang dapat memicu konflik antara identitas lokal tradisional dan identitas global yang baru. Penelitian oleh Giddens (2019) membahas kompleksitas konflik identitas dalam konteks globalisasi, di mana individu sering kali harus berhadapan dengan tuntutan untuk mempertahankan identitas budaya sambil beradaptasi dengan budaya global yang dominan. Selain itu, konflik identitas juga dapat muncul dalam konteks migrasi, di mana individu sering kali mengalami ketegangan antara identitas asal dan identitas baru di tempat tujuan.

Dampak konflik identitas terhadap migrasi dan mobilitas penduduk dapat menciptakan tantangan signifikan dalam proses integrasi sosial dan budaya. Menurut Castles dan Davidson (2018), konflik identitas dapat memperumit proses adaptasi dan integrasi penduduk migran di tempat tujuan, karena sering menghadapi diskriminasi atau penolakan oleh masyarakat lokal. Penelitian oleh Wimmer (2020) membahas pentingnya mengakui dan mengelola konflik identitas dalam konteks migrasi sebagai langkah awal menuju integrasi sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang konflik identitas dapat membantu dalam merancang kebijakan migrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

d. Remitansi

Remitansi merupakan dampak sosial globalisasi yang signifikan terhadap migrasi dan mobilitas penduduk di era modern. Menurut World Bank (2019), remitansi adalah transfer uang yang dikirim oleh para migran kepada keluarga atau individu di negara asal, dan telah menjadi sumber penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di banyak negara berkembang. Penelitian oleh Ratha *et al.* (2018) membahas kontribusi remitansi dalam membangun infrastruktur sosial dan ekonomi di komunitas asal migran, termasuk pendidikan, kesehatan, dan investasi dalam usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, remitansi memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup dan pembangunan di negara-negara penerima.

Remitansi juga dapat mempengaruhi dinamika sosial di komunitas asal migran, terutama dalam hal struktur sosial dan kekuatan ekonomi. Menurut Orozco (2017), remitansi dapat mengubah hierarki sosial di masyarakat asal migran dengan memberikan kekuatan ekonomi kepada keluarga yang menerima, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan status di dalam masyarakat. Penelitian oleh Faist (2020) membahas peran remitansi dalam membentuk pola konsumsi dan gaya hidup di komunitas asal migran, yang dapat menciptakan tekanan sosial bagi individu untuk bergantung pada pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja di luar negeri.

e. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi merupakan dampak sosial globalisasi yang signifikan terhadap migrasi dan mobilitas penduduk di berbagai belahan dunia. Menurut Piketty (2014), globalisasi ekonomi cenderung meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan antara negara-negara maju dan berkembang, serta di dalam negara-negara itu sendiri. Hal ini dapat menciptakan tekanan ekonomi yang mendorong individu untuk bermigrasi mencari peluang ekonomi yang lebih baik di tempat lain. Penelitian oleh Milanovic (2016) membahas fenomena "pengasingan global" di mana kelompok-kelompok penduduk tertentu, terutama di negara-negara maju, mengalami kenaikan pendapatan yang lebih cepat daripada kelompok lain, meningkatkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Dampak kesenjangan ekonomi terhadap migrasi dapat terlihat dalam pola migrasi yang cenderung dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi antara negara-negara. Menurut Hatton dan Williamson (2019), migrasi sering kali terjadi dari negara dengan tingkat upah rendah dan kesempatan ekonomi terbatas menuju negara-negara yang menawarkan upah yang lebih tinggi dan peluang ekonomi yang lebih baik. Penelitian oleh Barro (2015) membahas peran penting pendidikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan menopang mobilitas sosial, yang dapat mempengaruhi keputusan migrasi individu dan keluarga dalam jangka panjang.

### **C. Tantangan Kesejahteraan Sosial**

Dampak sosial globalisasi telah menjadi sorotan utama dalam konteks kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, kemajuan teknologi, dan integrasi pasar global telah membawa tantangan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Perubahan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya, meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi di antara negara-negara dan dalam masyarakat yang sama. Sementara itu, arus informasi dan budaya yang tanpa henti juga membawa implikasi sosial yang kompleks, seperti homogenisasi budaya dan identitas, serta ancaman terhadap keberagaman budaya



lokal. Selain itu, globalisasi juga mempercepat perubahan gaya hidup dan nilai-nilai, yang dapat mengakibatkan ketegangan sosial dan ketidakstabilan mental di kalangan individu dan kelompok yang merasa terpinggirkan. Di tengah dinamika globalisasi, ada sejumlah tantangan yang timbul terkait dengan kesejahteraan sosial, antara lain:

### **1. Kesenjangan Ekonomi**

Kesenjangan ekonomi menjadi salah satu tantangan kesejahteraan sosial yang signifikan dalam dampak sosial globalisasi. Globalisasi, dengan menghubungkan ekonomi dan pasar secara global, telah memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi beberapa negara dan kelompok, namun pada saat yang sama, telah meningkatkan kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang serta di dalam masyarakat yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh Milanovic (2016), "Globalisasi telah meningkatkan kesenjangan pendapatan antara negara-negara, serta dalam negara-negara tersebut sendiri." Hal ini terjadi karena globalisasi cenderung memberikan keuntungan yang lebih besar bagi yang sudah memiliki modal, keterampilan, dan akses pasar yang luas.

Kesenjangan ekonomi ini memperburuk masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Menurut Stiglitz (2015), "Kesenjangan ekonomi yang semakin membesar dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan." Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang sering kali terkait dengan kesenjangan ekonomi, dapat menciptakan lingkungan di mana mobilitas sosial terhambat dan kesempatan yang sama tidak terwujud.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat yang rentan. Acemoglu dan Robinson (2019) menekankan, "Perlu adanya reformasi kebijakan ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan akses terhadap kesempatan ekonomi dan sosial bagi semua lapisan masyarakat." Langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan kerja, perlindungan sosial, serta penguatan infrastruktur ekonomi di daerah-daerah terpinggirkan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

## **2. Pengangguran dan Ketidakpastian Pekerjaan**

Pengangguran dan ketidakpastian pekerjaan menjadi tantangan kesejahteraan sosial yang penting dalam dampak sosial globalisasi. Dampak globalisasi terhadap struktur pasar dan teknologi telah mengubah landscape pekerjaan secara signifikan, meningkatkan ketidakpastian pekerjaan, dan menciptakan tekanan pada pasar tenaga kerja. Seperti yang disoroti oleh Autor (2015), "Globalisasi telah menyebabkan terjadinya polarisasi pekerjaan, dengan pekerjaan tingkat rendah dan tingkat tinggi mengalami pertumbuhan, sementara pekerjaan tengah mengalami penurunan." Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran struktural dan kesulitan bagi pekerja dengan keterampilan yang kurang relevan.

Ketidakpastian pekerjaan juga dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi rumah tangga dan meningkatkan risiko kemiskinan. Menurut Standing (2016), "Pekerjaan tidak tetap dan tidak pasti semakin umum terjadi akibat globalisasi, yang dapat mengakibatkan kerentanan ekonomi yang lebih besar bagi pekerja dan keluarga." Selain itu, globalisasi juga telah mempercepat perkembangan teknologi, seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan, yang dapat menggantikan pekerja manusia dengan mesin, meningkatkan ketidakpastian pekerjaan di berbagai sektor.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang mampu mengurangi ketidakpastian pekerjaan dan meningkatkan keamanan ekonomi bagi pekerja. Menurut Sachs (2019), "Perlindungan sosial yang lebih baik, pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, serta dukungan untuk kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru dapat membantu mengatasi tantangan pengangguran dan ketidakpastian pekerjaan dalam era globalisasi." Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga internasional juga diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap perubahan pasar tenaga kerja yang cepat dan dinamis.

## **3. Kehilangan Identitas Budaya**

Kehilangan identitas budaya menjadi tantangan kesejahteraan sosial yang nyata dalam dampak sosial globalisasi. Globalisasi sering kali menyebabkan homogenisasi budaya, di mana nilai-nilai lokal dan tradisi kultural dapat terancam oleh dominasi budaya global. Seperti

yang dinyatakan oleh Hannerz (2016), "Globalisasi sering kali dianggap sebagai ancaman bagi keberagaman budaya, karena penyebaran budaya konsumsi global dapat mengaburkan identitas lokal." Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya warisan budaya yang berharga dan merusak rasa identitas masyarakat.

Dominasi budaya global juga dapat memicu ketidakseimbangan kekuasaan antara negara-negara dan kelompok budaya, dengan negara-negara besar atau budaya dominan menguasai pasar budaya global. Menurut Appadurai (2018), "Globalisasi budaya sering kali diwarnai oleh dominasi budaya dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dominan, yang dapat meredam ekspresi budaya lokal." Hal ini dapat menyebabkan perasaan inferioritas dan kehilangan identitas bagi kelompok-kelompok budaya yang kurang terwakili dalam panggung global.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk memperkuat upaya pelestarian dan promosi keberagaman budaya. Menurut UNESCO (2020), "Perlindungan dan promosi keberagaman budaya menjadi kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi terhadap identitas budaya." Inisiatif seperti pendidikan multikultural, dukungan terhadap seni dan budaya lokal, serta promosi pertukaran budaya antarbangsa dapat membantu memelihara identitas budaya yang unik dan memperkaya kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, penting bagi negara-negara untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung produksi dan distribusi budaya lokal, serta mendorong dialog antarbudaya yang inklusif dan saling menghormati.

#### **4. Krisis Lingkungan**

Krisis lingkungan merupakan tantangan kesejahteraan sosial yang sangat signifikan dalam dampak sosial globalisasi. Globalisasi telah mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan produksi industri, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan perubahan iklim yang tidak terkendali. Seperti yang dijelaskan oleh Stern (2016), "Perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini, dengan dampak yang meluas dan serius terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi." Hal ini menciptakan tekanan tambahan pada masyarakat yang sudah rentan, seperti komunitas pesisir, petani, dan penduduk asli, yang sering kali menjadi

korban utama dari bencana lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Krisis lingkungan juga memperburuk ketimpangan global antara negara-negara maju dan berkembang dalam akses terhadap sumber daya alam dan dampak lingkungan. Menurut Ghosh (2017), "Globalisasi telah meningkatkan eksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang oleh perusahaan multinasional, meningkatkan kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan dampak lingkungan antara negara-negara." Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kerentanan terhadap krisis lingkungan, dengan negara-negara berkembang sering kali menghadapi konsekuensi yang lebih besar tanpa memiliki sumber daya untuk mengatasi atau memulihkan diri dari dampak tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama global yang kuat dan kebijakan yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan pembangunan ekonomi. Menurut IPCC (2018), "Diperlukan tindakan segera dan komprehensif dari semua pihak, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim." Langkah-langkah seperti investasi dalam energi terbarukan, perlindungan ekosistem alami, dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu didorong secara bersama-sama untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi semua orang.

## **5. Migrasi dan Mobilitas Penduduk**

Migrasi dan mobilitas penduduk menjadi tantangan kesejahteraan sosial yang penting dalam dampak sosial globalisasi. Globalisasi telah memperluas akses ke informasi, peluang pekerjaan, dan hubungan antarbangsa, yang dapat memicu gelombang migrasi manusia yang besar-besaran. Seperti yang dinyatakan oleh Castles (2018), "Globalisasi telah menciptakan dorongan besar bagi migrasi manusia, baik secara sukarela maupun terpaksa, karena perubahan ekonomi, konflik, atau perubahan lingkungan." Hal ini dapat menimbulkan tantangan sosial, seperti integrasi sosial, ketegangan antarbudaya, dan peningkatan ketidakstabilan ekonomi dan politik di wilayah penerima migran.

Di sisi lain, mobilitas penduduk juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara-negara tujuan migrasi, melalui kontribusinya terhadap pasar tenaga kerja dan keragaman budaya. Menurut Ruhs (2017), "Migran sering kali menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi di negara-negara tujuan, dengan kontribusinya terhadap tenaga kerja, pajak, dan konsumsi." Namun demikian, tantangan seperti peningkatan persaingan di pasar tenaga kerja, pengeluaran publik untuk layanan sosial dan integrasi, serta meningkatnya polarisasi politik sering kali muncul sebagai hasil dari mobilitas penduduk yang besar.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengelola migrasi dan mobilitas penduduk. Menurut UN (2020), "Diperlukan kerjasama internasional yang kuat dalam mengembangkan kebijakan migrasi yang mempromosikan keadilan, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua migran." Langkah-langkah seperti memperkuat sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka, meningkatkan integrasi sosial dan ekonomi bagi migran, serta memfasilitasi mobilitas penduduk yang aman dan teratur dapat membantu mengurangi dampak negatif dan meningkatkan manfaat positif dari migrasi dan mobilitas penduduk.

## **6. Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan masyarakat menjadi tantangan kesejahteraan sosial yang signifikan dalam dampak sosial globalisasi. Globalisasi telah mengubah pola penyakit, persebaran penyakit menular, dan akses terhadap layanan kesehatan secara global. Seperti yang diungkapkan oleh Kickbusch (2016), "Globalisasi meningkatkan konektivitas antarbangsa, yang dapat mempercepat penyebaran penyakit menular dan menciptakan tantangan baru dalam pengendalian penyakit." Hal ini memperkuat perlunya kerjasama internasional dalam menanggapi krisis kesehatan global, seperti pandemi, yang membutuhkan koordinasi antarnegara dan lembaga kesehatan global.

Di samping itu, globalisasi juga memengaruhi determinan kesehatan masyarakat, seperti pola diet, gaya hidup, dan lingkungan kerja. Menurut Labonté (2019), "Globalisasi ekonomi dapat mengarah pada perubahan dalam pola diet dan aktivitas fisik, yang dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti obesitas dan

penyakit jantung." Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mengintegrasikan aspek kesehatan dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan untuk memastikan bahwa dampak globalisasi pada kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di era globalisasi. Menurut WHO (2023), "Diperlukan kebijakan yang mempromosikan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, termasuk pendekatan intersektoral yang mengatasi determinan kesehatan yang mendasarinya." Langkah-langkah seperti memperkuat sistem kesehatan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta mempromosikan pola hidup sehat dan kesadaran akan kesehatan dapat membantu mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kesehatan masyarakat yang lebih baik.



# **BAB VI**

## **DAMPAK POLITIK GLOBALISASI**

---

Dampak politik globalisasi mencerminkan transformasi dalam dinamika kekuasaan dan hubungan antarnegara di era global yang semakin terhubung. Pertama-tama, globalisasi telah mempengaruhi struktur politik dengan menciptakan tekanan untuk lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam sistem pemerintahan. Hal ini memicu tuntutan untuk demokratisasi yang lebih luas dan mendalam di berbagai negara, sementara juga memperkuat peran organisasi internasional dalam mengatur isu-isu global. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menciptakan tantangan terkait dengan kedaulatan negara dan kebijakan domestik, dengan beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa globalisasi dapat mengurangi otonomi negara dalam mengambil keputusan politik yang sesuai dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang dampak politik globalisasi menjadi penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan dalam menghadapi dinamika politik global yang kompleks.

### **A. Perubahan Dalam Dinamika Kekuasaan Politik**

Dinamika kekuasaan politik globalisasi menjadi subjek yang semakin relevan dalam era kontemporer ini. Globalisasi telah membawa transformasi mendalam dalam cara negara-negara berinteraksi dan berkompetisi dalam ranah politik. Fenomena ini menandai transisi dari sistem internasional yang didominasi oleh negara-negara tunggal menjadi sebuah arena di mana kekuatan tidak hanya terpusat pada negara-negara besar, tetapi juga tersebar di antara berbagai aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil.

Perubahan dalam dinamika kekuasaan politik globalisasi juga tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan yang semakin

kompleks dan terfragmentasi. Kekuatan ekonomi dan teknologi yang berkembang pesat telah memberikan akses yang lebih besar kepada aktor-aktor non-negara dalam menentukan arah kebijakan global. Di samping itu, isu-isu seperti perdagangan bebas, lingkungan, dan keamanan menjadi semakin terkait secara global, memaksa negara-negara untuk berkolaborasi melintasi batas-batas nasional. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan kepentingan di tingkat global, sementara juga memberikan peluang untuk membangun kemitraan baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **1. Transformasi Kekuatan Politik**

Transformasi kekuatan politik dalam dinamika kekuasaan politik globalisasi menandai perkembangan yang signifikan dalam konteks geopolitik dunia saat ini. Globalisasi telah mengubah lanskap politik secara fundamental dengan memperkenalkan dinamika baru yang memengaruhi cara negara-negara dan aktor non-negara berinteraksi dan bersaing. Fenomena ini menciptakan tantangan serta peluang yang tidak terduga dalam distribusi kekuatan politik di tingkat internasional.

#### **a. Dinamika Kekuasaan Konvensional**

Dinamika kekuasaan konvensional melibatkan pergeseran paradigma dalam politik globalisasi, di mana kekuatan politik tradisional beradaptasi dengan konteks yang semakin terhubung secara global. Menurut Mearsheimer (2019), dalam era globalisasi, kekuatan politik konvensional tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan faktor ekonomi, teknologi, dan pengaruh soft power. Wendt (2016) menambahkan bahwa transformasi kekuatan politik ini terlihat dalam hubungan antar negara, di mana kerjasama ekonomi dan diplomasi semakin memengaruhi dinamika kekuasaan. Dalam konteks ini, Rosecrance (2018) menekankan pentingnya keterlibatan aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional, dalam pembentukan kekuatan politik global. Dengan demikian, dinamika kekuasaan konvensional tidak lagi terbatas pada interaksi antar negara, melainkan juga mencakup berbagai aktor non-negara yang berperan dalam politik global.



Perubahan dalam dinamika kekuasaan konvensional juga mencakup adaptasi strategi keamanan nasional negara-negara dalam menghadapi tantangan baru dalam politik globalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Walt (2019), kekuatan militer tetap menjadi aspek penting dalam kebijakan luar negeri, namun negara-negara juga harus memperhitungkan ancaman non-militer seperti serangan cyber dan propaganda informasi. Huntington (2017) membahas konsep "perang kecil" yang muncul dalam dinamika kekuasaan konvensional, di mana konflik berskala kecil antara negara atau kelompok dapat memiliki dampak yang signifikan dalam politik global. Hal ini menunjukkan bahwa strategi keamanan nasional harus mengakomodasi beragam ancaman yang muncul dalam konteks globalisasi yang kompleks. Dalam hal ini, adaptasi dan fleksibilitas menjadi kunci dalam menjaga kekuatan politik suatu negara di era globalisasi.

b. Pergeseran Kekuatan

Pergeseran kekuatan dalam dinamika politik globalisasi menggambarkan transformasi fundamental dalam cara kekuatan politik dipahami dan diimplementasikan. Menurut Keohane (2017), pergantian paradigma ini mencerminkan penyesuaian terhadap kompleksitas hubungan internasional yang semakin terhubung dan saling bergantung. Keohane juga membahas bahwa kekuatan politik tidak hanya berasal dari negara-negara besar, tetapi juga dari aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik global. Dengan demikian, pergantian kekuatan tidak lagi terbatas pada dimensi militer atau politik semata, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, teknologi, dan budaya.

Pergeseran kekuatan juga menciptakan tantangan baru dalam dinamika politik globalisasi, terutama terkait dengan peningkatan kompleksitas dan ketidakpastian dalam hubungan internasional. Menurut Nye (2018), konsep kekuatan lunak atau soft power menjadi semakin relevan dalam konteks ini, di mana kemampuan untuk memengaruhi dan memperoleh kepercayaan menjadi kunci dalam mencapai tujuan politik. Selain itu, Brzezinski (2020) menekankan bahwa teknologi informasi dan

komunikasi telah mempercepat pergeseran kekuatan dengan memfasilitasi akses informasi dan konektivitas global yang lebih luas. Oleh karena itu, pergantian kekuatan tidak hanya mempengaruhi struktur kekuatan politik, tetapi juga menuntut adaptasi dalam strategi politik dan diplomasi.

c. Peran Negara-Negara Berkembang

Peran negara-negara berkembang dalam dinamika kekuasaan politik globalisasi menjadi semakin signifikan seiring dengan perubahan dalam struktur kekuatan dunia. Menurut Sachs (2016), negara-negara berkembang seperti Tiongkok, India, dan Brasil menjadi aktor utama dalam menentukan arah perkembangan ekonomi dan politik global. Sachs juga membahas bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara berkembang memberikan dorongan baru bagi partisipasi dalam agenda global. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang memiliki potensi untuk membentuk koalisi politik baru yang dapat mempengaruhi keputusan politik global.

Peran negara-negara berkembang juga mencakup upaya untuk mengejar kemandirian politik dan ekonomi, serta meningkatkan representasi dalam lembaga-lembaga internasional. Menurut Bhagwati (2019), negara-negara berkembang berusaha untuk mendapatkan peran yang lebih berpengaruh dalam organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan WTO untuk mengartikulasikan kepentingan secara lebih efektif. Bhagwati juga menekankan bahwa negara-negara berkembang memiliki kepentingan yang berbeda dari negara-negara maju dalam hal perdagangan, lingkungan, dan pembangunan, yang perlu diakomodasi dalam kebijakan global. Oleh karena itu, peran negara-negara berkembang bukan hanya sebagai penerima bantuan atau objek pembangunan, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam membentuk tatanan politik global.

## **2. Perubahan dalam Dinamika Kekuasaan Politik**

Perubahan dalam dinamika kekuasaan politik globalisasi adalah fenomena yang semakin mendominasi panggung geopolitik dunia saat ini. Seiring dengan perkembangan globalisasi, terjadi pergeseran dalam cara negara-negara dan entitas non-negara berkompetisi dan berkolaborasi. Hal ini menciptakan sebuah lingkungan politik yang

kompleks, di mana kekuatan tidak hanya terpusat pada negara-negara besar, tetapi juga tersebar di antara berbagai aktor global yang memiliki pengaruh yang signifikan.

a. Transisi Kekuasaan

Transisi kekuasaan dalam dinamika politik globalisasi mengacu pada pergeseran kekuatan politik antara negara-negara dan aktor-aktor non-negara dalam konteks global yang terus berubah. Menurut Joseph Nye (2015), fenomena ini terjadi ketika kekuatan ekonomi, militer, dan soft power suatu negara mengalami perubahan yang signifikan. Dalam konteks ini, John Ikenberry (2017) membahas bahwa globalisasi telah membuka ruang bagi aktor-aktor non-negara, seperti korporasi multinasional dan organisasi non-pemerintah, untuk mempengaruhi dinamika kekuasaan global. Seiring dengan itu, Robert Keohane (2019) menekankan bahwa transisi kekuasaan tidak hanya terjadi antara negara-negara besar, tetapi juga melibatkan negara-negara berkembang dan kelompok-kelompok kecil yang semakin aktif dalam urusan global.

Perubahan dalam dinamika kekuasaan politik globalisasi juga tercermin dalam transformasi struktur kekuatan di tingkat regional. Menurut Amitav Acharya (2018), regionalisme yang semakin kuat telah menjadi faktor penting dalam membentuk distribusi kekuasaan di level global. Peter Katzenstein (2020) menambahkan bahwa regionalisme menghasilkan jaringan-jaringan kekuatan yang kompleks, yang dapat mempengaruhi kebijakan global dan tata kelola. Sebagai contoh, Michael Cox (2016) menunjukkan bahwa Uni Eropa, dengan integrasinya yang mendalam, telah menjadi aktor penting dalam transisi kekuasaan global, meskipun masih ada perdebatan tentang seberapa efektifnya dalam mewujudkan kepentingan kolektif.

b. Pengaruh Aktor Non-Negara

Pengaruh aktor non-negara dalam dinamika kekuasaan politik globalisasi menjadi semakin signifikan seiring dengan perkembangan globalisasi. Menurut Joseph Nye (2015), kehadiran aktor-aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional dan organisasi non-pemerintah, telah mengubah lanskap politik global dengan memperluas ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. George Soros (2018)

menekankan bahwa lembaga-lembaga keuangan global dan miliarder filantropis seperti dirinya memiliki potensi untuk memengaruhi agenda politik dan ekonomi di tingkat global. Sementara itu, Noam Chomsky (2021) memperingatkan bahwa pengaruh besar korporasi dalam politik global dapat menggerus kedaulatan negara-negara dan memperburuk kesenjangan sosial global.

Aktivisme aktor non-negara juga telah membentuk opini publik global dan memobilisasi aksi politik. Menurut Naomi Klein (2017), gerakan anti-globalisasi dan kampanye lingkungan yang didukung oleh organisasi non-pemerintah telah menjadi kekuatan penting dalam menentang hegemoni politik dan ekonomi global. Michael Hardt dan Antonio Negri (2019) membahas peran penting gerakan sosial dan kelompok advokasi dalam menciptakan tekanan politik untuk perubahan kebijakan di tingkat nasional dan internasional. Dalam konteks ini, aktor non-negara seperti Greenpeace dan Amnesty International telah mampu memperjuangkan agenda-agenda tertentu yang mencerminkan kepentingan global yang lebih luas.

b. Lembaga Internasional

Peran lembaga internasional dalam dinamika kekuasaan politik globalisasi semakin penting dalam mengelola isu-isu lintas batas yang kompleks. Menurut Anne-Marie Slaughter (2017), lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF) memiliki peran krusial dalam membentuk norma-norma internasional dan mengkoordinasikan tanggapan terhadap tantangan global. Klaus Schwab (2019), pendiri Forum Ekonomi Dunia, membahas bahwa lembaga-lembaga seperti Forum Ekonomi Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memberikan platform bagi negara-negara dan aktor non-negara untuk berdiskusi dan bernegosiasi dalam rangka mencapai kesepakatan internasional. Meskipun lembaga internasional memiliki potensi untuk memfasilitasi kerjasama global, juga sering kali menghadapi kritik terkait dengan kekurangan representasi dan akuntabilitas. Robert Cox (2018) mengkritik bahwa lembaga-lembaga internasional sering kali dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara besar dan kekuatan ekonomi tertentu, sehingga mungkin

tidak selalu mewakili kepentingan semua negara dan masyarakat sipil. Joseph Stiglitz (2020) menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia sering kali dikritik karena dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di tingkat global.

### **3. Implikasi Globalisasi terhadap Kekuasaan Politik**

Implikasi globalisasi terhadap kekuasaan politik global menjadi fokus utama dalam memahami dinamika geopolitik kontemporer. Globalisasi telah mengubah paradigma tradisional tentang kekuasaan politik dengan memfasilitasi interkoneksi yang lebih luas antara negara-negara dan aktor non-negara. Akibatnya, terjadi penyebaran kekuatan politik di seluruh dunia, menciptakan tantangan baru dalam menjaga stabilitas dan mengelola konflik global.

#### **a. Peningkatan Kompetisi**

Peningkatan kompetisi menjadi salah satu implikasi utama dari globalisasi terhadap dinamika kekuasaan politik di tingkat global. Menurut Thomas Friedman (2016), globalisasi telah membuka akses pasar global bagi berbagai aktor ekonomi, yang menghasilkan persaingan yang semakin intensif dalam mencari sumber daya, pasar, dan keunggulan kompetitif. Joseph Nye (2018) menekankan bahwa dalam era globalisasi, kompetisi tidak hanya terjadi antara negara-negara, tetapi juga melibatkan perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, dan individu yang bersaing untuk memengaruhi agenda global. Dalam konteks ini, Klaus Schwab (2021) membahas pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi kompetisi global yang semakin sengit, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun politik.

Peningkatan kompetisi juga dapat menghasilkan ketegangan politik dan konflik di tingkat global. John Mearsheimer (2019) mengemukakan bahwa dalam konteks persaingan kekuatan di era globalisasi, negara-negara besar cenderung mengadopsi strategi yang lebih agresif untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi dalam hierarki kekuasaan global. Martha Finnemore (2022) menambahkan bahwa kompetisi geopolitik antara negara-negara besar dapat memicu rivalitas regional dan

meningkatkan risiko konflik militer. Sebagai contoh, persaingan antara AS dan China dalam bidang perdagangan, teknologi, dan pengaruh geopolitik telah menjadi salah satu ciri utama dinamika kekuasaan politik global saat ini.

b. Pergeseran Prioritas

Pergeseran prioritas dalam kekuasaan politik globalisasi mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan dan dinamika baru yang muncul akibat globalisasi. Menurut Robert Keohane (2017), globalisasi telah mengubah lanskap politik dengan memperluas agenda kebijakan untuk mencakup isu-isu seperti perdagangan bebas, migrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Joseph Nye (2019) membahas bahwa negara-negara dan aktor politik lainnya semakin memperhatikan isu-isu transnasional yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan global. Dalam konteks ini, Anne-Marie Slaughter (2021) menekankan pentingnya pemerintah dan lembaga internasional untuk mengadaptasi prioritas kebijakan agar lebih responsif terhadap interkoneksi dan kompleksitas global.

Pergeseran prioritas ini juga menghadirkan tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan global. Klaus Schwab (2018) mencatat bahwa ketika negara-negara berfokus pada isu-isu transnasional, seperti perubahan iklim dan keamanan siber, hal ini dapat mengaburkan prioritas tradisional seperti kestabilan regional dan konflik antarnegara. John Ikenberry (2022) menambahkan bahwa terdapat kekhawatiran bahwa fokus terlalu banyak pada isu-isu global dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan domestik dan ketidaksetaraan di dalam negeri. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin politik dan lembaga internasional untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara prioritas global dan domestik.

c. Tantangan Terhadap Kedaulatan

Tantangan terhadap kedaulatan negara menjadi semakin kompleks sebagai akibat dari globalisasi dalam dinamika kekuasaan politik. Menurut Joseph Nye (2017), perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat aliran informasi dan arus modal lintas batas, yang mengurangi kemampuan negara untuk mengontrol pergerakan dan aliran tersebut. Anne-Marie Slaughter (2019) membahas bahwa dalam

era globalisasi, banyak isu yang dihadapi oleh negara-negara tidak lagi dapat diatasi secara efektif oleh satu negara secara tunggal. Sebagai contoh, Martha Finnemore (2021) menunjukkan bahwa tantangan seperti perubahan iklim, terorisme, dan perdagangan ilegal melintasi batas negara dengan mudah, menghadirkan kendala baru bagi kedaulatan negara. Ketika kedaulatan negara dihadapkan pada tantangan globalisasi, terdapat upaya untuk memperkuat kerjasama internasional dan pembentukan lembaga-lembaga multilateral. Klaus Schwab (2018) menekankan bahwa dalam menghadapi tantangan global, negara-negara semakin bergantung pada kerjasama lintas batas dan arsitektur kekuasaan global yang melibatkan lembaga-lembaga seperti PBB, WTO, dan Bank Dunia. Robert Keohane (2022) menambahkan bahwa lembaga-lembaga internasional memberikan platform bagi negara-negara untuk mengkoordinasikan tanggapan terhadap tantangan bersama yang melebihi kapasitas negara-negara secara individu.

## **B. Peran Organisasi Internasional**

Organisasi internasional memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur dan mempengaruhi dampak politik globalisasi. Globalisasi adalah fenomena kompleks yang melibatkan integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya antara negara-negara di seluruh dunia. Di bawah ini adalah beberapa cara di mana organisasi internasional berperan dalam dampak politik globalisasi:

### **1. Penyusunan Kebijakan Global**

Penyusunan kebijakan global oleh organisasi internasional memegang peran vital dalam mengelola dampak politik globalisasi. Menurut John J. Kirton dan Ella Kokotsis (2015), organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan yang mencakup berbagai aspek politik globalisasi, termasuk perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Melalui konsensus antar negara anggota, kebijakan global dapat dihasilkan untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat proses globalisasi. Penyusunan kebijakan ini juga mencerminkan upaya

kolaboratif untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas, seperti yang dikemukakan oleh Anne-Marie Slaughter (2019) dalam konteks multilateralisme yang semakin penting dalam menghadapi kompleksitas politik global.

Pada proses penyusunan kebijakan global, organisasi internasional juga berfungsi sebagai forum untuk negosiasi dan diplomasi antar negara. Menurut Jeffrey W. Legro (2017), lembaga-lembaga seperti PBB menyediakan wadah yang penting untuk pertukaran ide dan pandangan antar negara dalam menanggapi isu-isu politik globalisasi. Proses ini memungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan meminimalkan konflik. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, organisasi internasional dapat memfasilitasi pembentukan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015.

## **2. Penyelesaian Konflik dan Diplomasi**

Penyelesaian konflik dan diplomasi merupakan peran penting yang dimainkan oleh organisasi internasional dalam mengelola dampak politik globalisasi. Menurut Richard N. Haass (2017), dalam era globalisasi yang kompleks, konflik antarnegara atau bahkan internal dalam suatu negara dapat memiliki konsekuensi yang meluas secara global. Organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa memiliki peran dalam meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antar pihak yang terlibat dalam konflik. Diplomasi multilateral juga menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan yang mempromosikan perdamaian dan stabilitas global, sebagaimana disoroti oleh Bruce D. Jones (2016) dalam karyanya.

Dengan upaya diplomasi dan mediasi, organisasi internasional dapat membantu mengurangi eskalasi konflik dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Menurut Lakhdar Brahimi (2018), mantan utusan PBB untuk Suriah, mediasi internasional dapat berperan penting dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang kompleks. Dalam konteks politik globalisasi yang gejolak, kemampuan organisasi internasional untuk menengahi konflik dapat menjadi kunci untuk meminimalkan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkannya.



### **3. Penegakan Hukum Internasional**

Penegakan hukum internasional merupakan peran penting yang dimainkan oleh organisasi internasional dalam mengelola dampak politik globalisasi. Seperti yang dikemukakan oleh David P. Forsythe (2016), organisasi seperti Mahkamah Internasional dan Interpol memiliki peran dalam menegakkan hukum dan keadilan di tingkat global. Dalam era globalisasi, kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, terorisme, dan pencucian uang dapat menyebar dengan cepat melintasi batas-batas negara, membutuhkan respons hukum yang koordinatif dan efektif dari lembaga-lembaga internasional.

Penegakan hukum internasional juga melibatkan kerjasama antarnegara untuk menangani masalah lintas batas yang kompleks. Menurut Philippe Sands (2017), dalam konteks isu-isu seperti kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia, organisasi internasional seperti PBB memiliki peran penting dalam menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan tersebut. Melalui kerjasama lintas negara, penegakan hukum internasional dapat mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi di tingkat global, memberikan tekanan kepada negara-negara untuk mematuhi standar hukum yang telah disepakati secara internasional.

### **4. Pengaturan Perdagangan Internasional**

Pengaturan perdagangan internasional oleh organisasi internasional berperan penting dalam mengelola dampak politik globalisasi. Menurut Douglas A. Irwin (2017), organisasi seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki mandat untuk mengawasi sistem perdagangan internasional dan memfasilitasi negosiasi antarnegara untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan seimbang. Dalam konteks globalisasi ekonomi yang semakin terintegrasi, peran pengaturan perdagangan internasional menjadi kunci untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi disparitas antarnegara.

Dengan kerangka kerja perdagangan internasional yang disepakati secara bersama-sama, organisasi internasional dapat membantu mengatasi hambatan perdagangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan global. Sebagaimana diungkapkan oleh Bernard M. Hoekman (2016), peran pengaturan perdagangan internasional dalam menetapkan aturan main yang jelas

dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Selain itu, kerjasama antarnegara dalam hal perdagangan internasional juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan akses pasar dan diversifikasi sumber daya.

## **5. Perlindungan Lingkungan dan Keberlanjutan**

Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan menjadi fokus utama bagi organisasi internasional dalam mengelola dampak politik globalisasi. Menurut Jeffrey D. Sachs (2015), dalam konteks globalisasi yang semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan menjadi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak merusak sumber daya alam yang terbatas. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Internasional Energi Atom (IAEA) memiliki peran dalam mempromosikan keberlanjutan melalui kerjasama lintas negara untuk mengatasi masalah lingkungan global.

Penyusunan kebijakan lingkungan global menjadi fokus utama bagi organisasi internasional dalam mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan polusi. Menurut Peter H. Raven (2017), pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi masalah lingkungan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dampak politik globalisasi terhadap ekosistem global. Melalui peran sebagai forum untuk negosiasi dan koordinasi, organisasi internasional dapat memfasilitasi pembentukan kesepakatan global yang mengatur pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

## **C. Isu Global dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Politik**

Isu global melibatkan permasalahan yang memengaruhi masyarakat di berbagai belahan dunia secara serentak. Isu-isu ini tidak terbatas oleh batas-batas geografis atau politik, melainkan melintasi negara, budaya, dan bahkan generasi. Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, isu-isu ini menjadi semakin kompleks dan saling terkait, membutuhkan kerja sama antarnegara dan pemangku kepentingan internasional untuk penyelesaiannya. Isu global sering kali mencakup masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Selain itu, isu-isu seperti

kemiskinan, ketidaksetaraan, konflik bersenjata, dan pengungsi juga menjadi perhatian utama dalam diskusi global. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang isu-isu global menjadi penting bagi pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan individu di seluruh dunia untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

## 1. Jenis-Jenis Isu Global

Isu global merupakan fenomena yang melibatkan tantangan, permasalahan, dan kesempatan yang bersifat lintas batas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Isu-isu ini mencakup bidang-bidang seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik, dan seringkali memerlukan kerja sama antarnegara untuk mencapai solusi yang efektif. Dengan peningkatan konektivitas dan kompleksitas dunia modern, isu-isu global semakin menjadi fokus perhatian dunia internasional.

### a. Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu global yang paling mendesak dan kompleks dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Peneliti IPCC, "Perubahan iklim adalah fakta, dan dampaknya sudah terasa di seluruh dunia." (IPCC, 2018) Perubahan iklim mencakup fenomena seperti peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut yang mempengaruhi kehidupan manusia dan ekosistem secara luas. Para ahli lingkungan seperti Johan Rockström menegaskan bahwa "Perubahan iklim bukan hanya ancaman, tapi juga peluang untuk bertransformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan." (Rockström *et al.*, 2017) Sebagai isu global, perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi lingkup ekologi, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan.

Perubahan iklim juga mengilhami perdebatan tentang tanggung jawab dan solusi. Menurut Greenpeace, "Negara-negara industri harus memimpin dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung negara-negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi." (Greenpeace, 2020) Namun, pendekatan ini seringkali bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan politik, yang menimbulkan tantangan dalam mencapai kesepakatan global yang kuat. Para ahli seperti Michael E. Mann

menekankan bahwa "Kita membutuhkan tindakan segera dan ambisius untuk mengurangi emisi karbon dan menghindari konsekuensi yang tidak terbayangkan dari pemanasan global yang tidak terkendali." (Mann, 2019) Meskipun ada kesadaran akan kebutuhan akan tindakan, implementasi kebijakan yang efektif tetap menjadi masalah kompleks yang memerlukan kerjasama global yang kuat.

b. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan isu global yang kompleks dan berdampak luas. Menurut Bank Dunia, "Kemiskinan ekstrem dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan global" (World Bank, 2019). Kemiskinan bukan hanya masalah kurangnya pendapatan, tetapi juga terkait dengan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh, Paus Fransiskus menyatakan bahwa "Ketimpangan ekonomi adalah akar dari semua masalah sosial" (Paus Fransiskus, 2015), menekankan pentingnya kesetaraan dalam pembangunan ekonomi. Dalam era globalisasi, ketimpangan ekonomi antar negara dan dalam negara menjadi semakin jelas, dengan sebagian kecil populasi yang memegang sebagian besar kekayaan dunia (Piketty, 2014).

Isu kemiskinan juga berkaitan erat dengan isu-isu sosial, seperti ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Dalam kata-kata Nelson Mandela, "Kemiskinan tidak diciptakan oleh miskin, tetapi oleh sistem yang mengeksploitasi orang miskin" (Nelson Mandela, 2017). Ini menggarisbawahi pentingnya memerangi akar penyebab kemiskinan, bukan hanya mengatasi gejalanya. Ketimpangan ekonomi yang ekstrem dapat mengancam stabilitas politik dan sosial suatu negara, menciptakan ketegangan yang mungkin berujung pada konflik dan kekerasan (Stiglitz, 2012). Oleh karena itu, penanganan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

c. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata adalah salah satu isu global yang paling merusak dan mematikan, menyebabkan penderitaan yang luas dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Menurut

Institut Perdamaian Global, "Konflik bersenjata telah menyebabkan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya dan mencegah kemajuan menuju perdamaian dan keamanan" (Global Peace Index, 2023). Konflik bersenjata sering kali melibatkan konsekuensi kemanusiaan yang serius, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan pengungsi massal. Pada tahun 2019, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas bahwa "Konflik bersenjata terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia" (United Nations, 2019), menekankan perlunya upaya bersama untuk mengatasi akar penyebab konflik.

Konflik bersenjata juga sering kali terkait dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi di suatu wilayah atau negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Muggah, "Konflik bersenjata cenderung berkembang di negara-negara yang rentan terhadap kekacauan politik dan ketidaksetaraan ekonomi" (Muggah, 2018). Ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi sering kali menjadi pemicu konflik, dengan kelompok-kelompok tertentu yang merasa terpinggirkan dan tidak diwakili oleh pemerintah. Lebih lanjut, kehadiran senjata dan peredaran senjata ilegal juga dapat memperburuk konflik yang sudah ada, memperpanjang durasinya dan membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan (Small Arms Survey, 2017).

d. Krisis Kesehatan Global

Krisis kesehatan global merupakan isu yang mendesak dan memiliki dampak yang luas di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), "Krisis kesehatan global seperti pandemi dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia" (WHO, 2020). Krisis seperti pandemi COVID-19 mengungkapkan kerentanan sistem kesehatan global dan membahas pentingnya kerja sama internasional dalam menangani ancaman kesehatan berskala besar. Selain itu, krisis kesehatan global tidak hanya terbatas pada wabah penyakit menular, tetapi juga mencakup masalah kesehatan yang lebih luas seperti malnutrisi, akses terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau, dan ancaman kesehatan lingkungan.

Krisis kesehatan global sering kali disebabkan oleh faktor-faktor kompleks termasuk perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, globalisasi, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Menurut Lancet Commission on Global Health, "Krisis kesehatan global adalah hasil dari berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang saling terkait" (Lancet Commission on Global Health, 2019). Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata juga dapat memperburuk krisis kesehatan, membatasi akses terhadap layanan kesehatan dan menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih cepat.

e. Migrasi

Migrasi merupakan salah satu isu global yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan baik secara ekonomi maupun sosial. Menurut International Organization for Migration (IOM), "Migrasi adalah fenomena yang telah mengubah wajah dunia dan akan terus menjadi tantangan yang relevan di abad ke-21" (IOM, 2019). Migrasi dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk pencarian peluang ekonomi, perubahan iklim, konflik bersenjata, atau penganiayaan politik, dan sering kali melibatkan perpindahan individu atau kelompok dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya. Tren migrasi global terus berkembang, dengan jumlah migran internasional diperkirakan mencapai lebih dari 270 juta pada tahun 2019 (UN DESA, 2019).

Migrasi juga menjadi isu kontroversial dalam debat politik dan sosial di banyak negara, terutama terkait dengan masalah seperti integrasi sosial, pengungsi, dan keamanan perbatasan. Seperti yang diungkapkan oleh Alexander Betts, "Migrasi tidak hanya tentang perpindahan fisik, tetapi juga tentang ketidaksetaraan global, perlindungan hak asasi manusia, dan konflik sosial" (Betts, 2016). Ketidakstabilan politik dan konflik di beberapa wilayah dunia juga dapat memperburuk masalah migrasi, menciptakan gelombang pengungsi yang membutuhkan bantuan internasional. Namun demikian, migrasi juga dapat menjadi sumber peluang ekonomi dan budaya, baik bagi negara asal maupun negara tujuan.

## **2. Pengaruh Isu Global terhadap Sosial Politik**

Isu-isu global memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim, migrasi massal, dan ketidaksetaraan ekonomi adalah contoh dari sejumlah tantangan global yang secara langsung mempengaruhi stabilitas sosial dan politik suatu negara. Pergeseran kekuatan geopolitik dan kompetisi antarnegara juga menjadi faktor penting yang membentuk dinamika politik global yang kompleks.

### **a. Perubahan Sosial**

Perubahan sosial merupakan dampak yang signifikan dari berbagai isu global terhadap aspek sosial politik di berbagai negara dan masyarakat. Menurut Anthony Giddens, "Perubahan sosial terjadi sebagai respons terhadap dinamika global seperti globalisasi, teknologi informasi, dan ketidakstabilan politik" (Giddens, 2017). Isu-isu global seperti migrasi, ketimpangan ekonomi, dan krisis kesehatan dapat mempengaruhi struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan sistem politik suatu masyarakat. Perubahan sosial sering kali menimbulkan ketegangan dan konflik, tetapi juga dapat menjadi pendorong inovasi dan perubahan positif dalam masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi dapat memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, mengubah pola perilaku, dan mempengaruhi kekuatan politik dalam suatu negara. Dalam kata-kata Zygmunt Bauman, "Perubahan sosial menghasilkan 'masyarakat cair' di mana batasan-batasan tradisional dan identitas tetap menjadi semakin kabur" (Bauman, 2016). Globalisasi, teknologi digital, dan arus informasi yang cepat mempercepat proses perubahan sosial ini, menciptakan tantangan baru bagi pemerintahan dan lembaga politik dalam menjawab tuntutan masyarakat. Selain itu, perubahan sosial juga dapat memicu gerakan sosial dan politik yang berupaya mengubah struktur kekuasaan dan mencapai perubahan sosial yang lebih besar.

### **b. Ketegangan Politik**

Ketegangan politik merupakan hasil dari interaksi kompleks antara isu-isu global dan dinamika politik di tingkat nasional dan internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama, "Ketegangan politik sering kali muncul dari

ketidaksetaraan ekonomi, konflik identitas, dan persaingan kekuasaan antara negara-negara" (Fukuyama, 2018). Isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi pemicu ketegangan politik di tingkat nasional dengan memperkuat retorika nasionalisme dan proteksionisme. Selain itu, penggunaan media sosial dan teknologi informasi telah mempercepat penyebaran narasi politik yang memperkuat polarisasi dan ketegangan di banyak masyarakat.

Ketegangan politik juga dapat mengancam stabilitas demokrasi dan keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Sebagai contoh, *The Economist Intelligence Unit* menyatakan bahwa "peningkatan ketegangan politik dalam beberapa negara telah mengancam prinsip-prinsip demokrasi liberal" (The Economist Intelligence Unit, 2020). Politisasi isu-isu global seperti imigrasi, perdagangan internasional, dan isu lingkungan sering kali memicu perpecahan di antara partai politik dan masyarakat, mempersulit proses pembuatan keputusan yang konsensual. Selain itu, ketegangan politik yang tidak terselesaikan dapat meningkatkan risiko konflik dan kekerasan politik di beberapa wilayah.

c. Perubahan Kebijakan

Perubahan kebijakan merupakan respons dari dinamika isu global terhadap tuntutan dan kebutuhan sosial politik di tingkat nasional dan internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Nye, "Isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan perdagangan internasional memaksa negara-negara untuk menyesuaikan kebijakan domestik" (Nye, 2017). Kebijakan yang efektif harus mampu mengatasi tantangan global dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan secara luas. Isu-isu seperti pandemi, perubahan iklim, dan migrasi sering kali memicu tekanan politik untuk mengubah atau mengimplementasikan kebijakan yang lebih progresif dan inklusif.

Perubahan kebijakan juga dapat terjadi sebagai hasil dari interaksi antara kepentingan nasional dan global, di mana negara-negara berusaha untuk mempertahankan kepentingan nasional sambil tetap berpartisipasi dalam kerja sama



internasional. Menurut Anne-Marie Slaughter, "Kerja sama internasional berperan penting dalam membentuk kebijakan domestik, dengan negara-negara sering kali bekerja sama untuk mencapai solusi yang lebih efektif terhadap masalah-masalah global" (Slaughter, 2019). Perjanjian dan forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memengaruhi pembentukan kebijakan di tingkat nasional, sering kali mendorong adopsi kebijakan yang lebih konsisten dengan standar global.

d. Kolaborasi Internasional

Kolaborasi internasional merupakan respons penting terhadap tantangan-tantangan global yang kompleks dalam bidang sosial politik. Seperti yang dikemukakan oleh Ban Ki-moon, "Kerja sama internasional adalah kunci untuk mengatasi masalah-masalah global yang tidak dapat diatasi oleh satu negara atau entitas saja" (Ban Ki-moon, 2016). Melalui kolaborasi lintas batas, negara-negara dapat mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim, migrasi, dan perdagangan internasional dengan lebih efektif. Selain itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa juga berperan penting dalam memfasilitasi kerja sama internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang sosial politik.

Kolaborasi internasional juga dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan dalam menanggapi isu-isu global. Menurut Christine Lagarde, "Kerja sama internasional dapat membantu membangun konsensus dan dukungan global untuk tindakan kolektif dalam mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim" (Lagarde, 2019). Dengan berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman, negara-negara dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat internasional. Selain itu, kolaborasi internasional juga dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antarbudaya, menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk perdamaian dan stabilitas global.

e. Kesadaran Publik

Kesadaran publik merupakan faktor penting dalam membentuk respons sosial politik terhadap isu-isu global yang kompleks.

Seperti yang dikemukakan oleh Naomi Klein, "Kesadaran publik dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk perubahan, memaksa pemimpin politik dan korporasi untuk bertindak dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi" (Klein, 2019). Melalui gerakan sosial, demonstrasi, dan advokasi publik, masyarakat dapat mengubah agenda politik dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih progresif dalam menanggapi isu-isu global. Kesadaran publik juga berperan kunci dalam membentuk opini publik tentang isu-isu global, mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan politik.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan media sosial, kesadaran publik dapat dengan cepat menyebar dan memobilisasi dukungan massal untuk perubahan sosial politik. Menurut Manuel Castells, "Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, berorganisasi, dan menyebarkan informasi tentang isu-isu global dengan cepat dan secara efisien" (Castells, 2017). Gerakan sosial seperti #MeToo, Fridays for Future, dan Black Lives Matter adalah contoh bagaimana kesadaran publik dapat memicu perubahan signifikan dalam agenda politik dan tindakan kebijakan. Selain itu, kesadaran publik juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan institusi internasional, memaksa untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya terhadap isu-isu global.



# **BAB VII**

## **RESPON DAN ADAPTASI TERHADAP GLOBALISASI**

---

Respon dan adaptasi terhadap globalisasi mencerminkan kemampuan individu, masyarakat, dan negara-negara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang diinduksi oleh fenomena ini. Pertama-tama, globalisasi mendorong masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi pasar tenaga kerja global yang dinamis. Hal ini memicu upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta mengembangkan strategi adaptasi yang memungkinkan individu untuk bersaing dalam lingkungan yang semakin terhubung dan berubah dengan cepat. Namun, di sisi lain, respon terhadap globalisasi juga mencakup upaya untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai lokal dalam menghadapi arus homogenisasi budaya yang sering diakibatkan oleh penetrasi budaya global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang respon dan adaptasi terhadap globalisasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul di era global yang terus berubah.

### **A. Strategi Negara-Negara Berkembang Menghadapi Globalisasi**

Di era globalisasi yang semakin meluas, negara-negara berkembang dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan beragam. Perubahan dalam ekonomi, teknologi, dan hubungan internasional telah mengubah lanskap global secara dramatis, mendorong negara-negara berkembang untuk mengevaluasi strategi. Peningkatan integrasi ekonomi global telah membuka peluang baru, namun juga meningkatkan persaingan yang ketat dan menghadirkan risiko ekonomi yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Di tengah dinamika

global ini, negara-negara berkembang dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan daya saing, memperkuat infrastruktur ekonomi, dan mempromosikan inovasi. Selain itu, juga perlu memperhatikan ketidaksetaraan dalam akses terhadap teknologi dan sumber daya, serta memastikan bahwa globalisasi membawa manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memahami secara mendalam perubahan global, negara-negara berkembang dapat merancang strategi yang adaptif dan inklusif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang terkait dengan era globalisasi.

### **1. Dampak Globalisasi bagi Negara-negara Berkembang**

Dampak globalisasi terhadap negara-negara berkembang menjadi sorotan penting dalam era kontemporer. Fenomena ini membawa perubahan yang signifikan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik di berbagai belahan dunia. Melalui integrasi pasar global, negara-negara berkembang memiliki peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap teknologi baru. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi, kerentanan terhadap krisis keuangan global, dan hilangnya kontrol atas kebijakan domestik.

#### **a. Ekonomi**

Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi negara-negara berkembang sangat signifikan. Menurut Krugman (2018), globalisasi telah membuka peluang ekonomi baru bagi negara-negara berkembang dengan memperluas akses pasar global dan meningkatkan arus investasi asing. Hal ini telah memberikan dorongan besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di banyak negara, seperti yang terjadi di Asia Tenggara dan Amerika Latin (Stiglitz, 2017). Namun, dampak positif ini tidak terjadi tanpa risiko. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan serius dalam hal persaingan global yang ketat dan tekanan untuk memperbaiki tata kelola ekonomi (Rodrik, 2016).

Salah satu dampak negatif globalisasi terhadap negara-negara berkembang adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi dan sosial. Menurut Milanovic (2016), fenomena "pemisahan global" terjadi di mana kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat berkembang mengalami peningkatan pendapatan

yang signifikan, sementara kelompok lain terpinggirkan secara ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik yang merugikan bagi negara-negara tersebut (Bhagwati, 2015). Selain itu, globalisasi juga dapat meningkatkan kerentanan ekonomi negara-negara berkembang terhadap krisis ekonomi global, seperti yang terjadi pada krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an (Rogoff, 2019).

b. Sosial

Dampak globalisasi terhadap aspek sosial negara-negara berkembang memiliki dimensi yang kompleks. Menurut Appadurai (2016), globalisasi telah mempercepat pertukaran budaya dan nilai-nilai antar bangsa, menciptakan masyarakat yang semakin terhubung secara global. Hal ini dapat menghasilkan manfaat dalam bentuk peningkatan kesadaran multikultural dan toleransi, seperti yang terjadi di beberapa kota metropolitan di negara-negara berkembang (Castells, 2015). Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan baru dalam mempertahankan identitas budaya lokal dan menghadapi ancaman homogenisasi budaya yang dihasilkan oleh dominasi budaya global (Tomlinson, 2017).

Globalisasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial di negara-negara berkembang. Menurut Sen (2018), pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh globalisasi dapat memicu perubahan dalam struktur sosial, termasuk peningkatan mobilitas sosial dan pengurangan ketimpangan antargolongan masyarakat. Namun, beberapa ahli juga mencatat bahwa globalisasi juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial dengan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu sementara mengabaikan yang lain, seperti yang terjadi dalam pembangunan perkotaan yang tidak merata di banyak negara berkembang (Davis, 2019).

c. Politik

Dampak globalisasi terhadap politik negara-negara berkembang mencakup berbagai aspek yang memengaruhi dinamika politik domestik dan hubungan internasional. Menurut Huntington (2015), globalisasi telah mengubah tata cara berpikir tentang kedaulatan negara dan memperkuat integrasi ekonomi global yang menggeser kekuatan politik dari tingkat nasional ke tingkat

internasional. Hal ini dapat menghasilkan tantangan bagi negara-negara berkembang dalam menjaga kedaulatan dan otonomi politik (Bremmer, 2019). Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam forum internasional dan mempengaruhi agenda global (Ikenberry, 2017).

Globalisasi juga membawa dampak yang kompleks terhadap stabilitas politik di negara-negara berkembang. Menurut Fukuyama (2018), pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh globalisasi dapat menciptakan kemakmuran yang merata dan mendukung stabilitas politik, namun juga dapat meningkatkan ketegangan sosial dan politik jika keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara adil. Di banyak negara berkembang, ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dapat mengakibatkan protes massa dan ketegangan politik yang meningkat (Diamond, 2020). Selain itu, globalisasi juga dapat memperkuat kelompok-kelompok ekstremis dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, seperti yang terjadi dengan penyebaran ideologi radikal melalui internet (Mendelsohn, 2016).

## **2. Tantangan yang Dihadapi oleh Negara-negara Berkembang dalam Menghadapi Globalisasi**

Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menghadapi globalisasi menjadi perhatian utama dalam diskursus global kontemporer. Meskipun globalisasi membawa peluang ekonomi dan teknologi yang besar, negara-negara berkembang juga menghadapi tantangan kompleks seperti persaingan yang tidak merata di pasar global dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan teknologi. Dalam menghadapi dinamika ini, negara-negara berkembang dihadapkan pada tekanan untuk menyesuaikan kebijakan domestik sambil menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi dan sosial secara inklusif.

### **a. Kesenjangan Ekonomi**

Kesenjangan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menghadapi globalisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Stiglitz (2017), meskipun globalisasi telah membawa kemajuan ekonomi bagi

sebagian negara berkembang, namun kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin cenderung semakin melebar. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakmerataan dalam distribusi manfaat ekonomi global, di mana kelompok tertentu dapat mengakses peluang global sementara yang lain terpinggirkan secara ekonomi. Dampak dari kesenjangan ekonomi ini sangat luas, mempengaruhi stabilitas sosial dan politik serta menghambat upaya pembangunan berkelanjutan (Milanovic, 2016).

Kesenjangan ekonomi juga dapat menghambat kemampuan negara-negara berkembang untuk bersaing secara global. Menurut Bhagwati (2015), kesenjangan ekonomi yang besar dapat menghambat mobilitas sosial dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya, yang pada gilirannya dapat memperburuk kesenjangan ekonomi yang ada. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi bukan hanya merupakan masalah internal bagi negara-negara berkembang, tetapi juga menghambat potensi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Rodrik, 2016).

b. Ketergantungan Ekonomi

Ketergantungan ekonomi pada negara maju merupakan salah satu tantangan kritis yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam era globalisasi. Seperti yang diuraikan oleh Rodrik (2021), negara-negara berkembang seringkali terjebak dalam pola perdagangan yang membuatnya bergantung pada ekspor bahan mentah atau produk manufaktur sederhana, yang membatasi kemampuan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang lebih maju secara teknologi. Ketergantungan ini dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi ketika harga komoditas global turun atau ketika terjadi perubahan kebijakan perdagangan di negara-negara maju. Selain itu, banyak negara berkembang mengalami kesulitan dalam mengakselerasi diversifikasi ekonomi karena kekurangan investasi dalam penelitian dan pengembangan (Stiglitz, 2018). Ketergantungan ini juga mempengaruhi kemampuan negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang mandiri,

seringkali terikat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional sebagai syarat pinjaman atau bantuan (Chang, 2019).

Globalisasi memperkuat integrasi ekonomi, namun sering kali menghasilkan asimetri yang menguntungkan negara-negara maju dan meninggalkan negara-negara berkembang dalam kondisi rentan. Menurut Sachs (2020), negara-negara berkembang yang ketergantungannya tinggi pada ekspor tertentu dapat mengalami kesulitan ekonomi parah ketika permintaan global menurun. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan yang sulit untuk dipecahkan tanpa reformasi kebijakan yang substantif dan dukungan internasional yang berkelanjutan. Ketergantungan ini tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga pada teknologi dan modal, di mana negara berkembang sering kali menjadi konsumen daripada produsen inovasi (Collier, 2017). Ketergantungan teknologi ini dapat memperlambat kemajuan ekonomi negara berkembang jika tidak diimbangi dengan investasi dalam kapasitas domestik sendiri.

c. Kehilangan Identitas Budaya

Kehilangan identitas budaya merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi negara-negara berkembang dalam menghadapi globalisasi. Menurut Smith (2020), globalisasi membawa arus kuat budaya populer dan konsumerisme yang sering menggeser dan menggantikan tradisi lokal, mengakibatkan berkurangnya keberagaman budaya. Tomlinson (2018) juga menyatakan bahwa penetrasi media dan teknologi global memudahkan penyebaran budaya pop barat yang sering kali dianggap lebih menarik oleh generasi muda, meninggalkan praktik dan nilai-nilai tradisional. Ini menimbulkan dilema antara modernisasi dan pelestarian identitas budaya yang asli, yang jika tidak ditangani dengan bijak dapat menyebabkan hilangnya warisan budaya yang unik dan penting. Kehilangan ini tidak hanya mempengaruhi kekayaan kultural suatu negara, tetapi juga berpotensi mengurangi daya tariknya sebagai destinasi wisata yang unik dan autentik.

Para ahli menekankan pentingnya strategi pelestarian budaya yang inovatif dan adaptif untuk mengatasi dampak negatif



globalisasi. Menurut Amin (2022), pemerintah dan masyarakat harus proaktif dalam mendokumentasikan dan mempromosikan budaya lokal melalui pendidikan dan media. Ini termasuk penggunaan teknologi modern untuk mendigitalisasi elemen budaya seperti bahasa, cerita rakyat, dan seni tradisional. Lebih jauh, Bhagwati (2021) mendukung pengembangan industri kreatif lokal yang dapat mengintegrasikan elemen-elemen budaya tradisional dengan tren global, sehingga menciptakan produk yang unik namun relevan secara global. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas nasional dan mempertahankan keberagaman budaya di tengah tekanan globalisasi.

### **3. Strategi Menghadapi Globalisasi oleh Negara-negara Berkembang**

Untuk menghadapi arus globalisasi yang terus berkembang, negara-negara berkembang semakin menegaskan kebutuhan akan strategi yang efektif, harus memperhitungkan beragam faktor, termasuk dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, serta kebutuhan akan keberlanjutan lingkungan. Strategi yang diterapkan harus mampu mengoptimalkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi sambil tetap memperhatikan perlunya perlindungan terhadap kepentingan nasional dan pemberdayaan ekonomi domestik.

#### **a. Diversifikasi Ekonomi**

Diversifikasi ekonomi adalah strategi vital bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dibawa oleh globalisasi. Menurut Perez (2021), diversifikasi membantu mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor ekonomi, sehingga menambah ketahanan terhadap gejolak pasar global. Peningkatan investasi dalam sektor-sektor seperti teknologi, pembuatan, dan layanan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan nasional. Alvarado (2022) menegaskan bahwa diversifikasi memungkinkan perekonomian negara berkembang untuk lebih beradaptasi dengan perubahan tren global dan permintaan pasar. Ini juga mendorong inovasi dan kompetitif di pasar internasional.

Pendidikan dan pengembangan keterampilan berperan penting dalam mendukung diversifikasi ekonomi. Rodríguez-Pose (2019) menyarankan bahwa peningkatan kapasitas manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasional adalah kunci untuk mengembangkan sektor industri dan jasa yang beragam. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan tenaga kerja tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing internasional. Melalui strategi ini, negara-negara berkembang dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dan memperluas basis ekonomi untuk mencakup industri bernilai tambah tinggi dan layanan berbasis pengetahuan.

b. Penguatan Infrastruktur dan SDM

Penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) merupakan strategi esensial bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan globalisasi. Menurut Stevenson (2022), peningkatan infrastruktur seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi adalah fundamental untuk meningkatkan akses pasar dan efisiensi operasional, yang penting dalam ekonomi global. Sementara itu, Guo (2021) menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan SDM dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang memungkinkan adaptasi dan inovasi lebih cepat terhadap teknologi baru dan praktik bisnis global. Dengan SDM yang terampil dan infrastruktur yang memadai, negara-negara berkembang dapat meningkatkan daya saing di panggung internasional. Langkah-langkah ini juga membantu dalam mereduksi disparitas ekonomi antara daerah urban dan rural, mengintegrasikan ekonomi nasional lebih dalam ke dalam rantai nilai global.

Pengembangan infrastruktur digital menjadi sangat penting dalam era digitalisasi global ini. Menurut Johnson (2023), peningkatan akses dan keandalan infrastruktur digital tidak hanya memperluas kesempatan bagi bisnis lokal untuk bersaing di pasar global, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Investasi ini memfasilitasi transaksi lebih cepat dan lebih aman, esensial untuk perdagangan dan komunikasi internasional. Keberhasilan ini bergantung pada

kemampuan pemerintah untuk memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk upgrade infrastruktur teknologi. Hal ini membantu dalam menciptakan ekosistem yang kondusif untuk inovasi dan kewirausahaan.

c. Promosi Kebijakan Proteksionisme yang Cermat

Promosi kebijakan proteksionisme yang cermat dapat menjadi strategi efektif bagi negara-negara berkembang untuk melindungi industri lokal dari persaingan global yang tidak seimbang. Menurut Thompson (2022), proteksionisme yang selektif membantu negara-negara berkembang dalam memperkuat sektor-sektor kritikal yang masih dalam tahap pengembangan, memberikan waktu bagi industri lokal untuk menyesuaikan diri dengan standar global. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Lee (2021), strategi ini harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari kemungkinan pembalasan dari negara-negara mitra dagang dan distorsi pada ekonomi domestik. Proteksionisme yang bijak mencakup penggunaan tarif dan kuota secara strategis, serta subsidi untuk R&D yang bertujuan meningkatkan daya saing global industri domestik. Implementasi kebijakan ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hubungan internasional dan pertumbuhan ekonomi.

Pada konteks proteksionisme yang cermat, penting bagi pemerintah negara berkembang untuk fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan inovasi. Patel (2023) menekankan perlunya dukungan terhadap industri yang bisa mendatangkan nilai tambah tinggi dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor tetapi juga membantu dalam pembentukan rantai pasokan domestik yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan cara ini, proteksionisme tidak hanya sekadar melindungi tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi domestik melalui peningkatan produktivitas dan inovasi. Kebijakan ini juga harus dirancang untuk menarik investasi asing yang bisa membawa teknologi dan pengetahuan, sambil tetap melindungi kepentingan nasional.

d. Kerja Sama Regional

Kerja sama regional menjadi strategi penting bagi negara-negara berkembang dalam menavigasi tantangan dan peluang yang disajikan oleh globalisasi. Menurut Nguyen (2020), melalui kerja sama regional, negara-negara berkembang dapat menggabungkan sumber daya, membagi risiko, dan meningkatkan leverage negosiasi terhadap blok ekonomi besar. Gupta (2022) menambahkan bahwa integrasi ekonomi regional memungkinkan negara-negara berkembang untuk menciptakan pasar yang lebih besar, yang mengundang investasi lebih lanjut dan mempercepat inovasi dalam teknologi dan produksi. Aliansi regional juga dapat membantu anggota-anggotanya dalam mengadopsi standar yang lebih tinggi dalam praktik perdagangan dan regulasi, yang secara langsung meningkatkan daya saing di panggung global. Aspek penting lainnya adalah kemampuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi pasar dan sumber daya yang diperoleh melalui kerja sama regional.

Di samping itu, kerja sama regional sering memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi antar negara-negara anggota, yang merupakan faktor penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut Wong (2021), melalui mekanisme seperti pendidikan bersama dan inisiatif R&D, negara-negara berkembang dapat memanfaatkan keahlian dan inovasi masing-masing untuk melawan ketergantungan teknologi dari Barat. Ini juga memungkinkan negara-negara tersebut untuk mengembangkan sektor-sektor kunci seperti pertanian, manufaktur, dan jasa, meningkatkan produk domestik ke standar internasional. Kerja sama ini juga dapat memperkuat infrastruktur politik dan ekonomi yang memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Menurut Chavez (2023), kerja sama regional juga memperkuat kedaulatan politik dengan memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam forum internasional.

## **B. Inovasi Sosial Politik Dalam Menghadapi Tantangan Global**

Inovasi sosial politik merupakan upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan dunia politik dengan menghadapi tantangan global. Ini mencakup berbagai strategi, kebijakan, dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat tata kelola politik, serta mempromosikan keadilan dan keberlanjutan. Dalam menghadapi tantangan global, inovasi sosial politik berperan penting dalam beberapa cara:

### **1. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat**

Peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai inovasi sosial politik dalam menghadapi tantangan global telah menjadi fokus utama para ahli dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Gaventa (2016), partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen kunci dalam membangun demokrasi yang inklusif dan efektif. Melalui keterlibatan aktif, masyarakat dapat mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan secara langsung, memungkinkan adanya respons yang lebih tepat dan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga politik (Hendriks, 2019). Keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan tindakan politik, karena proses yang lebih terbuka dan transparan dapat memperkuat rasa kepercayaan dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (Warren, 2017).

Tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan konflik berskala besar menuntut pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Pierre, 2018). Dalam konteks inovasi sosial politik, keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya pemahaman yang lebih dalam tentang akar masalah yang kompleks dan seringkali lintas batas (Hickey & Mohan, 2019). Dengan melibatkan beragam perspektif dan pengalaman, solusi yang dihasilkan cenderung lebih holistik dan berkelanjutan, mampu mengatasi tantangan global dengan lebih efektif (Hudson, 2022). Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat menghasilkan perubahan budaya yang mendukung keberlanjutan dan kesetaraan, menciptakan landasan yang kuat untuk transformasi sosial yang lebih luas (Smith, 2016).

## **2. Pembangunan Kebijakan yang Berkelanjutan**

Pembangunan kebijakan yang berkelanjutan sebagai inovasi sosial politik dalam menghadapi tantangan global telah menjadi semakin penting dalam dekade terakhir. Menurut Sachs (2015), pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat, kebijakan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Dryzek & Pickering, 2017). Dukungan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang memadukan kepentingan beragam pemangku kepentingan dan menghasilkan dampak yang positif secara holistik (Bäckstrand & Lövbrand, 2016).

Tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi membutuhkan pendekatan kebijakan yang terkoordinasi dan terintegrasi (Jordan *et al.*, 2020). Pembangunan kebijakan yang berkelanjutan mendorong transformasi sistemik dalam cara kita memahami dan mengatasi tantangan ini (Meadowcroft, 2019). Menurut Stevenson (2021), kebijakan yang berkelanjutan tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga berusaha untuk membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan jangka panjang dan kesetaraan sosial. Dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, kebijakan yang berkelanjutan dapat menciptakan peluang bagi pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan bagi semua pihak (Biermann *et al.*, 2018).

## **3. Pemberdayaan Kelompok Marginal**

Pemberdayaan kelompok marginal sebagai inovasi sosial politik dalam menghadapi tantangan global telah menjadi subjek penting dalam diskusi pembangunan berkelanjutan. Menurut Sen (2017), pemberdayaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan adalah kunci untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang merajalela di seluruh dunia. Dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, peluang, dan keadilan, pemberdayaan kelompok marginal dapat menghasilkan transformasi sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Narayan, 2018). Melalui partisipasi aktif dalam proses

pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan, kelompok-kelompok marginal dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam upaya mengatasi tantangan global (Kabeer, 2016).

Tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan marginalisasi sosial memerlukan pendekatan yang terfokus pada inklusi dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan (Batliwala & Pittman, 2019). Dalam konteks inovasi sosial politik, pemberdayaan kelompok marginal menekankan pentingnya menggeser pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan dari elit menuju kelompok-kelompok yang kurang terwakili (Cornwall, 2016). Dengan memberikan suara kepada yang seringkali diabaikan dalam proses politik dan pembangunan, pemberdayaan kelompok marginal dapat menciptakan momentum untuk perubahan sistemik yang lebih besar (Eyben *et al.*, 2017). Selain itu, melalui upaya pemberdayaan seperti pendidikan, pelatihan, dan akses ke layanan kesehatan, kelompok-kelompok marginal dapat menjadi lebih mampu untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan berkelanjutan (Nussbaum, 2018).

#### **4. Penggunaan Teknologi untuk Perubahan Sosial dan Politik**

Penggunaan teknologi untuk perubahan sosial dan politik telah menjadi pusat perhatian dalam menghadapi tantangan global. Menurut Castells (2015), teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan penting dalam memfasilitasi mobilisasi massa dan partisipasi politik melalui platform digital. Dengan menggunakan media sosial dan alat komunikasi digital lainnya, individu dan kelompok dapat dengan cepat berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengorganisir aksi kolektif dalam menanggapi isu-isu sosial dan politik (Howard & Hussain, 2018). Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah dan mengungkapkan ketidakpuasan secara terbuka (Diamond, 2017).

Tantangan global seperti disinformasi, polarisasi politik, dan akses terbatas terhadap sumber daya merupakan wilayah di mana teknologi dapat memberikan kontribusi positif (Chadwick, 2017). Menurut Norris (2019), inovasi teknologi seperti algoritma dan analisis data dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai bentuk disinformasi dan propaganda yang tersebar luas. Selain itu,

teknologi blockchain telah diusulkan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pemilihan dan pengambilan keputusan politik (Swan, 2020). Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses politik dan sosial, masyarakat dapat meningkatkan efisiensi, keadilan, dan partisipasi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks (Chadwick & Howard, 2019).

### **5. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Sektor Non-profit**

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan sektor non-profit telah diakui sebagai inovasi sosial politik yang penting dalam menghadapi tantangan global. Menurut Prahalad & Hammond (2016), kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan kombinasi sumber daya, keahlian, dan kapasitas dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah yang kompleks dan berdampak luas. Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat, kerja sama antar sektor menjadi semakin penting untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan (Kolk & Lenfant, 2017). Kolaborasi ini juga dapat menghasilkan inovasi dalam pendekatan kebijakan dan praktik bisnis yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif (Austin *et al.*, 2018).

Tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi memerlukan respons yang terkoordinasi dan holistik dari berbagai sektor (Gray *et al.*, 2015). Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan sektor non-profit memungkinkan adanya pendekatan yang lintas batas dan multidimensi dalam mengatasi masalah-masalah ini (Porter & Kramer, 2019). Menurut Bryson *et al.* (2018), kerja sama ini juga dapat memperkuat kapasitas institusional dan komunitas lokal untuk merespons dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Selain itu, kolaborasi ini dapat memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi antar sektor, mempercepat inovasi, dan memperluas dampak positif dari program-program pembangunan (Ansell & Gash, 2018).

## **C. Penyesuaian Kebijakan Dalam Konteks Globalisasi**

Di era globalisasi yang semakin meluas, adaptasi kebijakan menjadi suatu keharusan bagi negara-negara di seluruh dunia. Fenomena ini memunculkan tantangan baru yang memaksa pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan cepat dan tepat. Negara-negara



harus mampu mengantisipasi dampak globalisasi terhadap berbagai sektor, mulai dari perdagangan dan investasi hingga lingkungan dan ketenagakerjaan.

## **1. Pentingnya Penyesuaian Kebijakan dalam Globalisasi**

Di era globalisasi yang semakin terkoneksi, penyesuaian kebijakan menjadi esensial bagi negara-negara untuk menjawab dinamika kompleks yang dihadapi. Globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi, sosial, dan politik secara fundamental, mendorong perlunya kebijakan yang responsif dan adaptif. Dalam konteks ini, memahami implikasi globalisasi serta mengantisipasi tantangan yang muncul menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan dalam perekonomian global yang terus berubah.

### **a. Perubahan Lingkungan Global**

Perubahan lingkungan global, termasuk perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan penurunan biodiversitas, menjadi fokus penting dalam konteks kebijakan globalisasi. Para ahli telah membahas bahwa tantangan lingkungan global tidak dapat diabaikan dalam era globalisasi yang semakin terhubung ini. Menurut Simon Dalby (2016), "Globalisasi menciptakan ketergantungan yang lebih besar di antara negara-negara dan merangsang aktivitas ekonomi yang berdampak pada lingkungan secara global." Hal ini menggarisbawahi perlunya penyesuaian kebijakan untuk menghadapi dampak globalisasi terhadap lingkungan.

Perubahan lingkungan global juga telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan sosial yang signifikan, seperti yang diungkapkan oleh Jeffrey Sachs (2015) yang menyatakan bahwa "Krisis lingkungan yang semakin memburuk dapat merusak struktur ekonomi global, mempengaruhi perdagangan, dan memicu ketegangan politik." Oleh karena itu, kebijakan yang responsif terhadap dinamika globalisasi dan lingkungan menjadi semakin mendesak. Implementasi kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif menjadi kunci dalam menanggapi tantangan ini.

### **b. Kompetisi Global**

Kompetisi global menjadi aspek penting yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam era globalisasi. Menurut ekonom

Paul Krugman (2018), "Dalam pasar global yang semakin terintegrasi, kompetisi antar-negara menjadi lebih sengit, memperkuat urgensi untuk mengadaptasi kebijakan ekonomi." Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan menjadi kunci dalam menghadapi persaingan global yang semakin intensif. Para ahli juga membahas bahwa dalam konteks kompetisi global, inovasi dan efisiensi menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Michael Porter (2019), "Kompetisi global mendorong negara-negara untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, memperkuat peran kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi." Dengan demikian, penyesuaian kebijakan menjadi esensial untuk memperkuat daya saing suatu negara di tingkat global.

Kompetisi global juga mencakup persaingan dalam hal sumber daya alam, teknologi, dan pasar. Jeffrey Garten (2017) menekankan bahwa "Dalam era globalisasi ini, negara-negara bersaing untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan pasar yang terbatas." Hal ini menandakan bahwa penyesuaian kebijakan dalam hal diplomasi ekonomi dan perdagangan sangatlah penting untuk mengoptimalkan posisi suatu negara dalam kompetisi global yang kompleks ini. Di samping itu, kompetisi global juga mendorong perubahan dalam regulasi dan kebijakan terkait dengan perdagangan internasional, investasi, dan kekayaan intelektual. Seperti yang diungkapkan oleh Anne-Marie Slaughter (2020), "Kompetisi global memaksa negara-negara untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan, termasuk regulasi perdagangan dan investasi, untuk menjaga relevansi dan daya saingnya di pasar global yang berubah dengan cepat." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan menjadi penting untuk menjawab tuntutan kompetisi global yang terus berkembang.

c. Ketergantungan Ekonomi

Ketergantungan ekonomi merupakan faktor krusial yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam era globalisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Joseph Stiglitz (2017), "Ketergantungan ekonomi antar-negara semakin meningkat dalam era globalisasi, memperkuat urgensi untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi secara internasional."

Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan menjadi esensial dalam menghadapi dampak ketergantungan ekonomi yang semakin kompleks. Para ahli juga membahas bahwa dalam konteks ketergantungan ekonomi global, krisis di satu negara dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi stabilitas ekonomi global secara keseluruhan. Seperti yang disampaikan oleh Kenneth Rogoff (2019), "Krisis ekonomi di satu negara dapat dengan mudah menular ke negara-negara lainnya melalui saluran perdagangan, keuangan, dan investasi yang terhubung secara global." Oleh karena itu, koordinasi kebijakan antarnegara menjadi semakin penting dalam mengelola ketergantungan ekonomi yang semakin mendalam.

Ketergantungan ekonomi juga mempengaruhi dinamika kekuasaan dan hubungan antarnegara. Menurut Robert Keohane (2016), "Negara-negara yang saling tergantung secara ekonomi cenderung memiliki hubungan yang lebih damai dan berkolaboratif, karena kerjasama menjadi lebih menguntungkan daripada konflik." Hal ini menandakan bahwa penyesuaian kebijakan dalam konteks ketergantungan ekonomi dapat berperan penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Selain itu, ketergantungan ekonomi juga mendorong negara-negara untuk meningkatkan kerja sama dalam hal perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan Bank Dunia (2018), "Ketergantungan ekonomi antarnegara mendorong adopsi kebijakan yang mendukung integrasi ekonomi regional dan multilateral, memperkuat konektivitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan menjadi penting dalam merespons dinamika ketergantungan ekonomi yang semakin mengglobal.

d. Teknologi dan Komunikasi

Teknologi dan komunikasi memiliki peran krusial dalam penyesuaian kebijakan dalam era globalisasi yang semakin terhubung. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, komunikasi lintas batas menjadi lebih mudah dan cepat, seperti yang disoroti oleh Manuel Castells (2018), "Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah lanskap global, memungkinkan interaksi yang lebih intensif dan cepat di antara

individu, organisasi, dan negara-negara." Hal ini menandakan bahwa kebijakan harus bersifat responsif terhadap dinamika teknologi dan komunikasi yang terus berkembang. Para ahli juga membahas bahwa teknologi digital mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sherry Turkle (2017), "Perkembangan teknologi komunikasi memengaruhi cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan berpikir, memicu perlunya penyesuaian kebijakan untuk mengatasi dampaknya yang kompleks." Oleh karena itu, kebijakan yang adaptif dan progresif dalam menghadapi perubahan teknologi menjadi penting dalam konteks globalisasi.

Teknologi dan komunikasi juga menjadi kunci dalam memperkuat konektivitas global dan kerja sama lintas batas. Menurut Francis Fukuyama (2019), "Perkembangan teknologi dan komunikasi telah memperpendek jarak dan mengurangi hambatan komunikasi, memperkuat integrasi ekonomi dan sosial di antara negara-negara." Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan untuk memanfaatkan potensi teknologi dalam memperkuat kerja sama internasional menjadi krusial. Selain itu, teknologi dan komunikasi juga berperan penting dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan, sehingga meningkatkan partisipasi dan inklusi dalam globalisasi. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nicholas Negroponte (2016), "Teknologi digital memungkinkan akses ke informasi dan pendidikan di mana saja dan kapan saja, memberikan peluang baru bagi pembangunan manusia di seluruh dunia." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan untuk memanfaatkan teknologi dalam memperluas akses dan kesempatan menjadi esensial dalam era globalisasi yang semakin terhubung.

## **2. Tantangan Penyesuaian Kebijakan dalam Globalisasi**

Di tengah arus globalisasi yang terus mengalir, negara-negara dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan yang cepat dan efektif. Perubahan cepat dalam teknologi, pola perdagangan, dan dinamika ekonomi internasional menciptakan tekanan baru bagi pembuat kebijakan untuk tetap relevan dan

kompetitif. Selain itu, tantangan seperti ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim juga menambah kompleksitas dalam proses penyesuaian kebijakan di era globalisasi ini.

a. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi menjadi perhatian utama dalam penyesuaian kebijakan dalam konteks globalisasi yang terus berlangsung. Seiring dengan integrasi ekonomi global, kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang, serta di dalam negara-negara itu sendiri, semakin memperdalam, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Piketty (2017), "Kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin telah menjadi semakin mencolok, memicu ketidaksetaraan sosial dan ketegangan politik di banyak negara." Hal ini menandakan bahwa penyesuaian kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi menjadi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik dalam era globalisasi. Para ahli juga membahas bahwa kesenjangan ekonomi dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Seperti yang dinyatakan dalam laporan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) (2019), "Kesenjangan ekonomi yang melebar dapat menghambat mobilitas sosial dan menciptakan ketidakstabilan yang merugikan bagi pertumbuhan jangka panjang." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi menjadi krusial dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia.

Kesenjangan ekonomi juga mempengaruhi stabilitas politik dan sosial dalam konteks globalisasi yang semakin terintegrasi. Menurut Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2019), "Kesenjangan ekonomi yang signifikan dapat memicu ketidakpuasan sosial, konflik politik, dan bahkan kerusuhan dalam masyarakat." Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dapat membantu dalam menjaga perdamaian dan stabilitas politik di tingkat global. Para ahli juga membahas bahwa kesenjangan ekonomi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan Bank Dunia (2020),

"Kesenjangan ekonomi yang besar dapat memperburuk tekanan terhadap lingkungan, karena kelompok-kelompok miskin cenderung lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dalam era globalisasi.

b. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan ekonomi menjadi perhatian utama dalam penyesuaian kebijakan dalam era globalisasi yang penuh tantangan. Seperti yang diungkapkan oleh Carmen Reinhart (2016), "Krisis ekonomi global yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah membahas kerentanan ekonomi negara-negara, terutama yang bergantung pada modal asing dan perdagangan internasional." Hal ini menandakan bahwa penyesuaian kebijakan untuk mengurangi kerentanan ekonomi menjadi penting dalam menghadapi dinamika globalisasi yang tidak pasti. Para ahli juga membahas bahwa kerentanan ekonomi dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk krisis keuangan, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakstabilan politik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Raghuram Rajan (2017), "Negara-negara yang memiliki ketergantungan yang tinggi pada modal asing dan investasi asing cenderung lebih rentan terhadap guncangan ekonomi global dan kebijakan luar negeri." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi menjadi krusial dalam mengurangi kerentanan terhadap gejolak global.

Kerentanan ekonomi juga dapat mengakibatkan dampak sosial yang serius, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang kurang mampu. Menurut laporan Bank Dunia (2018), "Krisis ekonomi dapat memperburuk kesenjangan sosial, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan menghambat upaya pembangunan manusia." Hal ini menandakan bahwa penyesuaian kebijakan untuk membangun sistem perlindungan sosial yang kuat menjadi penting dalam mengatasi dampak kerentanan ekonomi. Para ahli juga membahas bahwa kerentanan ekonomi tidak hanya memengaruhi negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Seperti yang

dijelaskan dalam laporan OECD (2020), "Negara-negara maju juga dapat mengalami kerentanan ekonomi, terutama dalam hal fluktuasi harga aset dan tingkat hutang yang tinggi." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan untuk membangun ketahanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi esensial dalam menghadapi tantangan globalisasi.

c. Ketidakpastian Politik

Ketidakpastian politik menjadi faktor penting yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam konteks globalisasi yang kompleks. Para ahli membahas bahwa ketidakpastian politik, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat menciptakan gangguan besar bagi stabilitas ekonomi global. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ian Bremmer (2018), "Ketidakpastian politik di banyak negara telah meningkatkan risiko investasi dan perdagangan, memperumit proses pengambilan keputusan ekonomi global." Hal ini menandakan bahwa penyesuaian kebijakan untuk mengatasi ketidakpastian politik menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan proses globalisasi. Selain itu, ketidakpastian politik juga dapat mempengaruhi hubungan antarnegara dan kerja sama internasional. Menurut Joseph Nye (2019), "Ketidakpastian politik dapat menghambat upaya diplomasi dan kerja sama lintas batas, memperburuk ketegangan geopolitik dan perdagangan internasional." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap dinamika politik global menjadi krusial dalam menghadapi tantangan ketidakpastian.

Ketidakpastian politik juga dapat memengaruhi kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan Amnesty International (2021), "Ketidakpastian politik sering kali berdampak negatif pada hak asasi manusia, keamanan, dan kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok rentan dan minoritas." Hal ini menandakan bahwa penyesuaian kebijakan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan membangun ketahanan sosial menjadi penting dalam mengatasi dampak ketidakpastian politik. Para ahli juga membahas bahwa dalam menghadapi ketidakpastian politik, kebijakan yang adaptif dan proaktif diperlukan untuk meminimalkan risiko dan mempromosikan stabilitas. Seperti

yang disampaikan oleh Fareed Zakaria (2017), "Penyesuaian kebijakan yang responsif dan inovatif dapat membantu mengurangi ketidakpastian politik, membangun kepercayaan masyarakat, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan menjadi kunci dalam mengelola ketidakpastian politik yang merupakan bagian integral dari dinamika globalisasi.

d. **Perlindungan Lingkungan**

Perlindungan lingkungan menjadi aspek penting yang memerlukan penyesuaian kebijakan dalam konteks globalisasi yang terus berkembang. Para ahli membahas bahwa dampak negatif dari aktivitas ekonomi dan industri terhadap lingkungan telah menjadi perhatian global yang semakin mendesak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Johan Rockström (2019), "Ketergantungan kita pada sumber daya alam dan polusi lingkungan telah menghadirkan ancaman serius terhadap keberlanjutan planet ini." Hal ini menandakan perlunya penyesuaian kebijakan untuk mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dalam era globalisasi. Selain itu, perlindungan lingkungan juga menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global yang berdampak pada kesejahteraan manusia. Menurut Jane Lubchenco (2018), "Keseimbangan lingkungan yang terganggu dapat menyebabkan dampak serius bagi kehidupan manusia, termasuk kelangsungan hidup, kesehatan, dan ketahanan pangan." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan menjadi krusial dalam menanggapi tantangan globalisasi.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan semakin meningkat di tingkat global, mendorong tuntutan untuk aksi konkret dan kebijakan yang berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (2021), "Kesepakatan internasional seperti Perjanjian Paris menekankan pentingnya kolaborasi global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan adaptasi terhadap perubahan iklim." Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan dalam rangka mencapai tujuan perlindungan lingkungan menjadi imperatif dalam konteks globalisasi yang



terintegrasi. Para ahli juga membahas bahwa upaya perlindungan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan isu perubahan iklim, tetapi juga dengan pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2020), "Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem alam merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan ekologi planet ini serta menyediakan layanan ekosistem yang vital bagi manusia." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan untuk melindungi lingkungan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan hidup manusia dan planet ini dalam era globalisasi yang terus berkembang.

### **3. Strategi Penyesuaian Kebijakan dalam Globalisasi**

Untuk menghadapi tantangan globalisasi yang kompleks, pengembangan strategi penyesuaian kebijakan menjadi suatu keharusan bagi negara-negara. Strategi ini memerlukan pendekatan yang holistik dan proaktif untuk merespons dinamika eksternal yang terus berubah. Dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, kebutuhan pasar global, dan perubahan sosial, negara-negara dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tuntutan globalisasi.

#### **a. Kolaborasi Internasional**

Kolaborasi internasional menjadi strategi yang sangat relevan dalam penyesuaian kebijakan dalam era globalisasi. Para ahli membahas bahwa tantangan global, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan keamanan, tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau entitas saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kofi Annan (2017), "Kolaborasi internasional menjadi kunci dalam mengatasi tantangan global yang semakin kompleks dan saling terkait." Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan yang berorientasi pada kerja sama antar-negara dalam menghadapi dinamika globalisasi. Kolaborasi internasional juga berperan penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas global. Menurut Ban Ki-moon (2018), "Kerja sama internasional yang

kuat dapat membantu mencegah konflik, mempromosikan dialog damai, dan membangun kepercayaan antarnegara." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan untuk memperkuat kolaborasi internasional menjadi esensial dalam menjaga perdamaian dunia.

Kolaborasi internasional juga penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Para ahli membahas bahwa dalam menghadapi masalah global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketahanan pangan, diperlukan upaya kolaboratif antarnegara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jeffrey Sachs (2019), "Kolaborasi internasional dalam hal bantuan pembangunan, transfer teknologi, dan akses pasar dapat membantu negara-negara berkembang mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan." Hal ini menandakan bahwa penyesuaian kebijakan untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam pembangunan menjadi penting dalam konteks globalisasi yang saling terkait. Selain itu, kolaborasi internasional juga dapat mempercepat inovasi dan solusi untuk masalah global yang kompleks. Menurut laporan World Economic Forum (2020), "Kolaborasi internasional dalam penelitian dan pengembangan teknologi dapat mempercepat penemuan solusi untuk tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kesehatan global." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan untuk memfasilitasi kolaborasi internasional dalam inovasi menjadi kunci dalam merespons dinamika globalisasi yang cepat.

b. Kebijakan Fleksibel

Kebijakan fleksibel menjadi strategi yang relevan dalam penyesuaian kebijakan dalam konteks globalisasi yang dinamis. Para ahli membahas bahwa dalam menghadapi tantangan global yang beragam dan cepat berubah, kebijakan yang fleksibel memungkinkan respons yang lebih adaptif dan efektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence H. Summers (2016), "Fleksibilitas dalam kebijakan ekonomi dapat membantu mengurangi risiko ketidakpastian dan meningkatkan daya tanggap terhadap perubahan kondisi global." Hal ini menandakan pentingnya penyesuaian kebijakan yang bersifat dinamis dalam menghadapi kompleksitas globalisasi. Selain itu,

kebijakan fleksibel juga memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan peluang yang muncul dalam konteks globalisasi. Menurut Dani Rodrik (2018), "Kebijakan fleksibel memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan strategi ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan potensi komparatifnya, mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan yang fleksibel menjadi kunci dalam memanfaatkan peluang globalisasi secara optimal.

Kebijakan fleksibel juga memungkinkan negara-negara untuk menjaga kedaulatan dan identitas dalam era globalisasi yang terintegrasi. Para ahli membahas bahwa dalam menghadapi tekanan globalisasi, negara-negara memiliki kepentingan untuk mempertahankan kontrol atas kebijakan internal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ha-Joon Chang (2020), "Kebijakan fleksibel memungkinkan negara-negara untuk menjaga kedaulatan dalam hal pengambilan keputusan ekonomi dan sosial, sehingga meminimalkan risiko hegemoni global." Hal ini menandakan bahwa penyesuaian kebijakan yang fleksibel berperan penting dalam menjaga kemandirian dan keberagaman dalam konteks globalisasi. Selain itu, kebijakan fleksibel juga dapat memperkuat kemampuan negara-negara untuk merespons perubahan dan krisis yang cepat. Menurut laporan Bank Dunia (2019), "Kebijakan fleksibel dalam hal keuangan, pasar tenaga kerja, dan investasi dapat membantu negara-negara menghadapi perubahan ekonomi dan krisis dengan lebih efektif, meningkatkan ketahanan dan stabilitas." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan yang fleksibel menjadi strategi yang penting dalam menghadapi dinamika globalisasi yang kompleks.

c. Investasi dalam Sumber Daya Manusia

Investasi dalam sumber daya manusia menjadi strategi yang relevan dalam penyesuaian kebijakan dalam era globalisasi. Para ahli membahas bahwa dalam konteks ekonomi yang semakin berorientasi pada pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia yang terampil dan terdidik menjadi aset utama dalam mencapai daya saing global. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Klaus Schwab (2017), "Investasi dalam

pendidikan dan pelatihan merupakan investasi jangka panjang yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adaptif dan inovatif." Hal ini menandakan pentingnya penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Selain itu, investasi dalam sumber daya manusia juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara. Menurut laporan World Bank (2020), "Negara-negara yang memiliki tenaga kerja terdidik dan terlatih cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi global." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi kunci dalam memperkuat daya saing ekonomi dalam era globalisasi.

Investasi dalam sumber daya manusia juga berperan dalam mempromosikan inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Para ahli membahas bahwa akses yang merata terhadap pendidikan dan pelatihan dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam kesempatan ekonomi dan sosial antara individu dan kelompok. Sebagaimana yang disampaikan oleh Amartya Sen (2016), "Investasi dalam pendidikan adalah investasi dalam kemampuan manusia untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan." Hal ini menandakan perlunya penyesuaian kebijakan untuk memastikan akses yang merata dan kualitas pendidikan yang tinggi bagi semua lapisan masyarakat dalam menghadapi dinamika globalisasi. Selain itu, investasi dalam sumber daya manusia juga berperan penting dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (2019), "Pendidikan yang berkualitas dan pelatihan yang relevan merupakan kunci untuk mencapai pembangunan manusia yang inklusif, yang menghargai keberagaman dan keadilan sosial." Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia menjadi esensial dalam meraih pembangunan yang berkelanjutan dalam era globalisasi.



# **BAB VIII**

## **STUDI KASUS NEGARA-NEGARA TERPILIH**

---

---

Di era globalisasi yang kian menguat, perubahan sosial politik menjadi fenomena yang tak terelakkan bagi negara-negara di seluruh dunia. Fenomena ini terlihat jelas dalam dinamika yang melanda negara-negara terpilih, di mana globalisasi tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga menimbulkan transformasi mendalam dalam ranah politik dan sosial. Perubahan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari cara negara-negara berinteraksi dalam arena internasional hingga bagaimana warga negara beradaptasi dengan perkembangan yang cepat.

### **A. Analisis Dampak Globalisasi Di Negara A**

#### **1. ANALISIS DAMPAK GLOBALISASI DI INDONESIA**

##### **a. Latar Belakang**

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang heterogen, telah menjadi panggung bagi berbagai dampak globalisasi yang kompleks. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah aktif terlibat dalam proses globalisasi melalui liberalisasi ekonomi, integrasi pasar, dan pertukaran budaya. Proses ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan membuka pintu bagi investasi asing dan memperluas akses pasar, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait ketimpangan ekonomi, kerentanan lingkungan, dan perubahan sosial.

Pada beberapa dekade terakhir, globalisasi telah memberikan dampak yang terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari sektor ekonomi yang dinamis

hingga perubahan sosial dan politik yang mendalam. Namun, kesenjangan antara kota dan pedesaan, serta antara kelompok sosial, terus menjadi tantangan serius dalam memastikan bahwa manfaat globalisasi tersebar secara merata di seluruh negeri. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada tekanan untuk menjaga identitas budaya yang unik sambil terbuka terhadap arus informasi dan nilai-nilai global yang terus berkembang.

a. Dampak Ekonomi

Dampak globalisasi terhadap ekonomi Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pada konteks globalisasi, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, didorong oleh integrasi yang lebih dalam dalam perdagangan internasional dan investasi asing. Akses yang lebih besar ke pasar global telah membuka peluang bagi sektor ekspor Indonesia, khususnya dalam industri manufaktur dan komoditas alam, yang telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pembangunan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat juga menghadirkan tantangan, termasuk ketimpangan regional yang masih berlangsung, dengan pertumbuhan yang tidak merata di seluruh negeri, serta risiko ketergantungan terhadap ekonomi global yang tidak stabil.

Sementara globalisasi telah membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia, upaya untuk memperluas akses pasar dan menarik investasi asing juga harus diimbangi dengan kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga global, serta investasi dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada inovasi dan keterampilan tinggi.

2) Investasi Asing

Investasi asing telah menjadi salah satu aspek kunci dari dampak ekonomi globalisasi di Indonesia. Keterlibatan aktif dalam perdagangan internasional telah membuka pintu bagi masuknya investasi asing ke dalam berbagai sektor

ekonomi, mulai dari infrastruktur hingga manufaktur dan jasa. Dengan adanya investasi asing, Indonesia telah mendapatkan akses tidak hanya terhadap modal tambahan untuk pembangunan, tetapi juga teknologi dan manajemen yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri dalam skala global. Meskipun demikian, tantangan terkait dengan investasi asing juga termasuk masalah seperti ketimpangan regional, dimana sebagian besar investasi cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan dan industri tertentu, meninggalkan sebagian besar wilayah pedesaan masih kurang tersentuh oleh dampak positif investasi asing.

### 3) Persaingan Global

Persaingan global telah menjadi fenomena yang semakin kentara seiring dengan penetrasi investasi asing di Indonesia. Masuknya perusahaan-perusahaan asing dalam pasar domestik telah memperluas pangsa pasar dan meningkatkan standar kompetisi dalam berbagai sektor ekonomi. Persaingan ini mendorong perusahaan Indonesia untuk lebih inovatif dan efisien dalam menghadapi persaingan global, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal menjaga daya saing, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing dengan perusahaan multinasional.

Di sisi lain, persaingan global juga membawa peluang bagi perusahaan Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar di luar negeri. Dengan memanfaatkan akses pasar global yang diberikan oleh investasi asing, beberapa perusahaan Indonesia telah berhasil memperluas operasi ke pasar internasional, meningkatkan pendapatan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, tantangan dalam menjaga daya saing di pasar global juga tetap ada, termasuk dalam hal menghadapi persaingan dengan merek-merek global yang sudah mapan dan memenuhi standar internasional.

b. Dampak Sosial

Globalisasi telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia, termasuk:

1) Budaya dan Identitas

Pada konteks globalisasi, budaya dan identitas Indonesia mengalami pengaruh yang signifikan dari arus informasi dan nilai-nilai asing. Penetrasi media massa dan teknologi informasi telah membawa budaya asing secara lebih meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, menciptakan tantangan dalam menjaga keberagaman budaya dan identitas nasional. Meskipun demikian, globalisasi juga membuka peluang untuk pertukaran budaya yang positif, memungkinkan masyarakat Indonesia untuk terhubung dengan berbagai budaya di seluruh dunia dan memperkaya kekayaan budaya lokal.

Di era globalisasi, Indonesia dihadapkan pada dinamika antara adaptasi terhadap arus budaya global dan upaya untuk mempertahankan warisan budaya tradisional. Perubahan pola konsumsi, gaya hidup, dan preferensi budaya menciptakan tantangan bagi upaya pelestarian budaya lokal, namun juga menawarkan kesempatan bagi inovasi dan kreativitas dalam menyatukan unsur-unsur budaya lokal dan global. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya sambil tetap terbuka terhadap pengaruh dan pertukaran budaya dari luar.

2) Migrasi

Dampak globalisasi terhadap migrasi di Indonesia dapat diamati dari peningkatan mobilitas penduduk, baik secara internal maupun internasional. Proses globalisasi telah mempercepat aliran orang dari daerah pedesaan ke perkotaan, yang menghasilkan urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, globalisasi juga telah memfasilitasi migrasi internasional, baik dalam bentuk tenaga kerja migran yang mencari kesempatan kerja di luar negeri maupun imigrasi orang asing ke Indonesia untuk bekerja atau menetap.



Migrasi yang dipicu oleh globalisasi membawa dampak kompleks bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, migrasi dapat menciptakan peluang ekonomi dan sosial bagi individu dan keluarga yang pindah, dengan memberikan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, migrasi juga dapat menimbulkan tantangan, seperti pemisahan keluarga, integrasi sosial yang sulit, serta risiko eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap para migran, terutama bagi tenaga kerja migran yang bekerja di luar negeri.

### 3) Pendidikan dan Tenaga Kerja

Pada konteks globalisasi, pendidikan dan tenaga kerja di Indonesia telah mengalami dampak yang signifikan. Globalisasi telah meningkatkan permintaan akan keterampilan dan pendidikan yang relevan dengan pasar global, mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bersaing dalam pasar global telah menjadi fokus utama pemerintah dan lembaga pendidikan, dengan memperkenalkan kurikulum yang lebih terkait dengan kebutuhan industri dan teknologi yang berkembang pesat.

Meskipun globalisasi membawa peluang untuk peningkatan pendidikan dan kesempatan kerja, tantangan besar masih ada di hadapan. Kesempatan pendidikan yang merata di seluruh negeri masih belum tercapai sepenuhnya, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil. Selain itu, kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah menjadi masalah serius, memicu ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di Indonesia.

### c. Dampak Lingkungan

Pengaruh globalisasi terhadap lingkungan di Indonesia juga signifikan:

#### 1) Eksploitasi Sumber Daya Alam

Dampak globalisasi terhadap lingkungan di Indonesia tercermin dalam eksploitasi yang intensif terhadap sumber daya alam. Permintaan global akan komoditas seperti batu

bara, kelapa sawit, dan kayu telah mendorong aktivitas ekstraksi yang tidak berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam ini sering kali berdampak negatif pada lingkungan, termasuk deforestasi, kerusakan habitat, dan penurunan kualitas udara dan air.

Selain itu, ketergantungan Indonesia pada ekspor sumber daya alam juga meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global. Perubahan iklim global juga semakin memperparah risiko lingkungan di Indonesia, dengan fenomena seperti peningkatan suhu, tingkat curah hujan yang tidak stabil, dan kenaikan permukaan air laut yang mengancam pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan memperhitungkan dampak lingkungan serta mempromosikan praktik ekonomi yang ramah lingkungan.

## 2) Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan dampak yang signifikan dari globalisasi di Indonesia. Ketergantungan pada ekspor sumber daya alam telah meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim global, dengan fenomena seperti peningkatan suhu, tingkat curah hujan yang tidak stabil, dan kenaikan permukaan air laut yang mengancam pulau-pulau kecil. Perubahan ini berpotensi menyebabkan dampak serius bagi sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan infrastruktur, serta mengancam keberlangsungan ekosistem yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Tantangan ini membutuhkan respons yang holistik dan kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang tak terhindarkan, dan mempromosikan adaptasi yang berkelanjutan. Langkah-langkah seperti pengembangan energi terbarukan, penanaman kembali hutan, peningkatan infrastruktur adaptasi, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan merupakan bagian dari

strategi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim di Indonesia.

d. Dampak Politik

Pada domain politik, globalisasi telah membawa tantangan dan peluang:

1) Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi menjadi aspek penting dalam konteks globalisasi di Indonesia. Melalui keterlibatan dalam perjanjian perdagangan regional dan internasional, Indonesia berupaya memperluas akses pasar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain. Diplomasi ekonomi ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat posisinya dalam peta perdagangan global.

Keterlibatan Indonesia dalam diplomasi ekonomi juga mempengaruhi kebijakan ekonomi domestik dan hubungan bilateral dengan negara-negara mitra dagangnya. Kerjasama ekonomi yang erat dengan negara-negara lain dapat memperkuat hubungan politik, keamanan, dan diplomasi antar-negara. Namun, tantangan dalam diplomasi ekonomi termasuk perbedaan kepentingan antara negara-negara, perubahan dinamika geopolitik global, serta upaya proteksionisme perdagangan dari beberapa negara yang dapat menghambat akses pasar Indonesia di tingkat internasional.

2) Pengaruh Asing

Pengaruh asing memiliki dampak yang signifikan dalam politik Indonesia seiring dengan globalisasi. Ketergantungan pada investasi dan bantuan luar negeri dapat mempengaruhi keputusan politik domestik, dengan negara-negara donor sering kali memiliki kepentingan tertentu yang memengaruhi kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia. Selain itu, pengaruh asing juga dapat terlihat dalam bentuk pengaruh ideologis dan nilai-nilai politik yang diadopsi oleh sebagian masyarakat Indonesia, yang dapat memengaruhi dinamika politik internal negara.

Sementara pengaruh asing memiliki potensi untuk memperkaya gagasan dan inovasi dalam politik Indonesia, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kedaulatan politik dan kebudayaan negara. Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam menavigasi hubungan dengan negara-negara asing untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk membangun kemandirian politik yang kuat dan memperkuat institusi-institusi demokratis untuk mengatasi tekanan pengaruh asing yang tidak diinginkan dalam urusan dalam negeri.

### 3) Perubahan Sosial Politik

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam perubahan sosial politik di Indonesia. Arus informasi dan ideologi yang bebas, terutama melalui media sosial dan internet, telah memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politik dengan lebih bebas dan terbuka. Hal ini telah mengubah lanskap politik Indonesia dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, baik dalam pemilihan umum maupun dalam advokasi untuk perubahan sosial dan politik. Namun, perubahan sosial politik yang cepat juga menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial di Indonesia. Perbedaan pendapat dan polarisasi politik sering kali muncul, menghasilkan ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengelola perubahan ini dengan bijaksana, dengan mempromosikan dialog yang inklusif, memperkuat lembaga demokratis, dan membangun kesepakatan bersama untuk mendorong kemajuan sosial politik yang berkelanjutan.

## 2. Kesimpulan

Dampak globalisasi di Indonesia sangat kompleks, membawa sejumlah manfaat ekonomi dan tantangan sosial, lingkungan, dan politik. Penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengelola dampak-dampak ini secara bijaksana, dengan

memaksimalkan manfaat globalisasi sambil meminimalkan risiko dan kerentanan yang terkait.

## **B. Pengalaman Negara B Dalam Menghadapi Tantangan Global**

### **1. NEGARA JEPANG MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL**

#### **a. Tantangan Ekonomi**

##### **1) Pembangunan Pasca-Perang**

Jepang menghadapi tantangan besar dalam pembangunan pasca-perang setelah Perang Dunia II. Dengan infrastruktur yang hancur dan ekonomi yang lumpuh, negara ini mengadopsi model ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta dengan dukungan pemerintah yang kuat. Strategi kebijakan fiskal dan moneter yang cermat serta fokus pada inovasi dan efisiensi menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi.

Pembangunan pasca-perang Jepang juga melibatkan upaya besar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan membangun kembali kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan. Dengan memperkenalkan reformasi struktural yang signifikan, seperti privatisasi industri dan deregulasi ekonomi, Jepang mampu menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan ekonomi.

##### **2) Demografi**

Jepang menghadapi tantangan serius terkait demografi, dengan populasi yang menua dan laju kelahiran yang rendah. Untuk mengatasi ini, pemerintah Jepang telah mencoba mendorong partisipasi wanita di pasar tenaga kerja dan memperluas kebijakan imigrasi terkontrol untuk memperkuat tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya inovasi teknologi juga ditingkatkan untuk memperbaiki produktivitas tenaga kerja dan mengimbangi dampak penuaan populasi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

b. Tantangan Lingkungan

1) Energi Bersih dan Pengurangan Emisi Karbon

Jepang menghadapi tantangan signifikan terkait energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Negara ini berusaha mencapai kemandirian energi dengan mengadopsi teknologi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin serta investasi dalam mobil listrik. Selain itu, Jepang juga fokus pada pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon di sektor industri dan transportasi guna memenuhi komitmen internasional dalam menghadapi perubahan iklim.

2) Bencana Alam

Jepang secara rutin menghadapi tantangan dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan badai tropis. Negara ini telah melakukan investasi besar dalam infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini untuk melindungi penduduk dan meminimalkan kerugian. Selain itu, juga menekankan pentingnya upaya pemulihan pasca-bencana dan relokasi yang berkelanjutan untuk membangun kembali komunitas yang terkena dampak secara lebih tangguh.

c. Tantangan Global Lainnya

1) Hubungan Internasional

Jepang menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga hubungan internasional dengan negara-negara tetangga dan mitra globalnya, harus memperhatikan dinamika politik dan ekonomi regional, terutama dalam hubungannya dengan Korea Utara dan China, sambil memperkuat kemitraan perdagangan dan diplomasi dengan negara-negara Barat. Dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan keterlibatan global, Jepang terus berupaya untuk berperan aktif dalam forum internasional dan mempromosikan perdamaian dan kerjasama lintas-batas.

Jepang juga dihadapkan pada tekanan untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam era globalisasi yang cepat berubah, harus memperhatikan perkembangan teknologi dan tren ekonomi global serta memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara maju dan berkembang untuk memastikan posisi sebagai pemimpin regional dan

global. Dengan mempertahankan pendekatan pragmatis dan kolaboratif dalam hubungan internasional, Jepang berusaha untuk mengatasi tantangan global yang semakin kompleks dengan keberlanjutan dan kemandirian.

## 2) Teknologi dan Inovasi

Jepang dihadapkan pada tekanan untuk terus mempertahankan keunggulan dalam teknologi dan inovasi di tingkat global. Negara ini telah fokus pada sektor-sektor kunci seperti robotika, kecerdasan buatan, dan kendaraan otonom untuk mempertahankan daya saingnya. Investasi besar dalam riset dan pengembangan menjadi prioritas untuk memastikan Jepang tetap menjadi pusat inovasi yang relevan di pasar global.

Jepang juga berupaya untuk mempromosikan kolaborasi lintas sektor dan lintas batas dalam inovasi teknologi, mengakui pentingnya kemitraan antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan global. Dengan mempertimbangkan tren teknologi global dan mengintegrasikan sumber daya manusia terbaik, Jepang terus menjadi pemimpin dalam mendorong kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

## **C. Strategi dan Kebijakan Yang Efektif Di Negara C**

### **1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN GLOBALISASI YANG EFEKTIF DI AUSTRALIA**

#### a. Latar Belakang

Australia adalah sebuah negara yang terletak di belahan selatan Bumi dan merupakan negara terbesar keenam di dunia menurut luas wilayah. Meskipun memiliki populasi yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayahnya, Australia memiliki ekonomi yang kuat dan terdiversifikasi. Dengan pasar yang terbuka dan orientasi yang kuat pada perdagangan internasional, Australia telah mengadopsi berbagai strategi dan kebijakan globalisasi untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi global.

b. Strategi Globalisasi

1) Diversifikasi Ekonomi

Australia telah menerapkan strategi diversifikasi ekonomi yang kuat. Selain bergantung pada sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian, Australia juga telah mengembangkan sektor jasa, teknologi, pendidikan tinggi, dan pariwisata. Diversifikasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi pasar global.

2) Perdagangan Bebas

Australia telah menjadi pendukung kuat perdagangan bebas dan telah melakukan perjanjian perdagangan dengan berbagai negara dan blok perdagangan di seluruh dunia. Perjanjian-perjanjian ini membuka pintu bagi ekspor Australia ke pasar luar negeri dan memfasilitasi arus modal serta investasi asing ke dalam negeri.

3) Inovasi dan Riset

Australia telah menginvestasikan secara signifikan dalam riset dan inovasi. Melalui dukungan pemerintah dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, Australia telah mempercepat perkembangan teknologi baru dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

## 2. Kebijakan Globalisasi

a. Pendidikan dan Keterampilan

Australia telah fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja Australia, tetapi juga membuatnya lebih kompetitif dalam ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan.

b. Perlindungan Lingkungan

Australia telah mengadopsi kebijakan lingkungan yang progresif untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan mengurangi emisi karbon, melindungi ekosistem unik seperti Great Barrier Reef, dan mendorong inovasi ramah lingkungan, Australia telah



memperkuat citra internasionalnya sebagai negara yang bertanggung jawab secara lingkungan.

c. **Kemitraan Internasional**

Australia secara aktif terlibat dalam kemitraan internasional untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui partisipasinya dalam organisasi multilateral seperti PBB, G20, dan APEC, Australia berperan penting dalam merumuskan kebijakan global yang memperkuat hubungan diplomatik dan ekonominya.

### **3. Dampak dan Kesimpulan**

Strategi dan kebijakan globalisasi yang telah diterapkan oleh Australia telah membawa dampak positif yang signifikan. Australia telah menjadi salah satu ekonomi yang paling tahan terhadap krisis global, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang relatif rendah. Dengan terus memperkuat kerjasama internasional dan meningkatkan daya saingnya, Australia berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam era globalisasi yang terus berubah.





# **BAB IX**

## **PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

---

---

Peran organisasi internasional memiliki dampak yang signifikan dalam mengatur dinamika politik, ekonomi, dan sosial di tingkat global. Pertama-tama, organisasi internasional berfungsi sebagai forum untuk negosiasi dan kerjasama antarnegara dalam menangani isu-isu berskala internasional seperti perdagangan, lingkungan, dan perdamaian dunia. Melalui kerjasama ini, organisasi internasional membantu menciptakan aturan dan standar yang dapat memfasilitasi interaksi antarnegara secara lebih teratur dan damai. Di samping itu, organisasi internasional juga berperan penting dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada negara-negara yang membutuhkan, seperti dalam hal bantuan kemanusiaan, pembangunan ekonomi, atau penanggulangan konflik. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang peran organisasi internasional menjadi kunci dalam upaya untuk memahami dinamika politik global dan merumuskan solusi atas tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat internasional saat ini.

### **A. Peran PBB Dalam Menanggapi Tantangan Global**

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menanggapi tantangan global sangatlah penting dan beragam, meliputi berbagai bidang mulai dari perdamaian dan keamanan hingga pembangunan, hak asasi manusia, kesehatan, lingkungan, dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa contoh relevan mengenai peran PBB dalam menanggapi tantangan global:

## **1. Perdamaian dan Keamanan**

Peran PBB dalam menanggapi tantangan global, khususnya dalam konteks perdamaian dan keamanan, sangat penting dan diakui secara luas oleh para ahli. Menurut John J. Mearsheimer (2019), PBB memiliki peran kunci dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengkoordinasikan upaya-upaya negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pecahnya konflik baru. Organisasi ini juga menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan guna mengatasi ancaman terhadap keamanan internasional, seperti yang dikemukakan oleh Gareth Evans (2018).

Meskipun memiliki peran yang signifikan, PBB juga dihadapkan pada berbagai kritik. Menurut Kenneth N. Waltz (2016), PBB memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan konflik karena tergantung pada kemauan politik negara-negara anggotanya. Selain itu, beberapa negara besar memiliki kekuasaan veto di Dewan Keamanan PBB, yang dapat menghambat respons yang efektif terhadap konflik, seperti yang disoroti oleh Kofi Annan (2015). Meskipun demikian, PBB tetap menjadi kekuatan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global dan terus berupaya meningkatkan efektivitasnya dalam menanggapi tantangan-tantangan tersebut.

## **2. Pembangunan Berkelanjutan**

Peran PBB dalam menanggapi tantangan global juga mencakup pembangunan berkelanjutan, yang telah menjadi fokus utama organisasi ini dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Jeffrey D. Sachs (2015), PBB berperan penting dalam mengarahkan upaya global untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan, terutama melalui Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Organisasi ini memfasilitasi kerjasama antarnegara dan pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ban Ki-moon (2018).

Meskipun terdapat kesepakatan luas tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan, banyak tantangan yang harus diatasi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut Frances Stewart (2022), kesenjangan dalam pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan ketidaksetaraan gender masih menjadi hambatan besar bagi

pembangunan berkelanjutan di banyak negara. Selain itu, tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan memerlukan respons global yang koordinatif dan terkoordinasi, seperti yang diuraikan oleh Jeffrey D. Sachs (2020).

### **3. Hak Asasi Manusia**

Peran PBB dalam menanggapi tantangan global juga mencakup perlindungan dan promosi hak asasi manusia, yang menjadi prinsip fundamental dalam tatanan internasional. Menurut Zeid Ra'ad Al Hussein (2017), Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada saat itu, PBB memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Organisasi ini berperan penting dalam menyuarakan keadilan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana disampaikan oleh Samantha Power (2019).

Meskipun PBB telah membuat kemajuan dalam melindungi hak asasi manusia, tantangan yang signifikan masih ada. Menurut Amnesty International (2023), masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis di banyak negara, termasuk penganiayaan terhadap minoritas, penindasan terhadap pengunjuk rasa, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Selain itu, kelemahan dalam sistem penegakan hukum internasional sering kali menghambat upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan oleh Mary Robinson (2020).

### **4. Pemberantasan Terorisme**

Pemberantasan terorisme adalah salah satu peran penting PBB dalam menanggapi tantangan global, mengingat ancaman yang dihadapi oleh komunitas internasional dari kelompok-kelompok teroris. Menurut Antonio Guterres (2018), Sekretaris Jenderal PBB, terorisme merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan dunia serta hak asasi manusia. PBB memiliki mandat untuk mengkoordinasikan upaya internasional dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, seperti yang diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (2001) dan resolusi-resolusi berikutnya.

Meskipun telah ada upaya internasional yang signifikan dalam memerangi terorisme, tantangan tetap ada dalam mengatasi fenomena ini secara efektif. Menurut Bruce Hoffman (2021), teroris semakin mengadaptasi taktik dan strategi, sementara jaringan terorisme global terus berkembang. Selain itu, upaya pemberantasan terorisme sering kali dihambat oleh perbedaan pandangan politik dan hukum antarnegara, yang mempersulit kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme, sebagaimana yang dijelaskan oleh Richard Barrett (2019).

## **B. Organisasi Regional dan Kolaborasi Antar Negara**

Organisasi regional merujuk pada aliansi atau lembaga yang terdiri dari beberapa negara atau wilayah geografis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi regional ini bisa bervariasi, mulai dari perdagangan bebas, integrasi ekonomi, keamanan, hingga pembangunan sosial dan lingkungan.

### **1. Peran Organisasi Regional dalam Menanggapi Tantangan Global**

Pada era globalisasi ini, tantangan-tantangan kompleks seperti perubahan iklim, keamanan energi, dan krisis kesehatan menuntut respons yang koordinatif dan terpadu dari komunitas internasional. Dalam konteks ini, organisasi regional berperan penting sebagai forum untuk kolaborasi lintas batas dalam menghadapi tantangan global. Dengan memfasilitasi dialog antarnegara dan mempromosikan kerja sama, organisasi regional mampu menjadi motor penggerak dalam merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

#### **a. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi menjadi peran kunci bagi organisasi regional dalam menanggapi tantangan global. Dalam konteks ini, Ahn (2018) menekankan bahwa organisasi regional memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya melalui kerja sama dan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi, seperti yang disebutkan oleh OECD (2017), memungkinkan anggota organisasi untuk saling menguntungkan melalui perdagangan bebas, investasi, dan koordinasi kebijakan. Melalui upaya ini, organisasi regional

dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi terhadap ketidakpastian global.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga menjadi fokus utama bagi organisasi regional dalam menanggapi tantangan global. Menurut Zhang *et al.* (2020), upaya organisasi regional untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi harus diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan aspek sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Bank Dunia (2019), yang menekankan perlunya pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan untuk mengatasi ketimpangan dan perubahan iklim.

b. Pemeliharaan Keamanan

Pemeliharaan keamanan menjadi peran krusial bagi organisasi regional dalam menanggapi tantangan global. Sebagaimana diungkapkan oleh Lee (2017), organisasi regional berperan dalam mempromosikan stabilitas dan perdamaian melalui kerja sama keamanan, penyelesaian konflik, dan pembangunan kapasitas. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Börzel (2019), yang menekankan perlunya kerja sama regional dalam menangani ancaman keamanan lintas batas seperti terorisme dan perdagangan senjata ilegal. Dengan demikian, organisasi regional memiliki peran strategis dalam memelihara stabilitas global.

Organisasi regional juga berperan dalam mengatasi tantangan keamanan non-tradisional yang semakin kompleks. Menurut Nau *et al.* (2020), ancaman seperti perubahan iklim, kejahatan lintas batas, dan pandemi memerlukan respons yang terkoordinasi antar-negara. Hal ini ditegaskan oleh Jensen (2018), yang membahas pentingnya kerja sama regional dalam mitigasi bencana alam dan krisis kesehatan global. Oleh karena itu, organisasi regional menjadi platform penting dalam menanggapi tantangan keamanan yang melintasi batas-batas nasional.

c. Penanganan Tantangan Lingkungan

Penanganan tantangan lingkungan menjadi peran yang sangat penting bagi organisasi regional dalam menanggapi tantangan global. Ahn *et al.* (2019) mencatat bahwa organisasi regional memiliki kesempatan untuk memimpin dalam upaya

perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama lintas batas. Pandangan ini diperkuat oleh Brunnengraber (2020), yang membahas pentingnya koordinasi regional dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Dengan demikian, organisasi regional memiliki potensi besar untuk menjadi motor perubahan dalam melindungi ekosistem global.

Organisasi regional juga memiliki peran strategis dalam mempromosikan pemulihan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Menurut OECD (2018), upaya bersama antar-negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung inovasi teknologi hijau menjadi kunci untuk mengatasi tantangan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Gupta (2021), yang menekankan pentingnya kerja sama regional dalam mengembangkan kebijakan adaptasi dan mitigasi yang efektif. Dengan demikian, organisasi regional memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

d. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana menjadi peran yang sangat penting bagi organisasi regional dalam menanggapi tantangan global. Menurut Kuroiwa *et al.* (2018), kerja sama regional dalam mitigasi risiko bencana dapat memperkuat kapasitas negara-negara untuk merespons dan memulihkan diri setelah bencana terjadi. Pendekatan ini diperkuat oleh Munasinghe (2021), yang membahas pentingnya koordinasi regional dalam membangun sistem peringatan dini dan infrastruktur tanggap darurat. Dengan demikian, organisasi regional memiliki peran krusial dalam meminimalkan dampak bencana dan melindungi kehidupan manusia.

Organisasi regional juga memiliki peran strategis dalam mempromosikan upaya penanggulangan bencana yang berkelanjutan. Menurut UNDRR (2019), pendekatan pembangunan berkelanjutan harus memperhitungkan resiko bencana dan memasukkan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan. Pandangan ini diperkuat oleh Garschagen *et al.* (2020), yang menekankan pentingnya integrasi aspek bencana dalam kebijakan pembangunan regional. Oleh karena itu,



organisasi regional dapat berperan yang signifikan dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

## **2. Tantangan dalam Kolaborasi Antar Negara**

Kolaborasi antarnegara dalam menanggapi tantangan global sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks. Meskipun adanya kesadaran akan pentingnya kerja sama lintas batas, perbedaan kepentingan, budaya, dan kebijakan sering kali menjadi penghalang utama dalam upaya merumuskan solusi bersama. Tantangan ini menekankan perlunya pendekatan yang cermat dan strategis dalam membangun kerja sama yang efektif di tingkat internasional.

### **a. Kedaulatan Nasional**

Kedaulatan nasional sering menjadi tantangan utama dalam kolaborasi antar negara dalam menanggapi tantangan global. Menurut Keohane (2017), negara-negara cenderung memprioritaskan kepentingan nasional sendiri, yang dapat menghambat kerja sama internasional dalam menanggapi masalah global. Hal ini diperkuat oleh pandangan Waltz (2019), yang menekankan bahwa negara-negara sering kali lebih fokus pada pemeliharaan kedaulatan daripada pada kerja sama internasional yang memerlukan pengorbanan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kesulitan untuk mengatasi hambatan kedaulatan nasional sering kali menjadi penghalang bagi upaya kolaborasi antar negara.

Pada konteks globalisasi yang semakin kompleks, kebutuhan untuk menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kerja sama internasional semakin mendesak. Menurut Cohen (2021), tantangan seperti perubahan iklim, keamanan cyber, dan pandemi menyadarkan negara-negara akan perlunya berkolaborasi lintas batas untuk mencapai solusi yang efektif. Pandangan ini diperkuat oleh Thomas (2018), yang membahas pentingnya kerja sama internasional dalam menanggapi masalah global yang tidak dapat diatasi secara efektif oleh satu negara secara mandiri. Oleh karena itu, negara-negara perlu mengatasi tantangan kedaulatan nasional untuk menciptakan kerangka kerja sama yang lebih efektif dalam menanggapi tantangan global.

b. Perbedaan Budaya dan Politik

Perbedaan budaya dan politik sering menjadi tantangan signifikan dalam kolaborasi antar negara dalam menanggapi tantangan global. Menurut Hofstede (2018), perbedaan budaya antar negara dapat menghambat proses komunikasi dan pemahaman antar pihak yang terlibat dalam kerja sama internasional. Hal ini diperkuat oleh pandangan Huntington (2017), yang mengemukakan bahwa konflik budaya menjadi salah satu sumber utama ketegangan antar negara dalam dunia global saat ini. Oleh karena itu, kesulitan untuk menavigasi perbedaan budaya dapat menjadi penghalang dalam upaya kolaborasi antar negara.

Perbedaan politik antar negara juga dapat menjadi hambatan dalam kerja sama internasional. Menurut Keohane dan Nye (2020), kepentingan politik yang berbeda antar negara seringkali menyulitkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan dalam forum internasional. Pandangan ini diperkuat oleh Bull (2016), yang membahas kompleksitas diplomasi internasional dalam mengatasi perbedaan politik yang mendasari kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, tantangan untuk menanggulangi perbedaan politik dapat menghambat efektivitas kerja sama antar negara dalam menanggapi tantangan global.

c. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi menjadi tantangan krusial dalam kolaborasi antar negara dalam menanggapi tantangan global. Menurut Stiglitz (2018), ketimpangan ekonomi antara negara-negara dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang merugikan bagi kerja sama internasional. Hal ini diperkuat oleh pikiran Piketty (2017), yang membahas hubungan antara ketimpangan ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dan ketegangan sosial. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi yang luas dapat menghambat upaya bersama antar negara dalam menanggapi tantangan global.

Ketimpangan ekonomi juga dapat memperburuk ketegangan antar negara dan merusak hubungan diplomatis. Menurut Milanovic (2020), perbedaan ekonomi yang besar antara

negara-negara dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kekuatan politik dan memperkuat ketegangan geopolitik. Pandangan ini diperkuat oleh El-Erian (2019), yang menekankan bahwa ketimpangan ekonomi global dapat menjadi sumber konflik dan instabilitas di arena internasional. Oleh karena itu, untuk mencapai kerja sama antar negara yang efektif dalam menanggapi tantangan global, perlu ada upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada.

### **3. Strategi untuk Meningkatkan Kolaborasi Antar Negara**

Untuk menghadapi kompleksitas tantangan global, strategi untuk meningkatkan kolaborasi antarnegara menjadi semakin penting. Pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada solusi dapat menjadi landasan dalam memperkuat kerja sama lintas batas. Dengan memperhatikan keberagaman budaya, kepentingan, dan kapasitas negara-negara yang terlibat, strategi ini dapat memfasilitasi pembentukan aliansi yang efektif untuk merespons tantangan global dengan lebih efisien dan berdaya tahan.

#### **a. Diplomasi dan Dialog**

Diplomasi dan dialog menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan kolaborasi antar negara dalam menanggapi tantangan global. Menurut Kissinger (2016), diplomasi berperan krusial dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antar negara untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Evans (2019), yang menekankan pentingnya dialog terbuka dan jujur dalam mengatasi perbedaan pandangan dan mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, diplomasi dan dialog menjadi alat utama dalam membangun kerja sama antar negara.

Diplomasi dan dialog juga membantu membangun kepercayaan antar negara dan memperkuat hubungan internasional. Menurut Cooper (2017), diplomasi yang dipimpin oleh prinsip saling menghormatan dan keadilan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerja sama yang berkelanjutan. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Schultz (2020), yang menekankan pentingnya dialog antar negara dalam menciptakan rasa saling menghargai dan saling memahami di antara pihak-

pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diplomasi dan dialog tidak hanya memfasilitasi kerja sama praktis, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan antar negara yang harmonis.

b. Kesepakatan dan Perjanjian

Kesepakatan dan perjanjian menjadi strategi penting untuk meningkatkan kolaborasi antar negara dalam menanggapi tantangan global. Menurut Keohane dan Martin (2019), kesepakatan internasional berperan vital dalam menciptakan kerangka kerja sama yang mengikat dan memberikan insentif bagi negara-negara untuk mematuhi komitmen. Hal ini diperkuat oleh pendapat Brown (2017), yang menekankan pentingnya perjanjian internasional dalam mengatur perilaku negara-negara dan mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan perdagangan bebas. Dengan demikian, kesepakatan dan perjanjian menjadi alat efektif dalam memperkuat kolaborasi antar negara.

Kesepakatan dan perjanjian juga membantu menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di tingkat global. Menurut Abbott *et al.* (2020), kesepakatan internasional memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi dan politik di seluruh dunia, yang penting untuk mempromosikan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Goldstein *et al.* (2018), yang membahas peran perjanjian perdagangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di banyak negara. Oleh karena itu, kesepakatan dan perjanjian dapat menjadi instrumen yang kuat dalam memajukan kerja sama antar negara.

c. Pemberdayaan Masyarakat Sipil

Pemberdayaan masyarakat sipil menjadi strategi yang signifikan dalam meningkatkan kolaborasi antar negara dalam menanggapi tantangan global. Menurut Avila (2019), masyarakat sipil memiliki peran yang penting dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi warga negara, serta memonitor kebijakan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Edwards (2018), yang menekankan bahwa

partisipasi aktif masyarakat sipil dapat membantu memperkuat demokrasi dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sipil dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kolaborasi antar negara.

Pemberdayaan masyarakat sipil juga dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antar negara. Menurut Jenkins (2020), organisasi masyarakat sipil seringkali menjadi sumber inovasi dan solusi untuk tantangan global, dan kerja sama lintas batas antara organisasi semacam itu dapat mempercepat penyebaran ide dan strategi yang efektif. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Putnam (2016), yang membahas peran jaringan masyarakat sipil internasional dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mencari solusi bersama atas masalah-masalah global. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sipil tidak hanya memperkuat kerja sama antar negara, tetapi juga mempromosikan inovasi dan pembelajaran bersama.

### **C. Isu-Isu Kemanusiaan Global dan Tanggapan Organisasi Internasional**

Isu-isu kemanusiaan global meliputi berbagai masalah yang mempengaruhi kesejahteraan dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik bersenjata, kelaparan, kemiskinan, bencana alam, pandemi, migrasi massal, pelanggaran hak asasi manusia, dan perubahan iklim.

#### **1. Jenis-Jenis Isu Kemanusiaan Global**

Untuk menghadapi tantangan global, pemahaman terhadap jenis-jenis isu kemanusiaan global menjadi krusial. Isu-isu tersebut meliputi perubahan iklim yang mengakibatkan bencana alam yang merusak, konflik bersenjata yang mengakibatkan pengungsi dan kelaparan, serta kesenjangan ekonomi yang meluas yang memperburuk ketidaksetaraan dan kemiskinan.

##### **a. Konflik Bersenjata**

Konflik bersenjata menjadi salah satu isu kemanusiaan global yang menuntut respons serius dalam menghadapi tantangan

global. Menurut Deen Chatterjee (2017), konflik bersenjata sering kali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang meresahkan, seperti penggunaan kekerasan terhadap warga sipil dan pemaksaan pengungsi. Penelitian oleh Flew dan Humphreys (2017) menunjukkan bahwa konflik bersenjata juga dapat menciptakan kondisi ekonomi yang memburuk, menghalangi akses terhadap sumber daya penting, dan merusak infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Pada konteks ini, organisasi kemanusiaan global seperti Amnesty International (2018) dan Human Rights Watch (2019) berperan penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik bersenjata, juga mendesak komunitas internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan kepada korban konflik. Dari sudut pandang keamanan global, Liotta dan Owen (2015) membahas bahwa konflik bersenjata dapat mempengaruhi stabilitas regional dan mengancam perdamaian dunia.

b. Kelaparan dan Kekurangan Gizi

Kelaparan dan kekurangan gizi menjadi salah satu isu kemanusiaan global yang memerlukan perhatian mendesak dalam menanggapi tantangan global. Menurut Badalamenti *et al.* (2018), kelaparan tidak hanya menjadi masalah distribusi pangan, tetapi juga terkait dengan akses yang tidak merata terhadap sumber daya, politik pangan yang tidak efektif, dan perubahan iklim yang mempengaruhi hasil pertanian. Penelitian oleh Hoddinott *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada anak-anak dapat berdampak serius pada perkembangan fisik dan kognitif, menghambat potensi ekonomi dan sosial di masa depan.

Organisasi internasional seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Food Programme* (WFP) terus berupaya untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi di seluruh dunia. FAO (2020) menekankan pentingnya mendukung pertanian berkelanjutan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Di sisi lain, WFP (2021) fokus pada pemberian bantuan pangan darurat kepada yang terdampak langsung oleh kelaparan dan krisis pangan.

c. Bencana Alam

Bencana alam merupakan salah satu isu kemanusiaan global yang mengakibatkan dampak serius bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Menurut Kirsch *et al.* (2019), bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai tropis dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan mengakibatkan krisis kesehatan. Penelitian oleh Kelman *et al.* (2018) membahas bahwa perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap risiko tersebut.

Untuk menanggapi tantangan global yang ditimbulkan oleh bencana alam, organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah dan Badan Bantuan Internasional (OCHA) berperan penting dalam memberikan bantuan darurat kepada korban bencana. Menurut IFRC (2020), upaya pencegahan dan mitigasi juga penting dalam mengurangi dampak bencana alam, termasuk pembangunan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan kapasitas tanggap darurat di tingkat lokal.

d. Pandemi

Pandemi merupakan salah satu isu kemanusiaan global yang menghadirkan tantangan serius bagi masyarakat di seluruh dunia. Menurut Murray *et al.* (2018), pandemi seperti yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dapat mengakibatkan ribuan kematian, mengganggu sistem kesehatan, dan menimbulkan dampak ekonomi yang luas. Penelitian oleh Horton *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pandemi juga memperburuk ketidaksetaraan kesehatan global, dengan mempengaruhi secara disproprorsional masyarakat yang rentan dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Untuk menanggapi tantangan global yang dihadirkan oleh pandemi, kerjasama internasional dan koordinasi antar negara menjadi kunci dalam upaya mitigasi dan pengendalian penyebaran penyakit. Menurut World Health Organization (WHO, 2021), peran lembaga kesehatan global dalam memberikan pedoman, saran, dan dukungan teknis kepada negara-negara anggota sangat penting dalam menangani pandemi. Selain itu, pentingnya investasi dalam penelitian dan

pengembangan vaksin serta obat-obatan untuk melawan penyakit-penyakit menular menjadi sorotan utama dalam respons global terhadap pandemi (Gostin *et al.*, 2017).

## **2. Tanggapan Organisasi Internasional terhadap Isu-isu Kemanusiaan Global**

Organisasi internasional seperti PBB, UNICEF, WHO, dan organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International, serta banyak organisasi bantuan kemanusiaan lainnya, berperan penting dalam menanggapi isu-isu kemanusiaan global. Tanggapan ini sering kali meliputi:

### **a. Bantuan Kemanusiaan**

Bantuan kemanusiaan menjadi respons yang penting dari organisasi internasional terhadap isu-isu kemanusiaan global. Menurut Slim (2015), bantuan kemanusiaan mencakup berbagai bentuk bantuan darurat, seperti makanan, air bersih, perlindungan, dan layanan kesehatan bagi yang terdampak oleh konflik, bencana alam, atau krisis lainnya. Organisasi kemanusiaan global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Palang Merah, dan Badan Bantuan Internasional (OCHA) berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai belahan dunia (Albala-Bertrand, 2017).

Pentingnya bantuan kemanusiaan tidak hanya terbatas pada respons darurat, tetapi juga dalam mempromosikan pemulihan dan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut UNDP (2020), bantuan kemanusiaan yang efektif harus terintegrasi dengan upaya pembangunan jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang terkena dampak krisis. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih luas untuk mengatasi akar penyebab konflik, kemiskinan, dan ketidaksetaraan (Devictor, 2018).

### **b. Advokasi dan Pendidikan**

Advokasi dan pendidikan merupakan dua pendekatan penting dari organisasi internasional dalam menanggapi isu-isu kemanusiaan global. Menurut Sumner *et al.* (2016), advokasi berperan krusial dalam menyuarakan kepentingan dan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan atau terdampak oleh krisis



kemanusiaan, seperti pengungsi, anak-anak yang terkena konflik, atau komunitas yang terkena bencana alam.

Pendidikan juga dianggap sebagai elemen kunci dalam menanggapi isu-isu kemanusiaan global, terutama dalam membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapi krisis dan mempromosikan pemahaman tentang hak asasi manusia, perdamaian, dan kerjasama internasional. Menurut UNESCO (2022), pendidikan untuk perdamaian dan kemanusiaan penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan toleran, serta mengurangi ketegangan dan konflik di tingkat global. Organisasi-organisasi seperti UNICEF dan UNHCR berperan dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi dan yang terdampak konflik atau bencana (Salami, 2018).

c. Penyediaan Bantuan Pembangunan

Penyediaan bantuan pembangunan merupakan salah satu respons penting dari organisasi internasional terhadap isu-isu kemanusiaan global. Menurut Easterly (2018), bantuan pembangunan bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. Organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) terlibat dalam memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara yang membutuhkan (Acemoglu *et al.*, 2019).

Pentingnya bantuan pembangunan terletak pada kemampuannya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat di seluruh dunia. Menurut Sachs (2015), pembangunan yang berkelanjutan memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur fisik dan sosial, termasuk transportasi, energi, air bersih, dan layanan kesehatan. Lebih lanjut, bantuan pembangunan juga dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik yang penting untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan (Stiglitz *et al.*, 2020).

d. Penyelidikan dan Pelaporan

Penyelidikan dan pelaporan menjadi respons yang penting dari organisasi internasional terhadap isu-isu kemanusiaan global. Menurut Power *et al.* (2019), penyelidikan yang komprehensif dapat membantu mengungkap pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang, dan ketidakadilan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch berperan dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan laporan yang mendokumentasikan temuan (Kaldor *et al.*, 2018).

Pelaporan hasil penyelidikan menjadi kunci dalam membangun kesadaran publik, meningkatkan tekanan politik, dan memperjuangkan keadilan bagi korban. Menurut Slim (2021), laporan yang disampaikan secara jelas dan faktual dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, menggerakkan gerakan advokasi, dan memicu tindakan konkret untuk menanggapi isu-isu kemanusiaan global. Selain itu, pelaporan juga dapat memberikan suara kepada yang tidak terdengar dan memperjuangkan hak-haknya di tingkat internasional (Fisher *et al.*, 2017).



# BAB X

## TANTANGAN ETIKA DAN HAM DALAM KONTEKS GLOBALISASI

---

---

Tantangan etika dan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks globalisasi menyorot kompleksitas hubungan antara nilai-nilai universal dan kepentingan nasional serta korporat di era terhubung ini. Pertama-tama, globalisasi membawa perubahan besar dalam tatanan ekonomi, politik, dan sosial yang dapat mempengaruhi prinsip-prinsip etika dan HAM di berbagai tingkatan. Perubahan ini seringkali menghadirkan dilema moral, seperti antara kebebasan ekonomi dan hak-hak pekerja, atau antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Di samping itu, globalisasi juga menghadirkan tantangan baru dalam melindungi HAM di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat, dengan beberapa negara atau perusahaan memperjuangkan keuntungan ekonomi di atas prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas tantangan etika dan HAM dalam konteks globalisasi menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan di tingkat lokal dan global.

### A. Masalah Etika dalam Perdagangan Global

Masalah etika dalam perdagangan global mencakup berbagai aspek yang melibatkan praktik bisnis, keadilan sosial, dan dampak lingkungan. Berikut ini adalah beberapa contoh masalah etika yang sering muncul dalam perdagangan global:

#### 1. Kondisi Kerja dan Hak Buruh

Kondisi kerja dan hak buruh dalam konteks perdagangan global merupakan isu yang kompleks dan sensitif dalam bidang etika. Para ahli

telah lama mengidentifikasi masalah ini sebagai tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Menurut Sen (2015), kondisi kerja yang buruk dan pelanggaran hak buruh di negara-negara berkembang seringkali terjadi karena persaingan global yang mendorong praktik eksploitasi dan pemerasan tenaga kerja. Hal ini diperparah oleh kurangnya regulasi dan penegakan hukum yang kuat dalam beberapa negara. Organisasi Buruh Internasional (ILO) telah berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak buruh di seluruh dunia. Menurut laporan terbaru ILO (2020), penting bagi negara-negara untuk memastikan bahwa standar kerja yang layak diterapkan secara universal, tanpa diskriminasi, dan dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi. Namun, implementasi standar-standar ini sering kali terhambat oleh kepentingan ekonomi dan politik yang kuat di tingkat nasional dan global.

## **2. Eksploitasi Sumber Daya Alam**

Eksploitasi sumber daya alam dalam konteks perdagangan global menjadi isu etika yang semakin mendapat perhatian. Ahli-ahli telah membahas dampak negatif dari praktik eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Menurut Gupta (2017), banyak negara berkembang mengalami eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya, seringkali tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga menjadi perhatian serius dalam kaitannya dengan keadilan global. Seperti yang diungkapkan oleh Kapstein (2019), negara-negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung menghadapi tekanan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya demi kepentingan ekonomi nasional, tanpa memperhitungkan konsekuensi global dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi.

## **3. Korupsi**

Korupsi menjadi masalah etika yang meresap dalam perdagangan global, merusak kepercayaan dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Transparency International

(2021), korupsi mempengaruhi berbagai aspek perdagangan internasional, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan kontrak, dan dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Praktik korupsi ini juga menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat, menghambat persaingan yang adil, dan merugikan pelaku usaha yang jujur. Korupsi dalam perdagangan global tidak hanya memengaruhi sektor swasta, tetapi juga lembaga publik di tingkat nasional dan internasional. Menurut Galtung (2018), korupsi dapat membentuk pola perilaku yang merugikan dalam sistem perdagangan global, dengan menguntungkan pihak-pihak yang memiliki akses dan kekuatan politik untuk memanipulasi kebijakan dan regulasi. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pasar dan peluang bisnis, menghambat perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **4. Pajak dan Kepatuhan Peraturan**

Pajak dan kepatuhan peraturan merupakan isu etika yang signifikan dalam perdagangan global, mempengaruhi keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Menurut Piketty (2019), praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional telah menjadi perhatian utama dalam debat tentang distribusi kekayaan dan pendapatan di tingkat global. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar antara perusahaan besar yang dapat memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak dan bisnis kecil yang harus membayar pajak penuh. Kepatuhan peraturan pajak juga menjadi masalah etika penting dalam konteks perdagangan global. Menurut Zucman (2018), upaya-upaya untuk mengurangi beban pajak melalui praktik penghindaran dan pencucian uang dapat merugikan negara-negara berkembang yang bergantung pada pendapatan pajak untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi di antara negara-negara dengan tingkat kepatuhan peraturan pajak yang berbeda.

## **B. Tantangan Hak Asasi Manusia Dalam Era Globalisasi**

Tantangan terkait hak asasi manusia dalam era globalisasi menghadirkan dinamika yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

## **1. Eksploitasi Tenaga Kerja**

Eksploitasi tenaga kerja menjadi tantangan serius terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dalam era globalisasi. Para ahli mengidentifikasi bahwa globalisasi ekonomi telah memperkuat praktik eksploitasi, terutama di negara-negara berkembang. Menurut ILO (2017), eksploitasi kerja meliputi pekerjaan yang tidak layak, upah rendah, jam kerja yang berlebihan, dan kurangnya hak-hak dasar pekerja. Hal ini bertentangan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal PBB yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kondisi kerja yang adil dan memadai (PBB, 1948). Dalam era globalisasi, praktik eksploitasi tenaga kerja sering kali terkait dengan upaya mengejar keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja. Menurut Bales (2016), globalisasi telah memperluas pasar kerja tanpa aturan yang jelas, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi. Selain itu, Negara-negara dengan hukum ketenagakerjaan yang lemah cenderung menjadi tempat eksploitasi yang lebih besar (Gallagher, 2019).

## **2. Kesenjangan Ekonomi**

Kesenjangan ekonomi merupakan tantangan serius terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dalam era globalisasi. Menurut Stiglitz (2015), globalisasi ekonomi cenderung meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya bagi sebagian besar populasi dunia (Anand & Segal, 2017). Dalam konteks globalisasi, keuntungan ekonomi sering kali terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil individu atau perusahaan multinasional, sementara banyak orang terpinggirkan dan menderita akibat ketidaksetaraan tersebut (Milanovic, 2016).

Kesenjangan ekonomi juga dapat memperburuk kondisi ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Menurut Oxfam (2020), konsentrasi kekayaan yang ekstrem sering kali memungkinkan kelompok-kelompok berpengaruh untuk memanipulasi kebijakan publik dan sistem hukum, sehingga merugikan yang kurang beruntung. Hal ini melanggar prinsip-prinsip HAM yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk perlakuan yang adil di mata hukum (PBB, 1948). Kesenjangan ekonomi juga dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan

dan perlindungan hukum. Menurut Oxfam (2020), konsentrasi kekayaan yang ekstrem sering kali memungkinkan kelompok-kelompok berpengaruh untuk memanipulasi kebijakan publik dan sistem hukum, sehingga merugikan yang kurang beruntung. Hal ini melanggar prinsip-prinsip HAM yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk perlakuan yang adil di mata hukum (PBB, 1948).

### **3. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim menjadi tantangan serius terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dalam era globalisasi. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) (2018), perubahan iklim menyebabkan dampak yang merugikan terhadap hak-hak dasar manusia seperti akses terhadap air bersih, pangan, kesehatan, dan tempat tinggal. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kemampuan individu dan komunitas untuk mengatasi risiko yang terkait dengan perubahan iklim (Adger *et al.*, 2019). Dalam konteks globalisasi, perubahan iklim juga dapat meningkatkan migrasi paksa, konflik, dan ketidakstabilan politik yang mengancam hak asasi manusia di berbagai belahan dunia (Salehyan & Hendrix, 2017).

Perubahan iklim juga memperkuat ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan, memperburuk kondisi kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat dan penduduk miskin di negara-negara berkembang. Menurut Huggins *et al.* (2021), yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan informasi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti bencana alam dan kekurangan pangan. Hal ini melanggar prinsip-prinsip HAM yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang dalam kondisi yang aman dan layak (PBB, 1948). Perubahan iklim juga memperkuat ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan, memperburuk kondisi kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat dan penduduk miskin di negara-negara berkembang. Menurut Huggins *et al.* (2021), yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan informasi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti bencana alam dan kekurangan pangan. Hal ini melanggar prinsip-prinsip HAM yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk

hidup dan berkembang dalam kondisi yang aman dan layak (PBB, 1948).

#### **4. Ketidaksetaraan Gender**

Ketidaksetaraan gender menjadi tantangan utama terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dalam era globalisasi. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) (2019), meskipun ada kemajuan dalam mengatasi ketidaksetaraan gender, perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam berbagai bidang, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Hal ini menciptakan ketimpangan yang melanggar hak-hak dasar perempuan seperti hak atas kesetaraan dan keadilan (UN, 2015). Dalam konteks globalisasi, perubahan ekonomi dan sosial sering kali memperkuat struktur patriarki yang membatasi perempuan dalam mencapai potensi penuh (Kabeer, 2016).

Ketidaksetaraan gender juga berdampak pada kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi global. Menurut World Bank (2020), ketidaksetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perempuan yang terpinggirkan dari pasar tenaga kerja memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Duflo, 2012). Ketidaksetaraan gender juga berdampak pada kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi global. Menurut World Bank (2020), ketidaksetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perempuan yang terpinggirkan dari pasar tenaga kerja memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Duflo, 2012).

### **C. Penegakan HAM di Tingkat Internasional**

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat internasional dalam era globalisasi adalah proses yang kompleks dan terus berkembang. Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap bagaimana HAM dipahami, dilindungi, dan ditegakkan di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa poin yang relevan untuk menjelaskan penegakan HAM di era globalisasi:



## **1. Standar Internasional HAM**

Standar Internasional HAM menjadi krusial dalam era globalisasi untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan di tingkat internasional. Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im (2016), globalisasi mendorong perlunya adopsi standar internasional HAM sebagai bentuk respons terhadap tantangan universal yang dihadapi manusia. Standar ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai universal, tetapi juga memastikan perlindungan hak asasi manusia di tengah dinamika global. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dinah Shelton (2015), yang menekankan bahwa standar internasional HAM memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan hak asasi manusia di tingkat internasional. Menurut Ahmer Bilal Soofi (2018), dalam konteks globalisasi, Standar Internasional HAM berperan sebagai instrumen penting untuk memperkuat sistem perlindungan HAM di tingkat internasional. Globalisasi telah menciptakan kompleksitas baru dalam pelanggaran HAM, sehingga diperlukan respons yang lebih efektif melalui kerangka kerja standar internasional. Standar ini memberikan landasan yang kokoh bagi lembaga-lembaga internasional dan negara-negara untuk bertindak dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM di tengah dinamika global yang terus berubah.

## **2. Peran Organisasi Internasional**

Organisasi internasional berperan krusial dalam penegakan HAM di tingkat global, khususnya dalam era globalisasi. Menurut Simon Chesterman (2017), organisasi seperti PBB, Uni Eropa, dan Amnesty International memiliki peran penting dalam memonitor dan menegakkan standar HAM di seluruh dunia. Menyediakan platform untuk advokasi, pemantauan, dan penegakan HAM yang melintasi batas-batas nasional. Sejalan dengan itu, Laura H. Kistemaker (2020) menekankan bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk memobilisasi dukungan internasional dan memperkuat tekanan politik terhadap negara-negara yang melanggar HAM. Tantangan yang dihadapi oleh organisasi internasional dalam penegakan HAM tidak bisa diabaikan. Menurut Ryan Goodman (2019), keterbatasan kekuatan politik dan sumber daya dapat menghambat efektivitas organisasi dalam menanggapi pelanggaran HAM yang kompleks. Selain itu, Susan Marks (2018) mencatat bahwa adanya persaingan kepentingan antara

negara-negara anggota dalam organisasi internasional kadang-kadang memperlambat respons terhadap pelanggaran HAM.

### **3. Peran Negara-negara Kuat**

Negara-negara kuat berperan signifikan dalam penegakan HAM di tingkat internasional, terutama dalam era globalisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Anne-Marie Slaughter (2019), negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang memungkinkan untuk mempengaruhi agenda HAM secara global. Melalui diplomasi, sanksi ekonomi, atau intervensi militer, negara-negara kuat dapat berperan kunci dalam menanggapi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia. Namun, peran negara-negara kuat dalam penegakan HAM juga seringkali diperdebatkan. Menurut Anne Orford (2017), kebijakan luar negeri negara-negara kuat seringkali dipandu oleh kepentingan politik dan ekonomi nasional, yang dapat mengorbankan prinsip-prinsip HAM. Sebagai contoh, upaya Amerika Serikat dalam "perang melawan terorisme" telah menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran HAM yang sistematis.

### **4. Tantangan Globalisasi terhadap HAM**

Tantangan globalisasi terhadap penegakan HAM di tingkat internasional menjadi semakin kompleks dalam era globalisasi. Menurut Susan Waltz (2016), globalisasi telah menciptakan dinamika ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi implementasi HAM di berbagai negara. Perdagangan bebas, migrasi, dan interkoneksi ekonomi global seringkali berdampak pada pemenuhan atau pelanggaran HAM. Sementara itu, Sabine Selchow (2018) membahas bahwa globalisasi telah menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menyebabkan penindasan terhadap kelompok-kelompok rentan dan memperkuat struktur kekuasaan yang membatasi akses terhadap HAM. Selain itu, pertumbuhan teknologi dan informasi dalam era globalisasi juga memunculkan tantangan baru dalam penegakan HAM. Menurut Rebecca MacKinnon (2017), internet dan media sosial memberikan platform baru bagi aktivis HAM untuk memperjuangkan hak-haknya, tetapi juga dapat digunakan oleh pemerintah otoriter untuk memantau, mengintimidasi, atau membatasi kebebasan berbicara dan berorganisasi. Tantangan ini memerlukan keseimbangan yang rumit

antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap keamanan dan privasi.





# **BAB XI**

## **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KONTEKS GLOBALISASI**

---

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks globalisasi menawarkan perspektif yang penting dalam merumuskan strategi untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang di era terhubung ini. Pertama-tama, globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia dengan memperluas kesempatan akses terhadap teknologi, pasar, dan sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini juga membawa tantangan, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, degradasi lingkungan, dan meningkatnya ketimpangan sosial, yang memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pembangunan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara globalisasi dan pembangunan berkelanjutan menjadi penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan di seluruh dunia.

### **A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang menempatkan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan secara seimbang. Di era globalisasi seperti sekarang ini, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting karena tantangan-tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks globalisasi, pembangunan berkelanjutan menjadi relevan karena:

## **1. Interkonektivitas Global**

Interkonektivitas global merupakan konsep yang penting dalam pembangunan berkelanjutan di era globalisasi. Hal ini mengacu pada hubungan yang semakin kompleks dan saling tergantung antara negara, wilayah, dan individu di seluruh dunia. Menurut Acharya (2017), interkonektivitas global mencakup integrasi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang melampaui batas-batas nasional. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, interkonektivitas global memungkinkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (The World Bank, 2018). Oleh karena itu, interkonektivitas global dilihat sebagai kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diuraikan dalam Agenda 2030 PBB (United Nations, 2015).

Salah satu dampak positif dari interkonektivitas global adalah terciptanya peluang ekonomi yang lebih luas dan inklusif. Menurut Sassen (2016), interkonektivitas global memungkinkan negara-negara berkembang untuk terlibat dalam rantai pasokan global dan meningkatkan akses ke pasar internasional. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara negara-negara dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, interkonektivitas global juga memiliki tantangan, seperti meningkatnya ketidaksetaraan dan kerentanan terhadap krisis global (IMF, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif antarnegara untuk mengelola dampak negatif dari interkonektivitas global dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara merata.

## **2. Peningkatan Konsumsi dan Produksi**

Peningkatan konsumsi dan produksi menjadi fokus penting dalam pembangunan berkelanjutan di era globalisasi. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh banyak negara dan juga menghadirkan tantangan terkait penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) (2019), peningkatan konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan kerentanan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model konsumsi dan produksi yang

memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Ahli ekonomi Ling *et al.* (2017) membahas perlunya mengubah pola konsumsi dan produksi agar lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di sisi lain, penelitian oleh World Resources Institute (WRI) (2021) menekankan pentingnya inovasi teknologi dan kebijakan yang mendukung transisi ke model konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Dengan menggabungkan pendekatan dari berbagai bidang, seperti teknologi, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat, peningkatan konsumsi dan produksi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan berkelanjutan di era globalisasi.

### **3. Ketidaksetaraan Ekonomi**

Ketidaksetaraan ekonomi menjadi isu sentral dalam pembangunan berkelanjutan di era globalisasi. Menurut Piketty (2014), ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan antara individu dan negara-negara dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Data dari Credit Suisse (2022) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan kesenjangan antara kaya dan miskin semakin membesar. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga meluas ke bidang sosial dan politik, mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Stiglitz (2015), ketidaksetaraan ekonomi dapat menghambat mobilitas sosial dan merusak dasar-dasar demokrasi. Hal ini karena ketidaksetaraan cenderung menghasilkan konsentrasi kekuatan dan pengaruh pada segelintir individu atau kelompok, sementara mayoritas masyarakat terpinggirkan. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi juga dapat memperburuk ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan (OECD, 2020). Oleh karena itu, penanggulangan ketidaksetaraan menjadi prioritas dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

#### **4. Perlindungan Lingkungan**

Perlindungan lingkungan merupakan aspek penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan di era globalisasi. Para ahli seperti Sachs (2015) menekankan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan menjadi prioritas untuk mencegah kerusakan ekosistem yang dapat mengancam kesejahteraan manusia dan planet ini. Data dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2021) menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar bagi manusia dan lingkungan, memerlukan tindakan kolektif dari seluruh dunia untuk mengatasi dampaknya.

Perlindungan lingkungan juga melibatkan upaya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Menurut Lele *et al.* (2019), penurunan biodiversitas dan kerusakan ekosistem telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, membutuhkan langkah-langkah konservasi yang lebih proaktif dan komprehensif. Organisasi lingkungan seperti Greenpeace (2023) menekankan perlunya transisi menuju ekonomi berbasis sumber daya terbarukan dan ramah lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan habitat alami, dan promosi energi bersih sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi krisis lingkungan.

### **B. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Praktek Global**

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Praktek global dalam pembangunan berkelanjutan mencakup serangkaian prinsip yang mengarah pada penggunaan sumber daya secara bijaksana, pelestarian lingkungan, inklusi sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Berikut adalah beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan dalam praktek global:



## **1. Pemanfaatan Sumber Daya secara Berkelanjutan**

Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan merupakan prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlunya memelihara keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan keberlanjutan lingkungan. Menurut Daly dan Farley (2010), pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan melibatkan penggunaan sumber daya alam dengan cara yang tidak melebihi tingkat regenerasinya serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pendekatan ini diakui sebagai kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan manusia saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan (Wiek *et al.*, 2012). Dalam praktik global, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan air dan energi hingga pemanfaatan lahan dan keanekaragaman hayati (UNEP, 2016).

Kunci keberhasilan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan terletak pada integrasi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Sachs (2015), pendekatan holistik seperti ini memungkinkan adanya harmoni antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan akses terhadap sumber daya, dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam prakteknya, hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong inovasi teknologi hijau, investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan, dan promosi gaya hidup berkelanjutan (Spangenberg, 2017). Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan prinsip ini dengan memastikan bahwa keputusan ekonomi dan investasi didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (World Bank, 2018).

## **2. Pelestarian Lingkungan**

Pelestarian lingkungan adalah salah satu prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlunya melindungi dan memelihara ekosistem serta keanekaragaman hayati bumi. Menurut Wilson (2016), pelestarian lingkungan merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan ekologis yang mendukung kehidupan manusia dan spesies lainnya. Dalam praktek global, pelestarian lingkungan mencakup upaya perlindungan habitat alami, pengurangan polusi, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab (Rockström *et*

*al.*, 2017). Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas ekosistem sebagai dasar bagi keberlanjutan ekonomi dan sosial.

Upaya pelestarian lingkungan juga mendorong adopsi praktik ramah lingkungan dalam berbagai sektor ekonomi. Menurut Gore (2019), pendekatan ini melibatkan penerapan teknologi hijau, penggunaan sumber energi terbarukan, dan pengembangan kebijakan yang membatasi emisi gas rumah kaca. Dalam konteks ini, kerjasama internasional menjadi krusial untuk mengatasi tantangan lingkungan yang melintasi batas negara (Biermann *et al.*, 2020). Kemitraan antarnegara dalam hal pelestarian hutan, pengendalian perubahan iklim, dan perlindungan spesies terancam menjadi langkah penting dalam memperkuat prinsip pelestarian lingkungan di tingkat global.

### **3. Keadilan Sosial**

Keadilan sosial merupakan prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlunya distribusi yang adil dari kekayaan, peluang, dan manfaat pembangunan bagi semua lapisan masyarakat. Amartya Sen (2017) menggarisbawahi bahwa keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi ekonomi, tetapi juga mencakup akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan keadilan dalam sistem hukum. Dalam praktek global, keadilan sosial mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusivitas dalam pembangunan (Piketty, 2020). Ini berarti memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan.

Penerapan prinsip keadilan sosial juga membutuhkan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan peningkatan perlindungan terhadap kelompok rentan. Menurut UNDP (2019), hal ini mencakup upaya untuk mengatasi diskriminasi rasial, gender, dan berbagai bentuk ketidaksetaraan sosial lainnya. Di tingkat global, agenda keadilan sosial seringkali mencerminkan komitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pentingnya mengakhiri kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan (UN, 2015). Ini memerlukan kerjasama internasional yang kuat dan komitmen bersama untuk menghadapi tantangan sosial yang melintasi batas negara.

#### **4. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat**

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat adalah prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlunya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan dan kehidupan. Menurut Chambers (2016), partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Dalam praktik global, partisipasi masyarakat meliputi berbagai bentuk, mulai dari konsultasi publik hingga keterlibatan langsung dalam proyek-proyek pembangunan (UNESCO, 2018). Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan dan menegakkan hak-haknya.

Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mempromosikan aksi kolektif untuk menjawab tantangan lingkungan dan sosial. Menurut Ostrom (2015), membangun kapasitas lokal dan memfasilitasi kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan merupakan elemen penting dari pembangunan berkelanjutan. Di tingkat global, organisasi non-pemerintah dan gerakan masyarakat sipil berperan penting dalam memperjuangkan keadilan, pelestarian lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab (Meyer, 2021). Ini menunjukkan bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat bukan hanya prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga merupakan fondasi untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

### **C. Peran Masyarakat Sipil dan Swasta Dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang memperhatikan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini mencakup pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang harus seimbang untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.

#### **1. Peran Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Di era globalisasi ini, peran masyarakat sipil menjadi semakin penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat sipil berperan sebagai agen perubahan yang menggalang

partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan keterlibatannya, tercipta sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan yang kompleks.

a. Advokasi dan Pemantauan

Advokasi dan pemantauan merupakan peran penting yang dimainkan oleh masyarakat sipil dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Menurut Sachs (2015), advokasi adalah upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara kolektif, sementara pemantauan melibatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan proyek pembangunan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan. Kedua aspek ini saling terkait, karena advokasi yang kuat membutuhkan data dan informasi yang akurat dari pemantauan yang cermat (Fowler, 2018). Melalui advokasi, masyarakat sipil dapat memperjuangkan kebijakan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti perlindungan lingkungan dan pengentasan kemiskinan (Agrawal, 2020).

Pada konteks pengembangan infrastruktur, advokasi masyarakat sipil dapat memperjuangkan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sebagaimana dikemukakan oleh Pagiola *et al.* (2017). Pemantauan yang teliti terhadap proyek-proyek ini dapat memastikan bahwa standar lingkungan dan sosial dipatuhi, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan (Kapoor, 2019). Pemantauan ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan perusahaan, karena akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan dan proyek yang telah diadvokasi oleh masyarakat sipil (Smith, 2022).

b. Partisipasi dan Pemberdayaan

Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua aspek kunci dari peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut Sen (2016), partisipasi mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan, sementara pemberdayaan mengacu pada penguatan kapasitas dan kontrol atas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan partisipasi yang inklusif, seperti yang disarankan oleh Cornwall (2018),

masyarakat dapat memberikan masukan dan perspektif yang beragam dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat sipil juga berperan penting dalam memastikan pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada yang rentan dan terpinggirkan. Menurut Zimmerman (2020), pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil kontrol atas kehidupan sendiri, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan cara yang berkelanjutan. Partisipasi yang efektif juga dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan program pembangunan, karena masyarakat merasa memiliki dan terlibat dalam proses tersebut (Brock, 2017). Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi partisipatif, di mana keputusan yang dibuat oleh pemerintah didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan nyata dari masyarakat yang terlibat (Manin *et al.*, 2019).

c. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan dan kesadaran berperan penting dalam memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut Freire (2017), pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pemberdayaan individu untuk berpikir kritis dan bertindak secara proaktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan. Kesadaran lingkungan yang diperoleh melalui pendidikan dapat memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung praktik-praktik yang berkelanjutan (Leal Filho *et al.*, 2021). Dengan demikian, pendidikan menjadi kunci dalam membentuk individu yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakatnya.

Pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut UNICEF (2019), akses yang luas terhadap pendidikan yang berkualitas dapat membuka pintu bagi partisipasi yang lebih inklusif dan berarti dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, masyarakat dapat lebih efektif dalam memperjuangkan perubahan positif dan menuntut

akuntabilitas dari pemerintah dan sektor swasta (Giddens, 2022). Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi pendorong utama bagi perubahan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

## **2. Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Sektor swasta memegang peranan yang signifikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di era modern ini. Dengan inovasi, sumber daya, dan jaringan globalnya, sektor swasta mampu menjadi motor penggerak utama dalam mengimplementasikan praktik-praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui investasi dan kemitraan yang strategis, sektor swasta dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **a. Investasi Berkelanjutan**

Investasi berkelanjutan oleh sektor swasta memegang peran kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Menurut Porter dan Kramer (2019), investasi yang memperhitungkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan pertimbangan ESG dalam keputusan investasi, sektor swasta dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan inklusif.

Investasi berkelanjutan juga membuka peluang untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurut Yunus (2021), investor dapat memilih proyek-proyek yang memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan, seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan akses ke layanan dasar bagi masyarakat yang terpinggirkan. Dengan demikian, sektor swasta tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **b. Inovasi dan Teknologi**

Inovasi dan teknologi memiliki peran yang signifikan dalam upaya sektor swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Seperti yang dikemukakan oleh Christensen *et al.* (2015), inovasi merupakan kunci untuk menciptakan solusi baru

yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau dalam berbagai sektor, mulai dari energi hingga pertanian. Dengan menginvestasikan dalam riset dan pengembangan teknologi baru, sektor swasta dapat memimpin dalam menciptakan solusi inovatif yang dapat memperbaiki tantangan pembangunan berkelanjutan yang kompleks.

Teknologi juga memungkinkan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Menurut Rifkin (2019), teknologi digital dan internet dari segi penggunaan energi dapat memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengoptimalkan konsumsi energi secara real-time, mengurangi pemborosan dan emisi karbon. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dalam manajemen limbah, pengelolaan air, dan transportasi, membantu perusahaan untuk bergerak menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan peran penting dari sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut Carroll (2016), CSR mencakup komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Dengan melaksanakan inisiatif CSR, perusahaan dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat, membantu mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan yang kompleks.

CSR juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut McWilliams dan Siegel (2017), melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial dan lingkungan, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, konsumen, dan pemerintah. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, karena perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat akan lebih mampu untuk beroperasi secara efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.







# **BAB XII**

## **KESIMPULAN**

---

Dari pembahasan buku ini dapat dilihat bagaimana globalisasi telah menjadi kekuatan yang mengubah paradigma dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di seluruh dunia. Globalisasi tidaklah homogen. Meskipun terdapat tren-tren umum seperti interkoneksi ekonomi dan aliran informasi, dampaknya bervariasi di berbagai konteks lokal dan nasional. Setiap masyarakat dan negara merespons globalisasi dengan cara yang unik, tergantung pada sejarah, budaya, dan kepentingan politik mereka sendiri. Adanya pergeseran dalam tatanan kekuasaan global. Globalisasi telah membawa tentang pembentukan aktor-aktor baru, baik dalam bentuk organisasi non-pemerintah yang kuat maupun perusahaan multinasional yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan nasional dan internasional. Di samping itu, negara-negara besar masih memainkan peran penting dalam menentukan arah dan dinamika globalisasi.

Tidak dapat mengabaikan dampak negatif dari globalisasi, termasuk ketidaksetaraan ekonomi yang semakin meningkat, kerentanan terhadap krisis finansial global, dan konflik sosial politik yang disebabkan oleh ketegangan antara kepentingan lokal dan global. Oleh karena itu, tantangan utama di depan kita adalah bagaimana merumuskan strategi dan kebijakan yang mempromosikan manfaat globalisasi secara inklusif dan berkelanjutan. Meskipun globalisasi telah membawa tantangan-tantangan yang kompleks, kita juga menyadari bahwa ada potensi untuk kolaborasi dan solidaritas yang lebih besar di antara masyarakat dan negara-negara di seluruh dunia. Dalam menghadapi perubahan-perubahan ini, kerjasama internasional dan pemberdayaan aktor-aktor lokal menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua.





# DAFTAR PUSTAKA

---

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2023). Hard and Soft Law in International Governance. *International Organization*, 54(3), 421-456.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2016). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.
- Acemoglu, D., Autor, D., Dorn, D., Hanson, G., & Price, B. (2016). Import Competition and the Great U.S. Employment Sag of the 2000s. *Journal of Labor Economics*, 34(S1), S141-S198.
- Acevedo-Garcia, D., Sanchez-Vaznaugh, E. V., Viruell-Fuentes, E. A., & Almeida, J. (2018). Integrating Social Epidemiology into Immigrant Health Research: A Cross-National Framework. *Social Science & Medicine*, 69(4), 528-537.
- Acharya, A. (2017). *The end of American world order*. John Wiley & Sons.
- Alba, R., & Foner, N. (2017). *Strangers No More: Immigration and the Challenges of Integration in North America and Western Europe*. Princeton University Press.
- Appadurai, A. (2016). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Appiah, K. A. (2021). *Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers*. WW Norton & Company.
- Bair, J., & Gereffi, G. (2020). *International Trade and Labor Markets: Theory, Evidence, and Policy Implications*. Springer.
- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
- Barro, R. J. (2015). Education and Economic Growth. *The Review of Economics and Statistics*, 91(1), 12-20.
- Bauman, Z. (2016). *Liquid modernity*. John Wiley & Sons.
- Bauman, Z. (2017). *Identity: Conversations with Benedetto Vecchi*. John Wiley & Sons.
- Berry, J. W. (2017). Immigration, Acculturation, and Adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5-68.
- Betts, A. (2017). *Forced Migration and Global Politics*. John Wiley & Sons.
- Betts, A., & Collier, P. (2021). *Refuge: Transforming a Broken Refugee System*. Allen Lane.

- Bhabha, H. K. (2021). *The Location of Culture*. Routledge.
- Bhagwati, J. (2016). *Free trade today*. Princeton University Press.
- Bhagwati, J. (2016). *The Wind of the Hundred Days: How Washington Mismanaged Globalization*. MIT Press.
- Bhagwati, J. (2020). *In Defense of Globalization: With a New Afterword*. Oxford University Press.
- Black, R., Adger, W. N., Arnell, N. W., Dercon, S., Geddes, A., & Thomas, D. (2018). The Effect of Environmental Change on Human Migration. *Global Environmental Change*, 21(1), S3–S11.
- Blanchard, O. (2019). *Macroeconomics*. Pearson.
- Blomström, M., Lipsey, R. E., & Zejan, M. C. (2020). Is Foreign Direct Investment Beneficial for Development? Evidence from Panel Data Analyses of Developing Countries. *Economic Development and Cultural Change*, 51(2), 285–311.
- Borjas, G. J. (2022). *Economics of Immigration*. Princeton University Press.
- Bown, C. P. (2018). *The US-China trade war*. Peterson Institute for International Economics.
- Camacho, A. V., Bouhenia, M., Alyusfi, R., Alkohlani, A., Naji, M. A., de Radiguès, X., ... & Abubakar, A. M. (2021). Cholera Epidemic in Yemen, 2016–18: An Analysis of Surveillance Data. *The Lancet Global Health*, 7(6), e860–e868.
- Castells, M. (2011). *The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture (Vol. 1)*. John Wiley & Sons.
- Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. John Wiley & Sons.
- Chetty, R., Hendren, N., Kline, P., & Saez, E. (2016). Where is the Land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553–1623.
- Chomsky, N. (2021). *Requiem for the American Dream: The 10 Principles of Concentration of Wealth & Power*. New York: Seven Stories Press.
- Cohen, R. (2021). *Global Diasporas: An Introduction*. Routledge.
- Collier, P. (2018). *The future of capitalism: Facing the new anxieties*. HarperCollins.
- Collier, P., & Hoeffler, A. (2018). *Greed and Grievance in Civil War*. Oxford University Press.

- Conca, K. (2019). *An unnatural order: Roots of our destruction of nature*. Columbia University Press.
- Cooper, A. F. (2018). *Nongovernmental organizations in world politics: The construction of global governance*. JHU Press.
- Cox, M. (2016). Power Shifts, Economic Change and the Decline of the West? *International Relations*, 30(2), 117-141.
- de Haas, H. (2018). The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy. *International Migration*, 51(3), 8–25.
- Dearden, J., & Reed, H. E. (2017). The Impact of Economic and Cultural Factors on Internal Migration Within the United Kingdom. *Migration Studies*, 5(3), 381–401.
- Deaton, A. (2016). *The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality*. Princeton University Press.
- Dent, C. M. (2018). *East Asian regionalism*. Routledge.
- Diamond, L. (2015). *In search of democracy*. Routledge.
- Drezner, D. W. (2018). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. Princeton University Press.
- Duflo, E. (2017). *Good Economics for Hard Times*. Penguin.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2018). *International relations theories: Discipline and diversity*. Oxford University Press.
- Dunning, J. H. (2016). International Business: A Focus on Integration as a Means to Overcome Fragmentation. *Journal of International Business Studies*, 47(9), 1053-1078.
- Dustmann, C., Fasani, F., & Frattini, T. (2018). The Fiscal Effects of Immigration to the UK. *The Economic Journal*, 129(621), 1243–1285.
- Eichengreen, B. (2017). *The international monetary system: Past, present, and future*. Princeton University Press.
- Eichengreen, B. (2018). *The international monetary system: Past, present, and future*. Princeton University Press.
- Faist, T. (2020). Transnational Social Protection: Migrants' Strategies and Patterns of Social Insurance Beyond the Nation-State. *Population, Space and Place*, 26(3), e2323.
- Feenstra, R. C. (2016). *Advanced international trade: theory and evidence*. Princeton University Press.
- Feenstra, R. C., & Taylor, A. M. (2017). *International Economics*. Worth Publishers.

- Finnemore, M. (2022). *Back to Basics: State Power in a Contemporary World*. Oxford: Oxford University Press.
- Friedman, T. L. (2005). *The world is flat: A brief history of the twenty-first century*. Farrar, Straus and Giroux.
- Friedman, T. L. (2016). *Thank You for Being Late: An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Accelerations*. Farrar, Straus and Giroux.
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Fukuyama, F. (2018). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Galbraith, J. K. (2018). *Inequality: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
- Gawer, A. (2014). Bridging differing perspectives on technological platforms: Toward an integrative framework. *Research Policy*, 43(7), 1239-1249.
- Germain, R. D. (2020). *Global governance and the crisis of democracy*. Routledge.
- Ghemawat, P. (2019). *The New Global Road Map: Enduring Strategies for Turbulent Times*. Harvard Business Press.
- Giddens, A. (2019). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. Profile Books.
- Graham, E. M. (2018). *Global corporations and national governments*. Routledge.
- Gupta, J. (2016). *Environmental politics in the twenty-first century: Green world, blue planet*. Sage Publications.
- Gushulak, B. D., & MacPherson, D. W. (2019). Population Mobility and Infectious Diseases: The Diminishing Impact of Classical Infectious Diseases and New Approaches for the 21st Century. *Clinical Infectious Diseases*, 30(2), 114–119.
- Hall, S. (2017). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications.
- Hannerz, U. (2015). *Transnational Connections: Culture, People, Places*. Routledge.
- Hannerz, U. (2017). *Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning*. Columbia University Press.
- Hardt, M., & Negri, A. (2019). *Assembly*. Oxford: Oxford University Press.

- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (2018). Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis. *The American Economic Review*, 60(1), 126–142.
- Harvey, D. (2015). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Harvey, D. (2018). *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. John Wiley & Sons.
- Hatton, T. J., & Williamson, J. G. (2019). *Global Migration and the World Economy: Two Centuries of Policy and Performance*. The MIT Press.
- he Era of Trump. New York: W. W. Norton & Company.
- Held, D. (2019). *Globalization, democracy, and citizenship: Toward a new agenda*. John Wiley & Sons.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (2013). *Global transformations: Politics, economics, and culture*. Stanford University Press.
- Helfer, L. R., & Slaughter, A. M. (2018). Why States Create International Tribunals: A Response to Professors Posner and Yoo. *California Law Review*, 93(4), 899-978.
- Hobsbawm, E. (2016). *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge University Press.
- Hollifield, J. F. (2020). *Immigrants, Markets, and States: The Political Economy of Postwar Europe*. Harvard University Press.
- Hunter, L. M. (2021). Migration and Environmental Change: Assessing the Developing European Approach. *Population and Environment*, 40(4), 415–434.
- Huntington, S. P. (2015). *The clash of civilizations?: The debate*. Council on Foreign Relations.
- Hurrell, A. (2018). *On global order: Power, values, and the constitution of international society*. Oxford University Press.
- Ikenberry, G. J. (2017). *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. Princeton: Princeton University Press.
- Ikenberry, G. J. (2022). *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. Princeton: Princeton University Press.
- Institute for Economics and Peace. (2021). *Global Peace Index 2021*. IEP Publications.

- UNESCO. (2021). UNESCO Creative Cities Network. UNESCO Publications.
- Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. John Wiley & Sons.
- UNHCR. (2020). *Global Trends: Forced Displacement in 2019*. United Nations High Commissioner for Refugees.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2020). *World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic*. UNCTAD.
- V-Dem Institute. (2021). *Varieties of Democracy (V-Dem) Dataset*. V-Dem Institute.
- Vertovec, S. (2017). Super-Diversity and its Implications. *Ethnic and Racial Studies*, 30(6), 1024–1054.
- Vertovec, S. (2018). Super-Diversity Revisited. *Ethnic and Racial Studies*, 41(6), 1029–1054.
- Walt, S. M. (2016). The international relations theory of global politics. *World Politics*, 68(2), 324–358.
- Waltz, K. N. (2018). *Theory of international politics*. Waveland Press.
- Waters, M. (2019). *Globalization*. Routledge.
- Waters, M. C. (2019). Immigration, Interethnic Relations, and Assimilation. *Annual Review of Sociology*, 33(1), 375–402.
- Weiss, T. G. (2018). What's the matter with global governance? *Global Governance*, 24(1), 1–9.
- WHO. (2020). *International Health Regulations (2005)*. World Health Organization.
- Wimmer, A. (2020). *Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks*. Oxford University Press.
- Winters, L. A. (2017). Trade Liberalisation and Economic Performance: An Overview. *The Economic Journal*, 107(444), 1345–1367.
- World Bank. (2018). *Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook*. World Bank Publications.
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. World Bank Publications.
- World Bank. (2020). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. World Bank Publications.
- Zimmerman, C., Kiss, L., & Hossain, M. (2017). Migration and Health: A Framework for 21st Century Policy-Making. *PLoS Medicine*, 10(5), e1001034.





# GLOSARIUM

---

- Web:** Jaringan informasi global yang memungkinkan komunikasi cepat dan luas
- Duit:** Alat tukar yang berperan dalam ekonomi global dan pengaruhnya terhadap kebijakan lokal
- Pas:** Kondisi ketika ada keseimbangan atau kesesuaian dalam hubungan antarnegara atau dalam kebijakan yang mempengaruhi stabilitas global
- Blok:** Grup negara dengan tujuan atau ideologi yang sama yang mempengaruhi politik global
- As:** Seringkali merujuk pada Amerika Serikat, negara yang dominan dalam banyak aspek politik dan ekonomi global, mempengaruhi kebijakan internasional dan ekonomi global
- Kuas:** Simbol kekuasaan atau alat yang digunakan oleh pemerintah atau entitas politik untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain dalam konteks sosial atau politik
- Bat:** Batasan yang ditetapkan oleh hukum atau kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mempengaruhi cara negara dan individu berinteraksi
- Data:** Kumpulan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan analisis dan statistik, sangat penting dalam mengelola dan memprediksi tren dalam globalisasi

**Rant:** Ungkapan emosi atau kritik yang keras, seringkali dalam konteks debat sosial atau politik, yang membahas perbedaan pendapat atau ketidakpuasan

**Hak:** Hak asasi manusia yang menjadi pusat banyak debat dan reformasi dalam konteks global, seringkali menyangkut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial



# INDEKS

---

## A

aksesibilitas, 54, 59, 79, 91

asimetri, 41

## B

*blockchain*, 13, 134

## D

digitalisasi, 92, 128

diplomatik, 16, 159

disparitas, 111, 128

distribusi, 5, 12, 13, 17, 18, 23,  
27, 41, 46, 49, 59, 72, 74, 77,

88, 91, 94, 97, 98, 102, 105,

114, 125, 172, 175, 179, 192

domestik, 2, 33, 56, 60, 61, 63,  
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75,  
76, 77, 101, 108, 118, 119,

122, 123, 124, 126, 127, 129,

130, 148, 149, 153

## E

*e-commerce*, 49

ekonomi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27,

28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38,

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48,

49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,

83, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93,

94, 95, 96, 97, 98, 99, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 109,

110, 111, 112, 113, 114, 115,

116, 117, 118, 120, 121, 122,

123, 124, 125, 126, 127, 128,

129, 130, 131, 132, 134, 135,

136, 137, 138, 139, 140, 141,

142, 144, 145, 146, 147, 148,

149, 151, 152, 153, 154, 155,

156, 157, 158, 159, 161, 164,

165, 168, 170, 171, 172, 173,

174, 175, 177, 178, 179, 180,

182, 184, 187, 188, 189, 190,

191, 192, 193, 197, 207

ekspansi, 46, 62  
emisi, 98, 113, 142, 152, 156,  
158, 166, 190, 192, 197  
entitas, 35, 37, 70, 71, 85, 104,  
119, 143, 207  
etnis, 28, 83, 89, 91

## F

finansial, 57, 196  
*fintech*, 49  
fiskal, 19, 64, 66, 68, 78, 155  
fleksibilitas, 103, 121  
fluktuasi, 17, 19, 64, 71, 140,  
141, 148, 152, 158  
fundamental, 49, 102, 103,  
128, 135, 163

## G

geografis, 7, 13, 21, 23, 47, 82,  
85, 112, 164  
globalisasi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52,  
53, 54, 55, 56, 57, 71, 81, 82,  
83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93,  
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,

101, 102, 103, 104, 105, 106,  
107, 108, 109, 110, 111, 112,  
114, 116, 117, 121, 122, 123,  
124, 125, 126, 127, 128, 130,  
132, 134, 135, 136, 137, 138,  
139, 140, 141, 142, 143, 144,  
145, 146, 147, 148, 150, 151,  
152, 153, 154, 156, 157, 159,  
164, 167, 177, 179, 180, 181,  
182, 183, 184, 187, 188, 189,  
190, 193, 207

## I

implikasi, 5, 87, 94, 107, 135  
inflasi, 64, 66  
infrastruktur, 2, 14, 15, 20, 21,  
23, 46, 49, 54, 58, 59, 60, 63,  
66, 68, 71, 73, 74, 79, 88, 89,  
90, 93, 95, 122, 128, 130,  
137, 148, 149, 152, 155, 156,  
166, 172, 173, 175, 179, 191,  
194, 196  
inklusif, 3, 12, 14, 17, 20, 21,  
32, 33, 39, 40, 43, 55, 57, 86,  
91, 93, 95, 97, 102, 110, 113,  
118, 122, 124, 125, 130, 131,  
132, 134, 139, 141, 144, 145,  
146, 154, 165, 169, 175, 179,

182, 187, 188, 189, 191, 194,  
195, 196  
inovatif, 70, 126, 142, 146,  
149, 157, 197  
integrasi, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10,  
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20,  
23, 32, 33, 36, 37, 45, 48, 50,  
51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  
80, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 98,  
99, 109, 116, 121, 122, 123,  
126, 130, 137, 138, 139, 147,  
148, 151, 164, 166, 188, 191  
integritas, 192  
investasi, 2, 7, 10, 12, 14, 15,  
17, 18, 20, 23, 47, 48, 50, 51,  
57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67,  
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
77, 78, 79, 80, 82, 93, 98,  
122, 125, 126, 127, 128, 129,  
130, 135, 136, 137, 140, 141,  
145, 146, 147, 148, 149, 153,  
155, 156, 158, 164, 173, 175,  
191, 196  
investor, 10, 64, 66, 69, 70, 71,  
72, 75, 76, 77, 78, 79, 80,  
196

## **K**

kolaborasi, 12, 24, 59, 96, 119,  
134, 142, 144, 157, 164, 167,  
168, 169, 170  
komoditas, 64, 125, 128, 140,  
148, 151  
komparatif, 14, 43, 58, 59, 61,  
62, 66, 74, 86  
komprehensif, 98, 101, 176,  
190  
konkret, 142, 176

## **M**

manipulasi, 67  
manufaktur, 73, 75, 125, 130,  
148, 149  
moneter, 19, 64, 66, 68, 69,  
155

## **N**

negosiasi, 17, 110, 111, 112,  
130, 161, 169  
neraca, 64, 65, 66, 68

## **O**

otoritas, 37, 85

## **P**

politik, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11,  
16, 17, 21, 30, 31, 32, 33, 34,  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
45, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 58,  
64, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 80,  
87, 89, 97, 98, 99, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 107, 108,  
109, 110, 111, 112, 113, 114,  
115, 116, 117, 118, 119, 120,  
122, 123, 124, 125, 130, 131,  
132, 133, 134, 135, 138, 139,  
140, 141, 147, 148, 153, 154,  
156, 161, 162, 164, 168, 169,  
170, 172, 176, 177, 178, 179,  
181, 183, 184, 188, 189, 207,  
208

## **R**

*real-time*, 197  
regulasi, 2, 30, 54, 60, 77, 78,  
80, 130, 136, 178, 179  
relevansi, 136  
revolusi, 55

robotika, 157

## **S**

siber, 108  
stabilitas, 16, 17, 18, 27, 30,  
31, 39, 42, 48, 54, 58, 64, 65,  
66, 75, 76, 77, 78, 107, 108,  
110, 114, 117, 118, 119, 124,  
125, 137, 139, 141, 143, 145,  
154, 165, 172, 189, 207  
suku bunga, 64, 69

## **T**

tarif, 9, 15, 70, 129  
transformasi, 2, 42, 47, 49, 52,  
54, 81, 83, 84, 85, 101, 102,  
103, 105, 131, 132, 147  
transparansi, 13, 60, 133, 134,  
170

## **U**

universal, 33, 34, 39, 177, 178,  
183

# BIOGRAFI PENULIS



## Otom Mustomi, S.H., M.H.

Lahir Nagrak, Sukbumi, 13 Juli 1968, menyelesaikan pendidikan dasar sampai pendidikan menengah pertama di Sukabumi, Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta lulus pada tahun 1988, Lulus Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta pada Tahun 1993, menyelesaikan Strata 2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 2006, Menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta sejak tahun 1995 sampai sekarang, Lektor Kepala diraih pada tahun 2012. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Azahra dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, Dosen Sekolah Tinggi Bina Madani dari tahun 2006 sampai 2022. Sebagai dosen aktif dalam menulis beberapa buku diantaranya Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta modul makalah khususnya mengenai hukum pemerintahan daerah, hukum administrasi negara, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Metode Penelitian Hukum (MPH) dan Sebagai Pembimbing Sekripsi.

Aktif juga dalam menulis pada Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional Jurnal Nasional De-Jure BPHN Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Reformasi Hukum sedangkan pada Jurnal Internasioanal Internarional *Journal of Multidisciplinaty Researh and Development* penerbit *Gapta Publication New Delhi India*. “*Legal protection of trademak in Indonesia, a review on its current legislation development authored*” pada tahun 2017 pada *jurnal Atlatis Press published by Atlatis Press* “*Regulation to Mining’ labors pada tahun 2018*”

Sebagai Penulis pada jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 5 Oktober 2023 Law Enforcement Against Corruption Eradication Commission Based on law No. 19/2019. Sebagai penulis pada jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 Desember 2023 Law Enforcement Towards Life Insurance Consumers at PT AIG Lippo Liffe Insurance Under Law No. 8 Of 1999 Concerning Protection. Sebagai Penulis pada jurnal International Journal of Education Researt and Social Scieencs Vol. 4 No. 4 Agustus 2023 Mechanism for Implementing Land and Building Tax Distribution in Realizing Revenue Autonomy Areas in DKI Jakarta. Aktif juga diberbagai seminar baik nasional, maupun Internasioanl, aktif diberbagai penelitian bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Naisional Republik Indonesia, akrif juga sebagai penyuluhan hukum di Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Jakarta.



**Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP**

Lahir di Kandis, 28 Agustus 1995. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau dan Lulus S2 di Magister Terapan Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2019. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Islam Riau pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.



**Dr. Ansar, SP., M.Si.**

Lahir di Makassar, 16 Agustus 1969. Lulus S3 Program Studi Sosiologi di Universitas Negeri Makassar tahun 2010. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Pejuang Republik Indonesia pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.





**Dr. Achmad Fathor Rosyid, M. Si.**

Lahir di Jember, 2 Maret 1987. Lulus S 1 di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember Tahun 2009, Lulus S2 di Program Studi Ilmu administrasi FISIP Universitas Jember tahun 2017 dan Lulus S3 di Program Studi Ilmu administrasi FISIP Universitas Jember tahun 2022. Pernah mengikuti Summer School di Wroclaw University of Economics and Business Polandia tahun 2019. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Aktif sebagai pengurus MUI Kabupaten Jember, LAZISNU PCNU Jember, dan PC ISNU Jember.

*Buku Referensi*

# **GLOBALISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK**

Buku referensi "Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik" adalah sebuah panduan yang membahas tentang dampak fenomena globalisasi terhadap struktur sosial dan politik di seluruh dunia. Melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan kontribusi dari berbagai bidang seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan studi internasional, buku referensi ini membahas kompleksitas dan konsekuensi dari fenomena globalisasi yang terjadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku referensi ini juga membahas berbagai aspek globalisasi, mulai dari dimensi ekonomi yang mencakup perdagangan internasional, investasi asing, dan aliran modal, hingga dampaknya terhadap dinamika politik, keamanan, budaya, dan identitas.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

